

Bagian 6: Profil Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor-Leste, 1974-1999

Bagian 6: Profil Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor-Leste, 1974-1999	1
Bagian 6: Profil Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor-Leste, 1974-1999	2
6.1 Pendahuluan	2
6.1.1 Rangkuman Temuan-temuan Penting	3
6.1.2 Tinjauan Manajemen Informasi dan Metode Pengumpulan Data Komisi	5
6.1.3 Estimasi pelanggaran bersejarah di Timor-Leste dan batasan-batasannya	5
6.2 Pelanggaran-pelanggaran fatal: analisis dari keseluruhan lingkup, pola, kecenderungan dan tingkat pertanggungjawaban untuk pelanggaran-pelanggaran fatal dan pemindahan di Timor-Leste, 1974-1999	8
6.2.1 Latar belakang dan tinjauan analisis statistik pelanggaran-pelanggaran fatal	8
6.2.2 Tujuan-tujuan analisis	9
6.2.3. Tinjauan data dan metode	9
6.2.4. Perkiraan-perkiraan pembunuhan, kematian karena kelaparan dan sakit, dan pemindahan	11
6.2.5 Analisis statistik deskriptif mengenai pelanggaran fatal yang dilaporkan pada Komisi ..	17
6.3 Pelanggaran-Pelanggaran Non-fatal	25
6.3.1 Pengantar	25
6.3.2 Tinjauan dari Temuan-Temuan Statistik mengenai Pelanggaran Non-Fatal	25
6.3.3 Keterangan mendalam analisis statistik pelanggaran non-fatal	27
6.4 Studi kasus Mauchiga: suatu analisis kuantitatif pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama operasi menumpas Perlawanan	44
6.4.1 Pendahuluan	44
6.4.2 Latar belakang usaha pendokumentasian	44
6.4.3 Batasan-batasan data	45
6.4.4 Latar belakang historis	45
6.4.5 Analisis statistik deskriptif pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan pada Proyek Dokumentasi Mauchiga	46
6.5 Ringkasan dan kesimpulan	51

Bagian 6: Profil Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor-Leste, 1974-1999

6.1 Pendahuluan

1. Untuk mencapai tujuan-tujuan inti dari mandat pencarian kebenarannya, Komisi mengembangkan sejumlah program, termasuk penelitian empiris kualitatif dan analisis statistik kuantitatif. Bab ini menyajikan temuan-temuan yang dihasilkan dari kerja statistik Komisi dan membahas pendekatan metodologis yang digunakan untuk sampai pada temuan-temuan ini.
2. Bagian pendahuluan, yaitu 6.1, memberi rangkuman singkat dari temuan-temuan penting, ulasan konteks sejarah yang mendasari kerja demografis dan statistik Komisi, dan garis besar dari keputusan-keputusan mengenai manajemen informasi Komisi.
3. Bagian 6.2 menyajikan perkiraan demografik dan statistik dari keseluruhan cakupan, pola dan kecenderungan dari pelanggaran-pelanggaran fatal di Timor-Leste antara 1974 dan 1999 serta tingkat pertanggungjawaban atas pelanggaran-pelanggaran tersebut. Perkiraan-perkiraan ini diperoleh dari analisis statistik dan demografik dari data yang dikumpulkan oleh Komisi dan data eksternal dari badan-badan statistik resmi serta lembaga-lembaga hak asasi manusia. Walaupun pemindahan belum tentu merupakan pelanggaran fatal, tapi ia terkait erat dengan kematian-kematian yang berhubungan dengan konflik dan kelaparan. Oleh karena itu, analisis pemindahan skala-besar diikutsertakan dalam Bagian 6.2.
4. Bagian 6.3 menyajikan analisis dari pola umum pelanggaran-pelanggaran non-fatal. Komisi tidak berhasil menemukan sumber-sumber lain yang memiliki informasi ekstensif tentang pelanggaran-pelanggaran non-fatal selain dari kesaksian-kesaksian yang ada pada Komisi. Karena itu tidak dapat dibuat perkiraan kuantitatif yang seksama dari keseluruhan pelanggaran non-fatal selama 1974-1999. Sehingga, analisis statistik yang dideskripsikan dalam bagian ini terfokus pada pandangan makro mengenai pola dan kecenderungan dari pelanggaran non-fatal seperti yang terungkap dalam pernyataan-pernyataan yang diberikan kepada Komisi.
5. Bagian 6.4 menyajikan sebuah studi kasus statistik mengenai pelanggaran yang dilaporkan oleh komunitas desa Mauchiga dalam rangka pemberontakan oleh pihak Perlawanan di wilayah mereka pada bulan Agustus 1982, disertai pukulan balik oleh angkatan bersenjata Indonesia. Studi kasus ini dipakai untuk menyoroti pola serta kecenderungan penahanan sewenang-wenang, pemindahan paksa dan kematian disebabkan konflik yang dialami pada tahap 'konsolidasi dan normalisasi' pendudukan Indonesia di Timor-Leste di seluruh wilayah.
6. Bagian 6.5 memberikan ringkasan singkat beserta kesimpulan.
7. Selbihnya, sebuah Lampiran menerangkan cara-cara pengumpulan data serta teknik statistik yang dipakai oleh Komisi untuk mencapai kesimpulannya. Di sini terdapat latarbelakang metodologis dan pembahasan rinci mengenai berbagai set data beserta metode pengolahan, teknik penghubungan dan teknik perkiraan yang telah dipakai.

^{*} Di bagian ini, untuk keperluan metode penelitian kuantitatif, Komisi menetapkan Wilayah dengan cara berikut: Wilayah Timur meliputi Lautém, Viqueque, Baucau dan Manatuto; Wilayah Tengah meliputi Manufahi, Aileu, Dili dan Ainaro; sedangkan Wilayah Barat meliputi Ermera, Liquiça, Covalima dan Bobonaro.

6.1.1 Rangkuman Temuan-temuan Penting

Pelanggaran Fatal

8. Komisi memperkirakan bahwa batas minimal untuk jumlah kematian yang berkaitan dengan konflik selama periode acuan Komisi, 1974-1999, adalah 102,800 (+/- 12,000). Perkiraan ini diambil dari (i) perkiraan sebesar 18,600 untuk jumlah keseluruhan pembunuhan (+/-1000) dengan menggunakan teknik 'multiple systems estimation' (MSE) dan (ii) perkiraan sebesar 84,200 (+/- 11,000) untuk jumlah kematian karena kelaparan dan sakit yang melampaui jumlah total yang dapat diduga, kalau saja angka kematian karena kelaparan dan sakit berlangsung terus seperti dalam masa damai pada periode sebelum invasi.

9. Pola perkiraan pelanggaran fatal lintas waktu menunjukkan angka yang tinggi untuk pembunuhan dan kematian karena kelaparan dan sakit selama masa awal periode pasca invasi antara tahun 1975 dan 1980. Jumlah kematian yang dikaitkan para responden dengan "kelaparan atau sakit" melonjak ke tingkatan yang paling tinggi selama periode yang langsung sesudah invasi, yaitu, 1975-1980. Meskipun begitu, tahun 1999 ditandai dengan angka yang tinggi untuk perkiraan pembunuhan, yaitu 2,634 (+/-626).

10. Pola dan kecenderungan kematian karena kelaparan dan sakit dan karena pembunuhan berkorelasi secara positif dalam lintas waktu. Hal ini menunjukkan bahwa kedua gejala itu mempunyai sebab pokok yang sama pada waktu tahap pertama konflik. Dari pembunuhan-pembunuhan dan orang hilang yang dilaporkan dalam proses pengambilan pernyataan Komisi, 57.6% (2,947/5,120) keterlibatan pelaku tindakan dalam pelanggaran fatal dikaitkan dengan militer Indonesia dan polisi, dan 32.3% (1,654/5,120) dengan pasukan pembantu asal Timor-Timur (seperti para milisi, pasukan pertahanan sipil dan pejabat lokal yang bekerja di bawah keadministrasian Indonesia).

Pemindahan

11. Peristiwa pemindahan terjadi secara luas: 55.5% dari rumah tangga yang disurvei melaporkan satu kali atau lebih peristiwa pemindahan. Jumlah total peristiwa pemindahan yang dilaporkan adalah sebanyak 2.011 antara tahun 1974 dan 1999.*

12. Sebagian besar pemindahan terjadi antara tahun 1975 dan 1980. Tahun maksimumnya adalah tahun 1975 dan 1976, dengan 61,400 (+/- 13,300) dan 59,800 (+/- 7,200) peristiwa pemindahan secara beruntun. Jumlah peristiwa pemindahan pada tahun 1999 jauh lebih sedikit yaitu kira-kira 28,100 (+/- 5,600) peristiwa.

13. Sebagian besar pemindahan terjadi secara lokal. Dari keseluruhan peristiwa pemindahan, 54.3% terjadi di satu kecamatan, 15.6% terjadi di satu kabupaten, 17.4% terjadi di satu wilayah, 9.3% terjadi di Timor-Leste, dan 2.4% terjadi di luar Timor-Leste.† Penemuan ini mungkin dibatasi oleh pembatasan karena orang-orang yang berada di kamp pengungsian di Timor Barat tidak turut diwawancarai. Banyak pemindahan terjadi berturut-turut dalam waktu yang cepat: 22.2% dari peristiwa pemindahan berlangsung dalam waktu satu bulan atau kurang, dan 50.1% berlangsung dalam waktu satu tahun atau kurang. Akan tetapi, pemindahan lainnya ada dalam waktu yang sangat lama, sehingga rata-rata periode pemindahan adalah 46.7 bulan.‡

* Pada saat sensus 1990, terdapat kira-kira 4,5 orang per rumah tangga. Sensus 2004 mencatat penambahan sampai kira-kira 4,75 orang per rumah tangga (924.642/194.943). Interval keyakinan nominal adalah 51,8%-59,2% dari rumah tangga ini.

† Tingkat kesalahan nominal untuk pemindahan dalam satu kecamatan adalah sebesar +/-10,4%, dan 4,6% atau kurang untuk perkiraan-perkiraan lain.

‡ Tingkat kesalahan nominal adalah 41-52 bulan

14. Badan yang dilaporkan penduduk sebagai kelompok yang paling sering menyuruh mereka pindah adalah Militer Indonesia (46.4%), diikuti oleh Fretilin/Falintil (15.0%) dan kelompok milisi (8.8%).^{*} Responden melaporkan bahwa “konflik” merupakan motivasi dari 52.3% keseluruhan pemindahan mereka, dengan tambahan 16.3%. “dipaksa oleh Militer Indonesia”.

Pelanggaran Non-Fatal

15. Pola dalam waktu dari pelanggaran-pelanggaran non-fatal yang dilaporkan adalah mirip dengan pola pelanggaran fatal: pelanggaran non-fatal besar-besaran pada masa tahun-tahun awal invasi dan pendudukan diikuti dengan pelanggaran yang relatif rendah pada masa tahun-tahun konsolidasi dan normalisasi, lalu kenaikan pelanggaran kembali terjadi pada tahun 1999. Pelanggaran-pelanggaran non-fatal sekitar masa invasi Indonesia pada tahun 1975 paling banyak terjadi di Wilayah-wilayah Barat dan Tengah; setelah tahun 1976 fokus pelanggaran non-fatal bergeser ke Wilayah Timur.

16. Pola statistik yang diamati dari penahanan dan penyiksaan yang dilaporkan menunjukkan bahwa sepanjang waktu (dan terutama setelah tahun 1984) praktek penahanan sewenang-wenang menjadi lebih bersasaran dan semakin umum digunakan bersama dengan tindak penyiksaan. Pada tahun-tahun awal invasi ada sekitar tiga kasus penahanan untuk setiap kasus penyiksaan yang dilaporkan. Setelah tahun 1985 kedua pelanggaran itu makin tampak lebih erat terkait satu sama lain dengan jumlah penahanan yang dilaporkan kurang lebih sama dengan tindak penyiksaan setiap tahunnya.

17. Keseluruhan temuan kuantitatif Komisi konsisten dengan hipotesis bahwa individu-individu yang ditahan selama periode acuan Komisi mengalami kerentanan semakin tinggi terhadap penyiksaan dan penganiayaan. Penyiksaan dan penganiayaan lebih sering dilaporkan oleh korban-korban yang ditahan selama periode acuan Komisi: dari pelanggaran-pelanggaran penyiksaan yang didokumentasikan oleh Komisi, 83,6% (9.303/11.123) diderita oleh korban yang ditahan selama masa konflik. Pelanggaran yang paling sering terjadi dalam masa-masa penahanan yang diketahui adalah penyiksaan (46,9%, 4.267/9.094), penganiayaan (30,8%, 2.798/9.094) dan pengancaman (7,0%, 634/9.094).

18. Demografis korban bervariasi untuk berbagai tipe pelanggaran. Dibanding dengan keseluruhan penduduk Timor-Leste, laki-laki paruh baya mengalami tingkat tertinggi bentuk-bentuk pelanggaran non-fatal seperti penahanan, penyiksaan dan penganiayaan. Sebaliknya, pelanggaran seksual hampir seluruhnya disasarkan pada perempuan, dengan 90,2% (769/853) pelanggaran seksual yang dilaporkan dialami oleh perempuan.

19. Data kuantitatif Komisi menunjukkan perbedaan nyata dalam pola pertanggungjawaban pelanggaran-pelanggaran non-fatal antara tahun 1975 dan 1998 dibandingkan dengan pelanggaran-pelanggaran non-fatal pada tahun 1999. Khususnya, antara tahun 1975 dan 1998, 51,7% (11.658/22.547) tindak penahanan sewenang-wenang dikaitkan dengan tindakan Militer Indonesia dibandingkan dengan 8,4% (1.897/22.457) tindak penahanan yang hanya dikaitkan dengan pasukan pembantu asal Timor-Timur atau gabungan antara pasukan pendudukan Indonesia dan pasukan pembantu Timor-Timur. Akan tetapi, 75,7% (2.104/2.779) dari tindak penahanan sewenang-wenang tahun 1999 yang didokumentasi oleh Komisi dikaitkan baik dengan tindakan mandiri pasukan bantuan Timor-Timur atau kolaborasi dengan militer Indonesia dan polisi. 19,2% (534/2.779) tindak penahanan yang didokumentasi yang terjadi pada tahun 1999 hanya terkait dengan Militer Indonesia saja.

^{*} Tingkat kesalahan nominal adalah +/- 4.2%.

6.1.2 Tinjauan Manajemen Informasi dan Metode Pengumpulan Data Komisi

20. Sebagian besar komisi kebenaran mendasarkan temuan-temuan empiris mereka pada basis data yang diperoleh dari pengumpulan kesaksian kualitatif skala-besar. Dalam hal ini, CAVR tidak berbeda dengan komisi-komisi di Haiti, Afrika Selatan, atau Peru. Komisi-komisi kebenaran di negara-negara lain dapat memanfaatkan banyak informasi tambahan yang telah dikumpulkan oleh proyek-proyek hak asasi manusia pemerintah dan non-pemerintah. Sumber-sumber tambahan ini penting untuk membandingkan informasi dari tiga sumber (*triangulasi*) atau memahami pola dan skala kejadian-kejadian hak asasi manusia dari sudut pandang selain materi kualitatif yang dimiliki sebuah komisi. Tanpa koraborasi dari luar, kerja komisi dapat saja dicap sebagai memihak.

21. CAVR tidak memiliki banyak sumber-sumber eksternal, sehingga perlu diciptakan sumber-sumber baru. Pertama, Komisi mengembangkan basis data pelanggaran hak asasi manusia, atau Human Rights Violations Database (HRVD), dari kesaksian-kesaksian naratif yang dikumpulkan melalui pernyataan-pernyataan langsung dari saksi atau korban. Ini dilakukan sebagai bagian dari proses sosialisasi komunitas Komisi, yang bermaksud untuk memenuhi tujuan-tujuan pencarian kebenaran dan memajukan rekonsiliasi dan penerimaan. Komisi menggunakan naratif-naratif HRVD untuk penelitian baik kualitatif maupun kuantitatif.

22. Kedua, Komisi membuat survei tingkat kematian berlaku surut (*retrospective mortality survey*, RMS) dari 1.396 rumah tangga yang dipilih secara acak dari sekitar 180.000 rumah tangga di Timor-Leste. Tiap rumah tangga yang dijadikan sampel memberikan informasi mengenai pola bermukim mereka dan anggota-anggota rumah tangga dan kerabat yang meninggal selama periode mandat Komisi. Survei tingkat kematian seperti ini umum dijalankan oleh kantor-kantor statistik pemerintah untuk menaksir kondisi-kondisi kesehatan atau untuk memperbaiki hasil sensus. Otoritas kesehatan antar instansi pemerintah dan para akademisi ahli demografi dan epidemiologi juga biasa melakukan survei-survei semacam ini. Akan tetapi, belum pernah ada komisi kebenaran yang melakukan survei rumah tangga yang disampel secara teliti.

23. Kelompok data ketiga yang dikumpulkan oleh CAVR adalah basis data sensus batu nisan (*graveyard census database*, GCD). Setiap pekuburan umum di Timor-Leste dikunjungi, dan nama, tanggal lahir, dan tanggal kematian dicatat dari setiap makam yang memiliki informasi tersebut. Sekitar 327.000 catatan kuburan berhasil dikumpulkan; setelah data-data duplikat dibersihkan, tersisa sekitar 319.000 kuburan unik dalam sampel tersebut, yang sekitar setengahnya memiliki informasi nama lengkap dan tanggal. Catatan-catatan makam sudah digunakan oleh para ahli demografi sejarah untuk merekonstruksi ulang pola-pola kematian bersejarah, tapi belum pernah ada komisi kebenaran yang menggunakan data sejenis ini sebelumnya sebagai bagian dari rekonstruksi ingatan sejarah. Dalam dunia pengukuran hak asasi manusia, ini adalah inovasi-inovasi berharga yang sangat memperkaya pemahaman tentang masa lalu.

6.1.3 Estimasi pelanggaran bersejarah di Timor-Leste dan batasan-batasannya

Estimasi bersejarah jumlah kematian yang berhubungan dengan konflik di Timor-Leste (1974-1999)

24. Skala kematian yang berkaitan dengan konflik selama pendudukan Indonesia di Timor-Leste telah menjadi pokok perdebatan yang cukup banyak: perkiraan bervariasi antara yang terendah 40.000 sampai lebih dari 200.000. Pendapat-pendapat komentator yang paling baik

⁷ Perkiraan yang berdasarkan data resmi Portugis, Indonesia dan Gereja Katolik menunjukkan besarnya jumlah keseluruhan kematian kira-kira 200.000. Lihat, misal, Ben Kiernan "The Demography of Genocide in Southeast Asia: The Death tolls in Cambodia, 1975-79, and East Timor, 1975-80" *Critical Asian Studies* 35:4 (2003), pp. 585-597, dan Geoffrey

menyimpulkan analisis mereka dengan rekomendasi agar bukti langsung dikumpulkan dan dianalisis untuk mendapatkan perkiraan yang lebih terpercaya. Misal saja, sejarawan Robert Cribb menyebutkan bahwa ada lima teknik untuk mengukur jumlah total kematian:

- laporan dari para pelaku
- menghitung jasad orang yang meninggal atau batu-batu nisan
- mendapatkan ingatan sejarah melalui wawancara
- perkiraan tidak langsung melalui catatan sensus
- perkiraan naluri (“intuitif”) diproyeksikan dari apa yang diketahui para peneliti tentang kondisi setempat.

25. Cribb mengeluhkan bahwa pada 1999-2001, pada waktu dia menerbitkan serangkaian tulisan mengenai pokok permasalahan tersebut, semua perkiraan yang dapat diperoleh sampai saat itu, termasuk kepunyaannya sendiri, terbatas pada dua metode yang paling lemah, yakni: perkiraan tidak langsung dan perkiraan intuitif. Dalam tinjauan kembalinya yang luas mengenai kematian yang berhubungan dengan konflik di Timor-Leste, John Waddingham menulis: “Akan tetapi, kita harus mengakui, bahwa sampai saat ini dari data-data yang ada mengenai jumlah keseluruhan korban kematian di Timor-Leste, belumlah bisa dihasilkan jumlah akurat yang diakui secara umum.”¹

26. Komisi benar-benar sadar akan kesensitifan dan kepentingan perkiraan pola jumlah korban mati keseluruhan maupun yang telah dipecahkan ke dalam bagian-bagiannya. Komisi-komisi kebenaran lainnya (terutama yang di El Salvador, Guatemala dan Peru) memanfaatkan daftar-daftar data kematian yang luas, meskipun tetap belum lengkap, yang sudah didokumentasikan sebelum komisi kebenaran itu mulai bekerja. Informasi yang seperti ini tidak dipunyai oleh CAVR, dan oleh sebab itu tiga buah dataset baru telah diciptakan, yaitu: survei kualitatif dari responden yang merasa terdorong untuk memberikan kesaksian kepada Komisi; sampel probabilitas dari 1,396 rumah tangga yang pada masa lalunya mengalami kematian karena konflik; dan sensus nisan di pekuburan umum di Timor-Leste. Sumber-sumber ini sesuai dengan definisi Cribb yang kedua dan ketiga mengenai sumber data yang bisa digunakan untuk menganalisis korban kematian.

27. Sementara para aktivis hak asasi manusia kadang-kadang mengutip perbedaan yang besar antara satu perkiraan dengan yang lainnya sebagai bukti tingginya korban mati karena pendudukan Indonesia di Timor-Leste, kelihatannya penjelasannya yang mungkin adalah karena ketidakadaannya data penduduk dan demografis yang terpercaya pada periode tersebut. Sensus penduduk Timor-Leste yang terakhir sebelum pendudukan Indonesia adalah sensus menurut administrasi pemerintahan kolonial Portugis tahun 1970. Sensus-sensus juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1980 dan 1990, tetapi ketelitiannya dipertanyakan. Kecurigaan, ketakutan dan penolakan secara umum penduduk Timor-Leste terhadap pemerintah yang melakukan sensus, bertepatan dengan banyaknya peristiwa pemindahan, menghasilkan pengukuran data yang cukup meragukan.

28. Bahkan apabila sensus dari tahun 1980 dan 1990 itu teliti, pendataan sensus-sensus tersebut dari hanya jumlah penduduk tanpa pemecahan menurut data variabel demografis yang pokok (seperti usia dan jenis kelamin) banyak mengurangi kemungkinan para ahli sosial untuk menerapkan teknik pemerkiraan demografis yang standar terhadap data penduduk yang resmi.

Gunn, *East Timor and the United Nations: The Case for Intervention*. Red Sea Press. Lawrenceville, NJ: 1997, pp. 26-27. Untuk sisi yang lebih rendah, lihat Robert Cribb “How Many Deaths? Problems in the statistics of massacre in Indonesia (1965-1966) and East Timor (1975-1980)” dalam Ingrid Wessel dan Georgia Wimhoefer, eds. *Violence in Indonesia*. Abera-Verl, Hamburg: 2001. John Waddingham memberikan ulasan perkiraan-perkiraan yang diperoleh dengan pendekatan “intuitif” dan metode tak langsung, lihat John Waddingham “Timor-Leste Death Toll Claims: a Proposal for Listing dan Critical Commentary,” untuk CAVR, 14 Juli 2003.

Informasi kependudukan dari sumber-sumber non-pemerintah juga nilainya terbatas karena selama masa konflik, sangat terbatas akses para pengamat independen dan kelompok kemanusiaan terhadap Timor-Leste. Dalam hal Timor-Leste, Terence Hull, seorang ahli demografi, menulis bahwa “keragaman estimasi dalam publikasi-publikasi BPS (Biro Pusat Statistik, Central Statistical Bureau) bukannya merupakan suatu indikasi pemanipulasian data untuk kepentingan politik, tetapi lebih karena sulitnya pemastian tingkat kematian untuk jumlah penduduk yang kecil apabila untuk estimasinya kita memakai metode demografis tak langsung.”² Oleh karena keterbatasan ini, maka perdebatan ilmiah mengenai korban mati di Timor-Leste waktu itu belum terpecahkan.

29. Banyak masalah dari para analis yang terdahulu dapat terpecahkan dengan adanya publikasi hasil awal sensus Timor-Leste 2004, yang terbit pada bulan Maret 2005. Analisis korban mati dari Komisi sangat banyak memakai data sensus yang baru untuk menghitung hasil survei Komisi sendiri dengan cara yang semestinya.

Bukti terdahulu dari migrasi dan pemindahan paksa

30. Bagian-bagian besar penduduk pernah dipindahkan selama terjadinya konflik, terutama pada tahun-tahun awal pendudukan (1975-1980) dan pada tahun 1999. Misal saja, menurut angka-angka resmi dari pemerintah Indonesia, atau 268.644 atau 318.921 “orang yang terpindahkan” (displaced persons) telah ditampung di 15 pusat penampungan pada bulan Desember 1978.³ Laporan-laporan kualitatif dan penelitian sendiri dari Komisi menunjukkan bahwa orang-orang dipindahkan paksa ke kamp-kamp pemukiman kembali di mana rezim keamanan yang ketat sangat membatasi kesempatan mereka untuk mengembangkan hasil tani dan akses mereka ke sumber-sumber makanan (lihat Bab 7.3: Pemindahan Paksa dan Kelaparan). Seperti halnya dengan perkiraan mengenai kematian yang berhubungan dengan konflik, maka analisis demografis yang akurat mengenai pemindahan di Timor-Leste, terutama pada awal-awal tahun invasi, juga bermasalah karena hanya ada sedikit data. Hal ini terutama disebabkan oleh tidak adanya sistem pendaftaran administratif yang sistematis di seluruh negeri dan terbatasnya akses ke penduduk sipil yang diberikan pada organisasi kemanusiaan internasional dan organisasi hak asasi selama masa konflik tersebut.

Pelanggaran-pelanggaran Non-Fatal di Timor-Leste

31. Cakupan dan kedalaman informasi tentang situasi hak asasi manusia di Timor-Leste selama pendudukan Indonesia bervariasi dari waktu ke waktu. Hal ini terutama karena akses para pengamat hak asasi manusia mancanegara ke wilayah ini sangat dibatasi oleh pemerintah Indonesia. Terlebih lagi, akses oleh lembaga-lembaga kemanusiaan internasional (seperti ICRC dan Catholic Relief Services) ke daerah tersebut dibatasi hanya ke daerah-daerah tertentu dan periode waktu tertentu. Keterbatasan akses organisasi-organisasi internasional ke wilayah ini secara signifikan telah mempengaruhi pengetahuan komunitas internasional tentang situasi hak asasi manusia di Timor-Leste.

6.2 Pelanggaran-pelanggaran fatal: analisis dari keseluruhan lingkup, pola, kecenderungan dan tingkat pertanggungjawaban untuk pelanggaran-pelanggaran fatal dan pemindahan di Timor-Leste, 1974-1999*

6.2.1 Latar belakang dan tinjauan analisis statistik pelanggaran-pelanggaran fatal

32. Dalam analisis kematian karena konflik di Timor-Leste, berbagai pengarang menggunakan bermacam-macam istilah mengenai cara meninggalnya orang-orang tersebut. Misal saja, sebuah tulisan di tahun 2002 mencatat bahwa di Maubisse, 5.021 dari 9.607 penduduk yang hidup pada tahun 1975 *dibunuh* pada April 1979.⁴ Akan tetapi, sumber asli pernyataan ini berbunyi: desa tersebut “kehilangan” orang-orang ini, maksudnya, mereka mati dengan cara yang tidak dijelaskan lebih jauh.⁵

33. Analisis di sini membedakan antara kematian orang sipil karena kekerasan, yang disebut pembunuhan; kematian karena kelaparan dan sakit, yang sebagian memang disebabkan karena konflik tersebut; kematian karena berjuang; dan kematian lainnya.[†] Hanya pola-pola dan ukuran besarnya pembunuhan penduduk sipil, kematian karena kelaparan dan sakit, dan orang-orang hilang yang akan diperkirakan dan dianalisis.

34. Perbedaan antara kematian karena kelaparan dan sakit dengan pembunuhan berguna untuk dua alasan. Alasan pertama, orang atau lembaga yang menyebabkan kematian karena kekerasan yang disengaja mempunyai pertanggungjawaban langsung dan jelas atas kematian itu, sementara pertanggungjawaban untuk kematian karena kelaparan dan sakit lebih rumit lagi. Kedua, jumlah pembunuhan jauh lebih sedikit dibanding dengan kematian karena kelaparan dan sakit di Timor-Leste antara 1975 dan 1999. Metode-metode yang digunakan di sini untuk memperkirakan jumlah keseluruhan pembunuhan lebih tepat, dan tidak seserius menaksir lebih rendah keseluruhannya, dibanding dengan perkiraan jumlah kematian karena kelaparan dan sakit.

35. Dalam bagian-bagian di bawah ini, perkiraan-perkiraan dibulatkan ke bilangan ratusan yang paling terdekat untuk memperlihatkan bahwa perkiraan selalu merupakan jumlah kurang lebih dan harus ditafsirkan melalui ambang kesalahan. Akan tetapi, jumlah untuk kematian yang didokumentasikan itu langsung dimasukkan ke daftar secara tepat apabila jumlahnya telah benar-benar diketahui. Data dasar statistik telah disediakan agar supaya para sarjana dapat meneruskan menganalisa pola kematian baik karena pembunuhan maupun karena kelaparan dan sakit di Timor-Leste selama masa pendudukan Indonesia.[‡]

36. Baik kematian karena pembunuhan maupun kematian karena kelaparan dan sakit mencapai titik lebih tinggi pada periode langsung setelah invasi, yaitu mulai akhir 1975 sampai 1979, jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya atau dengan waktu lainnya sampai dengan tahun 1999. Kedua sebab kematian itu mencapai puncak lainnya pada tahun 1999, di mana pada

⁴ Komisi dan (Human Rights Data Analysis Group) HRDAG [Kelompok Analisa Data Hak Asas Manusia] menyatakan berterimakasih untuk komentar dan saran-saran dari Profesor David Banks (Duke University), Profesor Claes Cassel (Statistics Sweden), Dr Michael Cohen (US Department of Transportation), Dr. Peggy Jennings (Women's Rights International), Richard Öhrvall (Statistics Sweden), Dr Fritz Scheuren (National Opinion Research Center dan American Statistical Association), Profesor Herbert F. Spierer (University of Connecticut dan Columbia University), dan Dr Shana Swiss (Women's Rights International).

[†] Kategori “lain” termasuk kecelakaan dan kematian pada waktu bersalin, di antara penyebab kematian lain. Kematian-kematian ini tidak ditanyakan secara khusus di dalam kuesioner.

[‡] lihat <http://www.hrdag.org/timor> untuk salinan data statistik. Perhatikan bahwa di dalam data ini tidak ada informasi pribadi yang dapat mengidentifikasi para saksi, korban, ataupun pelaku.

waktu itu pembunuhan mencapai puncaknya yang paling tinggi sejak 1975-79 sedangkan mati karena kelaparan dan sakit jauh lebih sedikit terjadi saat itu dibanding masa 1975-79. Analisis Komisi menunjukkan bahwa selama periode 1975-99, ada kurang lebih 18.600 orang bukan pejuang yang terbunuh. Selanjutnya, diperkirakan ada lebih dari 100.000 orang meninggal di atas jumlah yang akan meninggal pada masa damai, yang disebabkan karena kelaparan dan penyakit.

37. Kedua rangkaian ini—pembunuhan serta kematian karena kelaparan dan sakit—mengikuti pola yang sama: koefisien korelasi antara perkiraan tahunan (dijelaskan di bawah) untuk jumlah pembunuhan dan jumlah kematian karena kelaparan dan sakit adalah 0,81, suatu tingkat yang termasuk amat tinggi untuk kebanyakan penemuan penelitian sosial.^{*} Analisis pola-pola pemindahan menunjukkan bahwa pemindahan mencapai puncak tertinggi pada periode 1975-79. Korelasi yang tinggi antara perkiraan dari jumlah pembunuhan, jumlah kematian karena kelaparan dan sakit, dan jumlah pemindahan menunjukkan bahwa kejadian-kejadian itu berakibat dari kondisi dasar yang sama. Yaitu, ketiga gejala itu kelihatannya mempunyai sebab yang sama. Pola peningkatan yang cepat dalam jumlah pembunuhan, kematian karena kelaparan dan sakit, dan pemindahan pada masa awal pendudukan Indonesia adalah sesuai dengan pernyataan bahwa pendudukanlah yang menyebabkan peningkatan angka kematian.

6.2.2 Tujuan-tujuan analisis

38. Analisis ini dimulai dengan tinjauan data dan metode yang relevan dengan analisis pelanggaran-pelanggaran fatal dan pemindahan. Di sub-bab 6.2.4, disajikan perkiraan jumlah pembunuhan dan kematian karena kelaparan dan sakit. Untuk setiap cara kematian, perkiraan dari RMS dan MSE diperlihatkan dan diperbandingkan. Sub-bab pemindahan mengulas keseluruhan peristiwa pemindahan yang diperkirakan dan jumlah rumah tangga yang dipindahkan menurut lintas waktu dan ruang. Pada sub-bab 6.2.5 disajikan analisis deskriptif kematian yang dilaporkan kepada Komisi dalam HRVD. Analisis menetapkan pola-pola lintas waktu, ruang, kematian kolektif, demografi dan afiliasi politik korban, pertanggungjawaban institusional, dan hubungan antara penahanan dan kematian karena konflik.

6.2.3. Tinjauan data dan metode

39. Perkiraan pola-pola dan besarnya jumlah kematian didasarkan pada tiga sumber data asli yang dikumpulkan oleh Komisi, termasuk:

^{*} Korelasi ini menghubungkan perkiraan jumlah tahunan pembunuhan berdasarkan MSE dengan perkiraan jumlah kematian karena lapar dan sakit dari RMS.

- Basis data pelanggaran hak asasi, Human Rights Violations Database (HRVD), berisi cerita naratif dari 7.669¹ deponen mengenai pelanggaran-pelanggaran yang mereka derita atau mereka saksikan pada periode 1974-99. Naratif ini juga termasuk informasi mengenai kematian karena kekurangan [makanan dan obat-obatan] dan pembunuhan penduduk sipil. Para responden memilih untuk datang sendiri memberikan kesaksian mereka kepada Komisi. Oleh sebab itu, hasil proyek ini mungkin tidak mewakili keseluruhan orang yang terkena pelanggaran hak asasi manusia.
- Survei tingkat kematian berlaku surut, Retrospective Mortality Survey (RMS), merekam ingatan kematian dengan sampel probabilitas dari 1.396 rumah tangga. Di setiap rumah tangga, dua orang dewasa dipilih secara acak. Untuk responden laki-laki, orang tua dan saudara kandung responden tersebut juga dicatat, termasuk apakah mereka itu masih hidup atau sudah mati. Apabila mereka sudah mati, maka tanggal, tempat dan cara kematiannya juga didata. Untuk responden wanita, anak-anak responden itu juga dicatat dengan cara yang sama. Dalam 60% rumah tangga, pada waktu wawancara ini diambil, hanya ada satu jenis kelamin saja yang bisa diwawancarai, dan dengan begitu hanya ada satu responden yang memberikan informasi mengenai orang tua, saudara kandung dan anak-anak.
- Sensus pekuburan umum di Timor-Leste, mendata lebih dari 319.000 batu nisan (disebut GCD).

40. Setiap sumber data hanya mendokumentasikan sebagian kecil dari jumlah keseluruhan kematian di Timor-Leste selama masa 1975-1999. Bahkan pada waktu tidak ada konflik, tidak semua orang mati dikubur di pekuburan umum: Ada orang yang dikuburkan jauh dari lokasi tinggalnya atau ada juga orang yang dikuburkan di pekuburan keluarga. Apabila kondisi kematian amat parah, lebih sedikit orang yang dikuburkan dengan penanda yang resmi. Penanda kubur mutunya jadi merosot terus, sehingga pada waktu diadakan sensus pekuburan pada tahun 2003-2004, banyak batu nisan yang tidak bisa didokumentasikan karena informasi yang tertulis hampir tidak bisa dibaca lagi. Penanda kubur lainnya sama sekali sudah hancur pada periode antara penguburan dan waktu GCD dikumpulkan.

41. RMS memperlihatkan pengalaman yang dilaporkan dalam 1.396 rumah tangga, tetapi mengabaikan pengalaman dari hampir 190.000 rumah tangga yang tidak disampel. HRVD memperlihatkan pengalaman dari 7.668 responden, tetapi kira-kira 940.000 orang Timor-Leste lainnya tidak memberikan kesaksian kepada Komisi. Meskipun begitu, juga apabila HRVD dan RMS mencerminkan pengalaman setiap orang hidup di Timor-Leste, masih banyak orang mati yang belum didokumentasikan karena semua orang yang mungkin masih ingat akan kematian mereka sudah mati juga, atau sudah meninggalkan negeri itu, atau sudah tidak mampu baik secara kejiwaan maupun fisik untuk mengulang cerita tersebut pada waktu diadakannya pendataan. Di desa-desa di mana pembunuhan terjadi sangat banyak, ada kemungkinan tidak satupun saksi yang masih selamat sampai 2002-2003. Keluarga-keluarga lain mungkin telah meninggalkan Timor sama sekali, dengan membawa ingatan sosial merekan mengenai kematian itu. Ada juga keluarga yang memutuskan untuk tetap merahasiakan pengalaman masa lalu mereka, sehingga tidak mungkin untuk mendokumentasikan secara langsung kematian yang pernah menimpa keluarga mereka. Ingatan sosial memang selalu tidak lengkap.

42. RMS menggunakan teknik standar survei rumah tangga yang didasarkan pada kematian yang dilaporkan untuk memperkirakan jumlah keseluruhan pembunuhan, mati karena kelaparan dan sakit, dan mati bertempur. Bagaimanapun juga, jumlah-jumlah keseluruhan ini adalah perkiraan jumlah keseluruhan kematian *yang masih mungkin diingat oleh penduduk Timor-Leste masa kini*, yang merupakan suatu subset dari keseluruhan angka kematian yang sesungguhnya

¹ Commission teams collected a total of 7,824 statements. Some of these (155 statements) were not entered into the HRVD because they either did not mention violations connected to the Commission's mandate, or the violations which they mentioned were not within the Commission's reference period.

terjadi. Perbandingan kematian yang diingat menurut masa kini dengan seluruh jumlah kematian seluruhnya disebut angka cakupan (coverage rate).

43. Metode alternatif untuk pemerkiraan jumlah keseluruhan kematian adalah dengan memakai multiple systems estimation (MSE). Metode ini dipakai untuk mengoreksi sensus dengan memperbandingkan cakupan antara berbagai proyek dokumentasi. Perkiraan MSE mengenai jumlah kematian karena kelaparan dan sakit dan karena pembunuhan disajikan dan diperbandingkan dengan estimasi RMS. Untuk pembunuhan, perkiraan MSE lebih sesuai, sementara untuk perkiraan seluruh jumlah kematian karena kelaparan dan sakit, perkiraan RMS lebih sesuai.*

6.2.4. Perkiraan-perkiraan pembunuhan, kematian karena kelaparan dan sakit, dan pemindahan

Pembunuhan

44. Jumlah keseluruhan tahunan pembunuhan dapat diperkirakan dari RMS, dan hasilnya diperlihatkan di bawah ini pada Bagan <gkillM.pdf>. Bagan ini mengikuti tingkatan yang relatif tinggi untuk pembunuhan pada periode 1975-79, di samping peningkatan-peningkatan pada awal tahun 1980an dan sebuah puncak lagi pada 1999. Keseluruhan pembunuhan yang diperkiraan melalui RMS adalah 16.000, dengan ambang kesalahan +/- 4.400. Perkiraan RMS untuk pembunuhan didasarkan hanya pada 235 pembunuhan yang dilaporkan. Akibatnya, kesalahannya cukup besar, seperti terlihat pada banyaknya tahun-tahun di mana pita-pita kesalahan (error bands) menyentuh angka nol (zero). Untuk tahun-tahun ini, hipotesis bahwa jumlah kematian yang diperkiraan adalah nol tidak dapat ditolak. Selanjutnya, pita kesalahan itu cukup lebar sehingga memungkinkan banyak pola tafsiran yang lain.

[masukkan <gkillM.pdf> di sini]

45. Seperti dengan kematian karena kelaparan dan sakit, maka juga dimungkinkan untuk memperkirakan jumlah keseluruhan tahunan pembunuhan dengan menggunakan multiple systems estimation (MSE). Untuk pembunuhan, kesaksian-kesaksian CAVR (disebut HRVD) mendokumentasikan hampir sepertiga dari keseluruhan pembunuhan yang diperkiraan, sedangkan seperti disebutkan di atas, hanya ada 235 pembunuhan yang didokumentasikan melalui RMS. Maka dari itu, MSE untuk pembunuhan menggabungkan data GCD dan HRVD. Hasilnya diperlihatkan pada Bagan {gkill_mse2_hrvdgcd_M.pdf}. MSE memperkirakan keseluruhannya ada 18.600 pembunuhan (+/- 1.000). Sumbu vertikal memperlihatkan maksimum dari kesalahan (3.260) dan nilai perkiraan maksimum (2.634), keduanya muncul pada tahun 1999. Pola lintas waktu kelihatan lebih jelas di MSE daripada di dalam perkiraan survei RMS: jumlah keseluruhan pembunuhan yang diperkiraan meningkat dari hampir nol (tidak ada pembunuhan) pada periode pra-invasi, lalu naik memuncak dua kali yaitu pada tahun 1975 dan 1979. Sesudah itu pembunuhan merosot dan juga pada tahun 1980an dan 1990an. Garis memuncak pada tahun 1999 menandakan titik tertinggi untuk pembunuhan yang diperkiraan, jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya.

[Masukkan Bagan <gkill_mse2_hrvdgcd_M.pdf> di sini]

46. Perkiraan pembunuhan mengalami suatu kekosongan yang penting dalam data: tahun 1991 seharusnya mempunyai puncak kecil yang menunjukkan pembantaian di Santa Cruz, tetapi tidak cukup laporan yang diterima mengenai peristiwa tersebut sehingga perkiraan pembunuhan

* MSE dipakai dimana-mana untuk memperkirakan penaksiran rendah (under-reporting) dalam hal sensus kependudukan. [Untuk contohnya, lihat J G Robinson, B Ahmed, P Das Gupta dan K Woodrow, "Estimation of Population Coverage in the 1990 United States Census Based on Demographic Analysis", *Journal of the American Statistical Association*, 88 (423), 1992, hal. 1061-1071].

di tahun itu tidak bisa tepat. Perkiraan untuk tahun 1991 sebenarnya sedikit lebih rendah dari perkiraan untuk tahun 1990. Hal ini menggambarkan masalah yang dihadapi pada semua koleksi data berskala besar: pembunuhan relatif merupakan peristiwa yang jarang terjadi di keseluruhan penduduk, sehingga sampel probabilitas tidaklah mungkin merangkum kejadian spesifik (misalnya, tidak adanya laporan mengenai Santa Cruz dalam RMS). Pada laporan kualitatif seperti HRVD, sumber-sumber investigasi harus dikhususkan untuk peristiwa-peristiwa spesifik, kalau tidak maka tidak ada jaminan peristiwa-peristiwa itu terdokumentasikan. Meskipun HRVD menerima lebih dari 20 kematian yang dilaporkan untuk peristiwa ini, hal ini hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhannya. Peristiwa-peristiwa yang lebih kecil dapat tercakup dengan lebih baik, sehingga perkiraan lintas waktu tidak mencerminkan secara teliti pentingnya tahun 1991 ini.*

47. Tidak seperti untuk kematian karena kelaparan dan sakit, pembunuhan sepertinya tidaklah mungkin ditaksir jauh terlalu rendah. Pertama, pembunuhan lebih jarang menimpa keseluruhan keluarga dibandingkan dengan kematian karena kelaparan dan sakit, sehingga lebih ada kemungkinan anggota keluarga yang selamat yang bisa melaporkan kejadian ini. Kedua, perbandingan antara pembunuhan yang didokumentasikan dengan seluruh pembunuhan yang diperkirakan (angka cakupan) adalah 0,637. Angka itu lebih tinggi dari perbandingan antara kematian karena kelaparan dan sakit yang didokumentasikan dengan kematian karena kelaparan dan sakit yang diperkirakan (0,513). Angka cakupan yang tinggi untuk pembunuhan berarti bahwa MSE sendiri sebenarnya dapat lebih baik mengoreksi pembunuhan yang tidak dilaporkan dibandingkan dengan karena kelaparan dan sakit yang tidak dilaporkan. Selanjutnya, pembunuhan biasanya relatif jarang terjadi, dan oleh sebab itu tidaklah mungkin menggunakan analisis spekulatif yang menggunakan data sensus untuk menentukan angka pembunuhan, seperti yang sering dilakukan untuk menentukan angka kematian karena kelaparan dan sakit. Atas dasar ini, kami menemukan bahwa telah terjadi kurang lebih 18.600 pembunuhan, dengan ambang kesalahan +/- 1000.

Kematian karena kelaparan dan sakit

48. Analisis jumlah keseluruhan kematian karena kelaparan dan sakit dimulai dengan analisis jumlah total kematian yang diperkirakan berdasarkan RMS, dan hasilnya disajikan di bawah pada Bagan (gdeprM.pdf).[†] Kematian yang diperkirakan disajikan bersamaan dengan jumlah kematian yang diproyeksikan dari angka kematian karena kelaparan dan sakit tahun 1972-74 (dijelaskan di bawah). Jumlah kematian yang dikaitkan responden dengan “kelaparan atau penyakit” meningkat ke tingkat yang paling tinggi selama masa pasca-invasi, 1975-1980. Pada periode 1983-98 jumlah total yang diperkirakan berubah-ubah sekitar nilai pukul-rata yang diperkirakan sebesar 3.632 kematian tahunan. Jumlah total tahunan lambat laun meningkat selama dasawarsa 1990an, dan mencapai puncak terakhirnya pada tahun 1999.[‡]

49. Jumlah total kematian yang diperkirakan karena kelaparan dan sakit di 1975-99 adalah kira-kira 143.700, dengan ambang kesalahan kira-kira +/- 11.000.[§] Sebagian dari kasus kematian ini adalah kematian normal, dalam arti hal itu juga akan terjadi bila tidak ada konflik atau bahaya

* Ingat bahwa ambang kesalahan berupa “lubang kosong” dalam data seperti ini. Hal itu maksudnya adalah bahwa kegiatan sampling itu memang hanya mencakup informasi sejumlah kecil dari keseluruhan peristiwa yang ada. Beberapa peristiwa besar mungkin jadi tidak tertera (seperti pembantaian di Santa Cruz). Tingkat kesalahan yang dihitung untuk perkiraan keseluruhan jumlah peristiwa dirancang untuk mencerminkan ketidakpastian jumlah keseluruhan yang diperkirakan, termasuk juga kenyataan bahwa peristiwa penting mungkin tidak dicatat.

[†] Data tersebut tidak mencukupi untuk perkiraan sistem-tiga tentang kematian karena lapar dan sakit.

[‡] Seperti yang telah dibahas dalam sub-bab mengenai metodologi, kenaikan lamban kematian karena kelaparan dan sakit yang diperkirakan mulai dari awal tahun 1980an sampai akhir 1990an adalah merupakan akibat kenaikan jumlah penduduk, dan juga karena berkurangnya jumlah kematian yang tidak dapat diingat lagi berhubung tidak adanya anggota keluarga lagi yang masih selamat sampai tahun 2004 ketika survei dilakukan.

[§] Jumlah total ambang kesalahan dihitung dengan menghitung akar jumlah kuadrat dari jumlah perbedaan-perbedaan (variances) estimasi tahunan dan dikalikan dengan angka konvensional 1,96 untuk mendapatkan selang kepercayaan 95%.

kelaparan. Untuk suatu taksiran kematian yang bisa dikaitkan dengan konflik, kita harus menetapkan lebih dahulu berapa banyak kematian yang mungkin terjadi yang disebabkan oleh kelaparan dan penyakit pada saat tidak ada konflik.

50. Tahun-tahun masa pra-pendudukan 1972-74 merupakan masa damai di mana jumlah kasus kematian karena kelaparan dan sakit dapat dianggap wajar. Pertama, untuk menghitung jumlah dasar penduduk, estimasi-estimasi penduduk untuk 1971-2003 diinterpolasikan antara jumlah total yang dilaporkan dalam sensus Portugis tahun 1970 (609.477) dan jumlah total dari sensus 2004 (924.642). Dari RMS, jumlah kematian karena kelaparan dan sakit tahun 1972-74 yang diperkirakan ada kurang lebih 1.686-2.252. Angka kematian setiap tahunnya dihitung dengan cara membagi jumlah penduduk yang diproyeksikan tiap tahunnya dengan jumlah kematian tahun itu yang diperkirakan dari RMS. Dengan cara begitu, rata-rata angka kematian tahunan karena kelaparan dan sakit 1972-74 dapat dihitung.

51. Perkiraan angka kematian (3,1 kematian per 1.000 orang) diterapkan kepada penduduk yang diproyeksikan setiap tahunnya sampai dengan 2003.^{*} Perkiraan angka-angka kematian ini membentuk jumlah dasar (baseline) yang diperlihatkan pada Bagan (gdeprM.pdf). Pengurangan perkiraan tahunan RMS dengan proyeksi jumlah kematian wajar pada masa damai menghasilkan adanya kelebihan sebanyak 84.200 kematian karena kelaparan dan sakit (+/- 11.000).[†] Jumlah kematian ini merupakan perkiraan berdasarkan RMS dari kematian yang melampaui jumlah total yang memang dapat diduga apabila angka kematian karena lapar dan sakit terus berlangsung seperti pada masa damai sebelum invasi.

[Masukkan Bagan <gdeprM.pdf> di sini]

52. Metode alternatif untuk mendapatkan perkiraan jumlah total untuk kelebihan kematian adalah menghitung suatu MSE sistem-dua dengan menggunakan RMS dan GCD. Hal ini harus dilakukan dengan hati-hati, untuk dua alasan berikut. Pertama, jumlah kematian karena kelaparan dan sakit yang dilaporkan dalam RMS pada tahun 1974-99 (2.231) adalah kecil kalau dibandingkan dengan jumlah total perkiraan untuk kematian karena kelaparan dan sakit berdasarkan RMS (143.700). Kedua, perkiraan sistem-dua dapat menyimpang oleh karena korelasi yang tidak terkontrol antara sistem-sistem tersebut.[‡] Misal saja, jika orang yang mati itu cenderung tidak dikubur di pekuburan umum dan juga cenderung tidak diingat lagi oleh para responden survei, maka sistem dua akan menghasilkan korelasi positif. Ingat bahwa korelasi ini banyak terjadi pada tahun-tahun langsung setelah invasi, ketika banyak orang hidup dalam kondisi yang serba sulit, pertama-tama karena mereka harus selalu berpindah-pindah dan kemudian juga karena ditahan di kamp-kamp pemukiman. Kedua kondisi ini lebih mengarah ke bencana kematian besar-besaran dari keseluruhan kelompok dan juga ke situasi di mana hanya sedikit orang bisa terkubur di pekuburan umum dengan penanda kubur yang permanen. Korelasi positif antara GCD dan RMS pada tahun-tahun yang menyolok itu kemungkinan besar dapat sangat membiaskan estimasi sistem-dua ke arah menurun.

^{*} Angka dasar ini (3,1 kematian per 1.000 orang) termasuk rendah: angka rata-rata wilayah di Asia Tenggara pada awal tahun 1970an adalah 12-14 per 1.000. Lampiran metodologi menyebut bagaimana penaksiran lebih rendah ini bisa disesuaikan dengan menggunakan perkiraan berbasis sensus dari angka kematian mentah (crude death rate - CDR). Bagaimanapun juga, penambahan dengan pengukuran berbasis sensus meminta banyak asumsi mengenai kualitas perkiraan CDR. Penemuan-penemuan inti yang disajikan di sini hanya didasarkan pada estimasi-estimasi sensus tahun 1970 dan 2004 dan data yang dikumpulkan oleh Komisi.

[†] Ambang kesalahan jumlah kelebihan kematian dihitung dengan cara yang sama dengan ambang kesalahan jumlah total, termasuk kesalahan standar tahun-tahun yang mewakili jumlah kelebihan total.

[‡] Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, data itu tidak mencukupi model sistem-tiga kematian karena kelaparan dan sakit. Ada 5.101 kematian karena kelaparan dan sakit yang dilaporkan dalam HRVD, kira-kira dua kali lebih banyak daripada dalam RMS; namun begitu, jumlah itu adalah sebagian kecil dari jumlah total yang dapat diduga untuk kematian karena kelaparan dan sakit. RMS lebih disukai untuk dipakai daripada HRVD karena RMS dikumpulkan menurut sampel probabilitas. HRVD adalah sampel kemudahan, sehingga memakai HRVD bisa menimbulkan asumsi bahwa semua kematian setiap tahunnya mempunyai probabilitas yang sama untuk didokumentasikan. Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat lampiran metodologi mengenai bagaimana MSE dihitung.

53. Perkiraan MSE ini diperlihatkan pada Bagan <gdepr_mse2_rmsgcd_M.pdf>. Jumlah total kematian karena kelaparan dan sakit yang diperkirakan dalam tahun 1975-99 adalah kira-kira 123.500 (+/- 5.200).^{*} Kelebihan kematian yang diperkirakan di atas jumlah dasar pada masa damai adalah 75.000 (+/-5.200). Perkiraan MSE ini lebih rendah dari perkiraan berdasarkan survei RMS, hal ini sesuai dengan hipotesis bahwa ada korelasi positif antara RMS dan GCD. Jumlah pukul-rata (median) kematian karena kelaparan dan sakit pada tahun-tahun “normal” pendudukan, 1983-98, seperti yang diperkirakan melalui MSE (3.727) adalah sama dengan nilai yang ditemukan survei (3.632). Maksudnya yaitu, perkiraan survei RMS dan perkiraan MSE untuk tahun-tahun “normal” pendudukan adalah sama, tetapi RMS menghasilkan perkiraan yang lebih tinggi untuk tahun-tahun yang luar biasa. Kelihatannya pada tahun-tahun normal ada lebih sedikit kematian yang terjadi dalam peristiwa-peristiwa bencana yang menghapuskan keseluruhan keluarga (yang menyebabkan survei mempunyai pelaporan yang lebih rendah), dan secara relatif juga lebih sedikit orang mati yang dikuburkan di luar pekuburan umum. Akibatnya, selama tahun-tahun normal, MSE dan survei RMS menghasilkan perkiraan yang sama. Selama tahun-tahun luar biasa, dua-dua metode menaksir terlalu rendah (underestimate) jumlah total kematian karena kelaparan dan sakit, tetapi penaksiran rendah MSE menjadi lebih serious karena hanya sebagian kecil dari seluruh orang mati selama tahun-tahun luar biasa telah dikuburkan di pekuburan umum.

[Masukkan Bagan <gdepr_mse2_rmsgcd_M.pdf> di sini]

54. Pola yang diperlihatkan dalam Bagan {gdepr_2mse_rmsgcd.pdf} adalah mirip dengan perkiraan RMS, tetapi jumlahnya lebih rendah: ingat bahwa nilai maksimum yang diperkirakan pada Bagan {gdepr_2mse_rmsgcd.pdf} adalah 11.444 sedangkan dalam perkiraan RMS nilai itu adalah 13.496. Ada satu perbedaan dalam pola-pola lintas waktu: Jumlah-jumlah total yang diperkirakan MSE untuk 1975 lebih rendah daripada perkiraan-perkiraan untuk tahun 1978 dan 1979, sebaliknya di dalam survei RMS perkiraan-perkiraan untuk ketiga tahun tersebut hampir sama. Dalam perkiraan RMS, pita kesalahan (error bands) untuk ketiga tahun tersebut adalah besar kalau dibandingkan dengan perbedaan di antara tahun-tahun itu, dan oleh sebab itu, tidaklah bisa ditolak hipotesis bahwa jumlah total sebenarnya pada tahun-tahun itu adalah sama.

55. Perkiraan MSE menunjukkan bahwa kematian di tahun 1975 lebih sedikit daripada yang bisa dinyatakan dalam perkiraan RMS. Kecuali perbedaan ini, perkiraan-perkiraan MSE dan RMS adalah mirip dalam hal besarnya dan pola. Perlu ditegaskan bahwa kedua perkiraan ini mempunyai metodologi yang sangat berlainan: Penghitungan ukuran besarnya dalam RMS banyak mengandalkan bobot-bobot di dalam survei, sementara kebanyakan data dalam MSE berasal dari batu nisan yang memiliki tanggal dalam setiap tahunnya dan dari penyesuaian korban mati yang diidentifikasi melalui RMS terhadap nama, tanggal dan lokasi kubur tersebut.

56. Kalau kita menggabungkan hasil dari kedua perkiraan ini, maka -kalau dihitung secara hati-hati dan sangat konservatif- jumlah kematian yang disebabkan karena kelaparan dan penyakit mencapai antara 75.000 dan 86.500 kasus di atas jumlah kematian yang biasa terjadi pada masa damai. Perkiraan-perkiraan ini hanya dihitung berdasarkan sensus 1970 dan 2004 dan data-data dari Komisi. Perkiraan ini bisa dikatakan sebagai perkiraan jumlah total kematian karena kelaparan dan sakit *yang masih mungkin diingat pada tahun 2004*. Hal ini merupakan pembatasan penting dalam penghitungan. Baik perkiraan RMS maupun perkiraan MSE sangat konservatif karena banyak kasus kematian *tidak* bisa diingat lagi pada tahun 2004. Sebagian kasus kematian tidak meninggalkan sisa anggota keluarga lagi yang dapat melaporkan kasus kematian itu pada tahun 2004, dan sebagian orang yang meninggal pada tahun-tahun sangat luar biasa tersebut tidaklah dikuburkan di pekuburan umum. Maka tahun-tahun di mana survei kelihatannya menghadapi masalah kasus-kasus hilangnya seluruh anggota keluarga, juga

^{*} Untuk MSE, hanya korban mati bernama yang dilaporkan dalam RMS yang dimasukkan. Bobot sampling RMS tidak dipakai. GCD tidak memasukkan cara kematian, oleh sebab itu data dari GCD dialokasikan seperti yang disebutkan dalam lampiran metodologi.

merupakan tahun-tahun di mana orang hampir tidak bisa dikuburkan di pekuburan umum. Korelasi positif antara data GCD dan RMS data menciptakan penaksiran lebih rendah (underestimation) dalam MSE.

57. Lampiran metodologi menyajikan sebuah model yang dapat menyesuaikan perkiraan RMS dan MSE untuk mengoreksi hilangnya pengetahuan mengenai kematian setelah beberapa waktu. Model ini memakai informasi sensus tambahan, termasuk angka kematian kasar (crude death rates) yang diperkirakan oleh pemerintah AS dan Indonesia. Apabila asumsi dalam pokok dasar data dan dalam model-model itu benar, maka jumlah total kematian karena kelaparan dan sakit bisa mencapai 103.000 di atas jumlah kasus yang biasa terjadi pada masa damai, dengan suatu kemungkinan (walaupun kecil) perkiraan yang paling tinggi, yaitu 183.300. Meskipun ada ketidakpastian dalam model ini, Komisi menyimpulkan bahwa selama periode 1975-99, orang yang mati karena kelaparan dan sakit minimal ada 100.000 di atas jumlah kasus kematian yang biasa terjadi pada masa damai.

Pemindahan

58. Penemuan-penemuan kunci dari analisis pemindahan diuraikan di bawah:

- Pemandahan terjadi secara luas: 55,5% rumah tangga yang disurvei melaporkan satu atau lebih peristiwa pemindahan, dengan jumlah total 2.011 peristiwa pemindahan yang dilaporkan antara 1974 dan 1999.^{*}
- Apabila diproyeksikan pada penduduk seluruhnya, survei menghasilkan 108.200 rumah tangga yang dipindahkan,[†] yang mengalami 282.800 peristiwa pemindahan[‡].
- Sebagian besar pemindahan terjadi secara lokal. Dari keseluruhan peristiwa pemindahan, 54,3% terjadi di satu kecamatan, 15,6% terjadi di kabupaten, 17,4% terjadi di wilayah, 9,3% terjadi di Timor-Leste, dan 2,4% terjadi di luar Timor-Leste.[§] Bagaimanapun juga, pada tahun 1999, pemindahan yang memindahkan rumah tangga ke luar dari Timor-Leste naik mencapai 9,3% (+/-6,1%) dari seluruh pemindahan pada tahun itu.
- Banyak pemindahan terjadi berturut-turut dalam waktu yang cepat: 22,2% dari peristiwa pemindahan berlangsung dalam waktu satu bulan atau kurang, dan 50,1% berlangsung dalam waktu satu tahun atau kurang. Akan tetapi, pemindahan lainnya ada dalam waktu yang panjang, sehingga rata-rata periode pemindahan adalah 46,7 bulan.^{**} Puluhan ribu rumah tangga mengatakan mereka dipindah-pindahkan dari masa pasca invasi tahun 1975q4 (kwartal ke-4 tahun 1975) terus-menerus sampai tahun 1999q4 (kwartal ke-4 1999) (lihat Bagan g101M.pdf untuk analisis lebih lanjut).
- Badan yang dilaporkan penduduk sebagai kelompok yang paling sering menyuruh mereka pindah adalah Militer Indonesia (46,4%), diikuti oleh Fretilin/ Falintil (15,0%) dan kelompok milisi (8,8%).^{††} Responden melaporkan bahwa “konflik” merupakan motivasi dari 52,3% keseluruhan pemindahan mereka, dengan tambahan 16,3%. “dipaksa oleh Militer Indonesia”.
- Sebagian besar pemindahan terjadi antara tahun 1975-80. Tahun maksimumnya adalah tahun 1975 dan 1976, dengan 61.400 (+/- 13.300) dan 59.800 (+/- 7.200) peristiwa pemindahan secara beruntun. Jumlah peristiwa pemindahan pada tahun 1999 jauh lebih sedikit yaitu kira-kira 28.100 (+/- 5.600) peristiwa.

[Masukkan Bagan <g01CM.pdf> di sini]

59. Bagan <g01CM.pdf> memperlihatkan jumlah peristiwa pemindahan menurut tahunnya pada tiga daerah di Timor-Leste, dan juga jumlah total peristiwa pemindahan yang dilaporkan kepada Komisi dalam kesaksian kualitatif. Sumbu vertikal memperlihatkan nilai maksimum (pada titik puncak pita kesalahan) untuk tiap daerah. Bagan <g101M.pdf> memperlihatkan tahun 1975 dan 1976 sebagai puncak tahun terjadinya pemindahan-pemindahan, dengan 1977-1979 dan 1999 pada tingkat yang lebih rendah dan kurang lebih sama semua. Komisi mencatat bahwa 1975 dan 1976 secara statistik tidak bisa saling dibedakan dalam perkiraan regionalnya; Dalam bahasa formalnya, adalah tidak mungkin untuk sepenuhnya menolak hipotesis bahwa tahun-tahun ini mempunyai jumlah peristiwa pemindahan yang sepadan. Wilayah Barat dan Tengah memperlihatkan penurunan dari puncak-puncak pada tahun 1975-76 ke tingkatan yang lebih rendah pada 1979; penurunannya adalah ke arah nol (zero). Sebaliknya, wilayah Timur memperlihatkan pada tahun 1979 tingkat pemindahannya hampir sama dengan intensitas pemindahan pada waktu memasuki masa pasca invasi.

^{*} Menurut sensus 1990, ada kurang lebih 4,5 orang per rumah tangga pada tahun itu. Bagan memperlihatkan kenaikan sampai 4,75 orang per rumah tangga (924.642/194.943) pada sensus tahun 2004. Selang kepercayaannya adalah 51,8%-59,2% rumah tangga.

[†] Selang kepercayaannya adalah 101.013-115.412 rumah tangga.

[‡] Selang kepercayaannya adalah 251.631-313.990 peristiwa.

[§] Ambang kesalahannya adalah +/- 10,4% untuk pemindahan di dalam kecamatan, dan 4,6% atau kurang perkiraan lainnya. Penemuan ini mungkin dibatasi oleh pembatasan karena orang-orang yang berada di kamp pengungsian di Timor Barat tidak turut diwawancarai.

^{**} Selang kepercayaannya adalah 41-52 bulan.

^{††} Ambang kesalahan adalah +/- 4,2%.

60. Cara lain untuk memandang kasus pemindahan adalah dengan menetapkan berapa banyak rumah tangga yang dipindahkan pada setiap periode. Bagan <g01CM> memperlihatkan ada berapa rumah tangga yang dipaksa pindah setiap tahunnya. Bagan g101M memperlihatkan ada berapa rumah tangga yang dipaksa tinggal di suatu tempat yang tidak mereka anggap sebagai rumah mereka pada setiap tahunnya. Bagan {g01CM.pdf} memperlihatkan ada berapa “peristiwa pemindahan” yang diderita setiap periodenya, sementara Bagan {g101M.pdf} memperlihatkan ada berapa rumah tangga dalam status “pemindahan” dalam setiap periode. Sumbu vertikal memperlihatkan nilai maksimum pada puncak pita kesalahan dan nilai median dari kuartal ketiga tahun 1980 (1980q3) sampai ke kuartal kedua tahun 1999 (1999q2).

[Masukkan <Figure g101M.pdf> di sini]

61. Penduduk dipindah-pindahkan pada akhir 1975 dan awal 1976, dan mereka tidak bisa pulang ke rumah mereka untuk waktu yang lama. Pemindahan-pemindahan lainnya terus berlangsung di tahun 1977, dan lebih banyak lagi di tahun 1978, dan orang-orang yang lebih dahulu diungsikan masih tetap tidak bisa pulang ke rumah mereka. Sampai tahun 1979 belum banyak jumlah rumah tangga yang ditempatkan di suatu tempat, di mana mereka menganggap tempat itu sebagai “rumah” mereka. Dalam tiap tahun antara 1980 sampai 1999, kira-kira 39.000 rumah tangga tetap menganggap diri mereka dipindahkan. Sejumlah 15.000 rumah tangga lagi dipindahkan pada kuartal ketiga tahun 1999. Akan tetapi, pada kuartal keempat, ada lebih dari 32.500 rumah tangga yang pulang ke rumah mereka, dan jumlah rumah tangga yang diperkirakan tetap dipindahkan merosot sampai ke kurang lebih 20.400, kemudian turun lagi ke 11.700 pada kuartal pertama tahun 2000, dan ke 9.600 pada kuartal kedua tahun 2000.

6.2.5 Analisis statistik deskriptif mengenai pelanggaran fatal yang dilaporkan pada Komisi

62. Bagian ini menjelaskan pola pembunuhan dan penghilangan yang dilaporkan kepada Komisi dalam pernyataan naratif (HRVD). Ukuran dan pola yang dibebankan di sini tidak mewakili ukuran jumlah total dan keseluruhan pola pembunuhan dan penghilangan. Bagian ini lebih mengemukakan analisis mengenai pola dan kecenderungan pembunuhan dan penghilangan yang telah diketahui melalui pernyataan-pernyataan kualitatif Komisi.*

Pola lintas waktu pembunuhan dan penghilangan dari para non-pejuang yang dilaporkan

63. Pola pembunuhan dan penghilangan banyak bervariasi dalam lintas waktu. Seperti yang dapat dilihat pada Bagan <g122Mhrvd100.pdf>, 67,4% (3.451/5.120) dari pembunuhan yang dilaporkan terpusat pada periode 1975-81. 16,4% (838/5.120) dari pembunuhan yang dilaporkan terjadi pada tahun 1999 sebelum, selama dan sesudah Jajak Pendapat yang dikelola oleh PBB. Jumlah tertinggi pembunuhan yang dilaporkan kepada Komisi adalah pada masa invasi militer Indonesia dan pada tahun-tahun awal pendudukan. Meski tahun yang menunjukkan jumlah pembunuhan tertinggi terhadap para non-pejuang yang dilaporkan adalah tahun 1975, sifat terbuka dari proses pengambilan pernyataan itu sedemikian rupa sehingga ada banyak sekali ketidaktepatan tanggal ditemukan dalam pernyataan yang melaporkan pembunuhan pada pertengahan dan akhir 1970an.[†] Oleh sebab itu ada kemungkinan sebagian pembunuhan terhadap non-pejuang yang dilaporkan terjadi pada tahun 1975 bisa saja sebenarnya terjadi pada tahun 1976 atau 1977.

[Masukkan Bagan <g122Mhrvd100.pdf> di sini]

* Lihat bagian di bawah untuk pembahasan yang rinci mengenai sifat dan pembatasan data yang diumpulkan melalui proses pengambilan pernyataan oleh Komisi.

[†] Lihat Lampiran Metode Statistik untuk keterangan yang lebih terinci mengenai ketidaktepatan tanggal dalam proses pengambilan pernyataan.

64. Jumlah orang hilang yang dilaporkan kepada Komisi jauh lebih rendah dari pembunuhan terhadap para non-pejuang yang dilaporkan: ada 5.120 pembunuhan para non-pejuang yang dilaporkan kepada Komisi, tetapi hanya ada 835 penghilangan yang dilaporkan kepada Komisi. Selanjutnya, pola penghilangan yang dilaporkan sangat berbeda dari pembunuhan terhadap para non-pejuang, seperti yang dapat dilihat pada Bagan <g122Mhrvd500.pdf>. Ternyata, sejumlah besar pembunuhan para non-pejuang banyak sekali terjadi pada masa-masa awal tahun invasi, sementara sejumlah besar penghilangan terutama terjadi menjelang akhir dari masa-masa awal invasi pada tahun 1979 dan tahun 1983-84, tidak lama sebelum dimulainya periode “normalisasi dan konsolidasi” dari pendudukan Indonesia: 40,0% (332/835) dari orang hilang yang dilaporkan kepada Komisi terjadi pada tahun 1979, 1983 ataupun 1984. Pola mengenai penghilangan dan pembunuhan para non-pejuang yang dilaporkan adalah sesuai dengan hipotesis bahwa kedua gejala pelanggaran itu digerakkan oleh kebijakan atau perbuatan yang berbeda dari mereka yang bertanggungjawab atas perbuatan tersebut. Khususnya, penghilangan digunakan dengan cara yang lebih bersasaran sebagai alat militer Indonesia untuk menumpas Perlawanan.

[Masukkan Bagan <g122Mhrvd500.pdf> di sini]

65. 20,9% (1.070/5.120) pembunuhan yang didokumentasikan dari proses pengambilan pernyataan Komisi terjadi pada tahun 1975. Seperti terlihat pada Tabel <tkill1975bymonth.rtf>, dari seluruh pembunuhan pada 1975 yang didokumentasikan, 26,5% (283/1.070) tidak mempunyai informasi mengenai bulan di mana pembunuhan itu terjadi. Akan tetapi, 19,5% (348/1.070) dari pembunuhan ini terjadi pada waktu konflik internal antar-partai dan pada waktu serangan lintas batas Indonesia yang pertama kali, sementara 32,7% (350/1.070) terjadi di bulan Desember pada waktu diadakannya invasi besar-besaran militer Indonesia di Timor-Leste.

[Masukkan Bagan <tkill1975bymonth.rtf> di sini]

66. Sangatlah menarik bahwa hanya 3,8% (41/1.070) dari pembunuhan yang didokumentasikan pada tahun 1975 terjadi pada bulan Oktober dan November. Jadi, data dari proses pengambilan pernyataan Komisi sesuai dengan hipotesis bahwa pembunuhan dalam skala besar terjadi pada waktu konflik internal antar-partai pada bulan Agustus dan September, kemudian ada masa yang relatif tenang dalam hal pembunuhan, hingga kemudian terjadi lagi pembunuhan berskala besar pada bulan Desember pada masa invasi militer Indonesia ke Timor-Leste.

Pola lintas ruang pembunuhan dan penghilangan dari para non-pejuang yang dilaporkan

67. Data yang didasarkan pada sampel non-acak (seperti data ini) tidak bisa dipakai untuk mengkaji secara langsung perbedaan ukuran besarnya pelanggaran antara wilayah dan distrik. Data yang seperti itu hanya dapat mewakili cakupan total pelanggaran dari wilayah ke wilayah sejauh para deponen yang memberi pernyataannya mewakili penduduk lokal mereka dan dipilih sesuai dengan proporsi kekerasan yang terjadi di masing-masing distrik.

68. Bagan <gVtypeDisthrvd100500.pdf> memperlihatkan jumlah pembunuhan dan penghilangan yang dilaporkan menurut distrik di mana kekerasan itu terjadi, sebagaimana yang dilaporkan dalam proses pengambilan pernyataan Komisi. Ermera mempunyai lebih banyak pembunuhan yang dilaporkan daripada distrik lainnya, berkisar 18% (920/5120) dari keseluruhan pembunuhan yang dilaporkan. Secara relatif hanya sedikit pembunuhan para non-pejuang di Indonesia, Dili dan Liquiça yang dilaporkan kepada Komisi.

[Masukkan Bagan <gVtypeDisthrvd100500.pdf> di sini]

69. Bagan <gpTS_regional500.pdf> memperlihatkan bahwa kasus penghilangan yang dilaporkan terutama terpusatkan di distrik-distrik Timur dan Tengah: Khususnya untuk

penghilangan yang dilaporkan kepada Komisi , 20,2% (169/835) terjadi di Baucau, 14,7% (123/835) di Viqueque, 13,9% (116/835) di Dili dan 11,4% (95/835) di Lautém.

[Masukkan Bagan <gpTS_regional500.pdf> di sini]

Pola lintas waktu dan lintas ruang pembunuhan dan penghilangan dari para non-pejuang yang dilaporkan

70. Seperti yang diperlihatkan pada Bagan <gpTS_regional100.pdf>, pembunuhan yang dilaporkan mulai terjadi di Wilayah Barat dan Tengah pada waktu awal invasi pasukan Indonesia. Kemudian antara tahun 1978 dan 1981, pembunuhan terhadap para non-pejuang terjadi di Wilayah Timur dan Tengah, dan hanya ada sedikit pembunuhan terhadap para non-pejuang yang dilaporkan yang terjadi di Wilayah Barat. Pada tahun 1999 72,3% dari pembunuhan terhadap para non-pejuang yang dilaporkan terjadi di Wilayah Barat. Data pernyataan naratif Komisi sesuai dengan hipotesis bahwa, antara tahun 1975 dan 1984, pembunuhan besar-besaran para non-pejuang mengikuti gerakan-gerakan lintas waktu dan lintas ruang dari serbuan militer Indonesia.

[Masukkan Bagan <gpTS_regional100.pdf>]

71. Pola penghilangan lintas waktu dan lintas ruang yang dilaporkan terlihat jelas berbeda dengan pola pembunuhan non-pejuang, seperti yang dapat dilihat pada Bagan <gpTS_regional500.pdf>. Meskipun beberapa kasus orang hilang dilaporkan sekitar waktu invasi Indonesia dan kemudian juga pada tahun 1999, kasus penghilangan –lain halnya dengan kasus pembunuhan para non-pejuang- tidak diasosiasikan dengan munculnya operasi militer besar-besaran. Lebih tepatnya lagi, dua periode penghilangan besar-besaran dilaporkan: periode pertama terjadi pada tahun 1978 sampai tahun 1980, setelah serangan utama militer terhadap gerakan Perlawanan selesai, dan periode kedua dari tahun 1983 sampai tahun 1984 setelah adanya perpecahan dalam gencatan senjata antara pasukan Indonesia dan Falintil. Pada waktu periode pertama penghilangan besar-besaran, 60,2% (198/329) dari kasus orang hilang yang dilaporkan terpusatkan di Wilayah Timur, dan 25,9% (95/329) terjadi di Wilayah Tengah dan 10,0% (33/329) di wilayah Barat dan Indonesia. Pada waktu periode kedua penghilangan besar-besaran, yang terjadi antara tahun 1983 dan 1984, 72,0% (126/175) terjadi di Wilayah Timur, 13,1% (23/175) di Wilayah Tengah dan 13,1% (23/175) di Indonesia dan di Wilayah Barat. Data tentang kasus penghilangan ini sesuai dengan hipotesis bahwa kasus penghilangan terutama digunakan di distrik-distrik Timur sebagai alat operasi balasan terhadap orang-orang yang dicurigai menjadi anggota atau yang diasosiasikan dengan kelompok Gerakan Perlawanan.

[Masukkan Bagan <gpTS_regional500.pdf>]

Pola pembunuhan dan penghilangan dari para non-pejuang yang dilaporkan menurut pertanggungjawaban institusional yang terkait

72. Sejumlah lembaga yang berbeda-beda terlibat dalam tindakan pembunuhan dan penghilangan selama masa terjadinya konflik. Kelompok lembaga utama adalah militer Indonesia, Falintil, Partai Politik Timor-Leste (seperti Fretilin, UDT dan Apodeti), anggota-anggota pasukan pertahanan Timor-Timur (di bawah pemerintahan Indonesia) (seperti Hansip, Wanra dan Ratih), milisi-milisi dan pasukan pembantunya lainnya (di bawah pemerintahan Indonesia.) Bagian ini mengulas tingkatan pertanggungjawaban terhadap pembunuhan dan penghilangan yang dilaporkan pada waktu proses pengambilan pernyataan Komisi.

73. Kebanyakan dari pembunuhan dan penghilangan yang dilaporkan kepada Komisi dikaitkan dengan militer Indonesia dan pasukan pembantu mereka, seperti yang diperlihatkan Bagan <VlnTypePe1M.Fatalrtf>: 57,6% (2.947/5.120) dari pelaku yang terlibat pelanggaran fatal

dikaitkan pada militer Indonesia dan polisi, dan 32,3% (1.654/5.120) dikaitkan pada pasukan pembantu mereka (seperti milisi, pasukan pertahanan sipil dan pejabat lokal yang bekerja di bawah keadministrasian Indonesia). Dalam 29,6% (1.514/5.120) dari pembunuhan dan penghilangan yang dilaporkan, pelaku yang bertanggungjawab dikaitkan dengan Gerakan Perlawanan dan pasukan pro-kemerdekaan.

[Masukkan Bagan <VlnTypePe1MFatal.rtf> di sini]

74. Tingkat pertanggungjawaban lembaga-lembaga yang terkait terhadap pembunuhan dan penghilangan yang dicatat berbeda-beda selama terjadinya konflik. Pada masa awal invasi Indonesia antara tahun 1975 dan 1984, 62,3% (2.831/4.543) dari pembunuhan dan penghilangan yang dicatat dikaitkan dengan militer Indonesia dan polisi. Kemudian, selama periode "normalisasi dan konsolidasi" pendudukan Indonesia, antara tahun 1985 dan 1998, 64,6% (317/488) dari pembunuhan dan penghilangan yang dicatat dikaitkan dengan militer Indonesia dan polisi. Kemudian, pada tahun 1999 menjelang dan setelah jajak pendapat yang disponsori oleh PBB, ada perubahan struktural yang tampak jelas dalam pertanggungjawaban secara proporsional terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dicatat. Khususnya, 9,5% (85/898) dari pembunuhan dan penghilangan dikaitkan hanya dengan tindakan militer Indonesia dan polisi, 39,5% (355/898) dikaitkan dengan tindakan militer Indonesia dan polisi bersama-sama dengan milisi-milisi Timor-Timur dan 42,9% (385/898) dikaitkan hanya dengan tindakan mandiri milisi Timor-Timur.

75. Sebaliknya, sementara pada tahun 1975 ada 49,0% (561/1.145) pembunuhan dan penghilangan yang tercatat dikaitkan dengan Fretilin, pada tahun 1976 hanya 16,6% (563/3.398) dari pembunuhan dan penghilangan dikaitkan dengan Fretilin.^{*} Selanjutnya, 3,7% (18/488) dari pembunuhan dan penghilangan antara tahun 1985 dan tahun 1998 dikaitkan dengan Fretilin dan kemudian pada tahun 1999 hanya 0,6% (5/898) dari pembunuhan dan penghilangan dikaitkan dengan Fretilin. Data pernyataan naratif Komisi adalah sesuai dengan hipotesis bahwa sebagian besar pembunuhan dan penghilangan yang dikaitkan dengan Fretilin dilaksanakan tahun 1975 pada waktu konflik internal antar-partai politik.

76. Selama berbagai peristiwa yang terjadi pada masa konflik, para deponen dalam proses pengambilan pernyataan Komisi banyak mengkaitkan pertanggungjawaban kepada berbagai satuan khusus pasukan pendudukan Indonesia dan pasukan pembantu mereka pada waktu-waktu tertentu dalam masa konflik.

77. Seperti yang diperlihatkan oleh Bagan <gpter100.pdf> dan <gpnnon100.pdf>, pola pelanggaran yang dilaporkan dikaitkan dengan satuan teritorial (satuan yang berada di dalam struktur permanen militer lokal) dan satuan non-teritorial (satuan yang mendapat izin sementara untuk berperang dan melaksanakan tugas-tugas lainnya di Timor-Leste) dari militer Indonesia adalah hampir sama. Pembunuhan dan penghilangan yang dilaporkan yang terkait baik dengan satuan teritorial maupun satuan non-teritorial sangat terpusatkan pada tahun-tahun 1975-80, kemudian tahun 1982-84 dan akhirnya pada tahun 1999. Data pernyataan naratif Komisi sesuai dengan hipotesis bahwa satuan teritorial dan satuan non-teritorial militer Indonesia melaksanakan pembunuhan dan penghilangan dalam skala besar pada awal tahun-tahun pendudukan, pada awal dimulainya tahap konsolidasi masa pendudukan dan kemudian juga sekitar waktu diadakan Jajak Pendapat yang disponsori oleh PBB pada tahun 1999.

[Masukkan Bagan <gpter100.pdf> and <gpnnon100.pdf> di sini]

^{*} Perhatikan bahwa 42,2% (237/561) dari pembunuhan dan penghilangan yang tercatat yang dikaitkan dengan Fretilin pada tahun 1975 terjadi pada waktu konflik internal antar-partai pada bulan Agustus dan September pada tahun tersebut dan bahwa 4,8% (27/561) dari pembunuhan dan penghilangan yang tercatat yang dikaitkan dengan Fretilin pada tahun 1975 terjadi pada bulan Desember, namun 43,3% (243/561) dari pembunuhan dan penghilangan pada tahun 1975 yang dikaitkan dengan Fretilin tidak mempunyai informasi khusus mengenai bulan waktu pelanggaran itu terjadi.

78. Kasus pembunuhan dan penghilangan yang dilaporkan yang dikaitkan dengan pasukan pertahanan sipil, terutama Hansip, terpusatkan pada waktu tahun-tahun awal masa pendudukan antara tahun 1975 dan 1979 dan kemudian juga tahun 1983.

[Masukkan Bagan <gpcid100.pdf> di sini]

79. Sebaliknya, kasus pembunuhan dan penghilangan yang dilaporkan yang dikaitkan dengan Pasukan Khusus (Kopassandha/Kopassus) terpusatkan pada tahun 1978 dan 1980, 1982 dan 1984, 1991 dan kemudian juga tahun 1999. Oleh sebab itu data pernyataan Komisi sesuai dengan hipotesis bahwa Kopassandha/Kopassus digunakan untuk operasi militer khusus pada tahun-tahun belakangan di periode awal invasi, dan kemudian digunakan untuk kampanye militer dalam tahun-tahun konsolidasi dan terakhir pada tahun 1999.

80. Kadang-kadang pelanggaran fatal hanya dikaitkan dengan tindakan mandiri militer Indonesia dan polisi, di waktu lain dengan tindakan mandiri pasukan pembantu mereka, dan di lain waktu lagi dengan tindakan bersama militer Indonesia dan polisi dengan pasukan pembantu mereka. Pola pertanggungjawaban institusional bersama antara pasukan Indonesia dan pasukan pembantu mereka dan pertanggungjawaban institusional mandiri berbeda-beda dalam lintas waktu, seperti yang bisa dilihat pada Bagan <t_100_perp_resp_share_phase.rtf>. Pada waktu tahun-tahun awal invasi dan kemudian berturut-turut pada tahun-tahun konsolidasi pendudukan, sekitar 45% dari pembunuhan yang dilaporkan hanya semata-mata dikaitkan dengan militer Indonesia dan polisi. Pada sekitar waktu diadakannya Jajak Pendapat yang disponsori oleh PBB, 8,5% (71/838) dari pembunuhan yang dilaporkan hanya semata-mata dikaitkan dengan militer Indonesia dan polisi. Semakin lama pendudukan Indonesia berlangsung, semakin tinggi proporsi pembunuhan yang dikaitkan dengan militer Indonesia dan polisi yang bertindak bersama-sama dengan pasukan pembantu mereka. Oleh sebab itu, data pernyataan Komisi sesuai dengan hipotesis bahwa selama masa awal tahun-tahun invasi dan tahun-tahun “normalisasi dan konsolidasi”, militer Indonesia secara luas bertindak semata-mata sendiri dalam melaksanakan pembunuhan terhadap penduduk sipil, sedangkan, di tahun 1999 militer Indonesia membantu dan bersekongkol dengan pasukan pembantu mereka (terutama milisi yang pro-otonomi) dalam melaksanakan pembunuhan masyarakat sipil.

[Masukkan Bagan <t_100_perp_resp_share_phase.rtf> di sini]

Pola kasus pembunuhan dan penghilangan non-pejuang yang dilaporkan terhadap korban perorangan dan kelompok

81. Beberapa kasus pembunuhan dan penghilangan yang dilaporkan kepada Komisi dilakukan terhadap perorangan, tapi ada juga yang dilakukan terhadap beberapa orang sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Bagan <ggpsize100M.pdf>, dan <ggpsize500M.pdf> memperlihatkan distribusi pelanggaran menurut ukuran kelompok korban kasus pembunuhan dan penghilangan.

[Masukan Bagan <ggpsize100M.pdf>, and <ggpsize500M.pdf>di sini]

82. Baik pembunuhan maupun penghilangan memperlihatkan pola yang sama dalam hal proporsi pelanggaran yang dilakukan terhadap individu satu-per-satu atau individu berkelompok. Seperti yang terlihat pada Bagan <ggpsize100M.pdf> dan <ggpsize500M.pdf>, 95,9% (5.120/5.339) dari pembunuhan yang dilaporkan dan 96,9% (835/862) dari penghilangan yang dilaporkan dilakukan terhadap individu satu-per-satu. Penemuan empiris ini muncul sesuai

* Seperti dalam kasus pelanggaran yang dilaporkan terhadap korban perorangan, pelanggaran terhadap korban dalam kelompok bisa dilaporkan oleh lebih dari satu deponen. Data korban kelompok telah dibanding-bandingkan untuk mengecek pengidentifikasian laporan duplikat dari pelanggaran dan korban yang sama dalam pernyataan jamak. Metode yang digunakan untuk pengecekan dijelaskan pada Lampiran mengenai statistik.

dengan hipotesis bahwa baik pembunuhan maupun penghilangan, keduanya digunakan sebagai suatu bentuk penindasan yang lebih bersasaran.

83. Seperti yang diperlihatkan Bagan <gpTS_groupindiv100.pdf> dan <gpTS_groupindiv500.pdf>, dalam pernyataan-pernyataan yang diberikan kepada Komisi, baik pembunuhan maupun penghilangan terhadap korban perorangan dan korban kelompok berkorelasi positif lintas waktu. Apabila jumlah pembunuhan yang dilaporkan terhadap individu naik, maka jumlah pembunuhan yang dilaporkan terhadap korban kelompok juga naik. Hal yang sama juga terjadi untuk kasus penghilangan yang dilaporkan. Oleh sebab itu, jumlah pembunuhan besar-besaran terhadap korban kelompok yang dilaporkan terpusatkan pada awal tahun-tahun invasi antara tahun 1975 dan 1979, dan juga sama halnya dengan jumlah pembunuhan besar-besaran terhadap perorangan yang dilaporkan. Penghilangan besar-besaran terhadap korban kelompok yang dilaporkan terpusatkan pada periode kampanye operasi balasan terhadap Gerakan Perlawanan pada tahun 1979 dan 1984, dan juga sama halnya dengan jumlah penghilangan besar-besaran terhadap perorangan yang dilaporkan.

[Masukkan Bagan <gpTS_groupindiv100.pdf> dan <gpTS_groupindiv500.pdf> di sini]

84. Paling tidak ada dua kemungkinan penjelasan bagi korelasi positif antara (i) pembunuhan individual dan pembunuhan kelompok yang dilaporkan dan (ii) penghilangan individual dan penghilangan kelompok yang dilaporkan:

- Baik pembunuhan terhadap individu maupun kelompok digerakkan oleh praktek-praktek yang sama atau kebijaksanaan yang sama dari pihak yang bertanggungjawab atas tindakan kriminal ini, hal yang sama juga berlaku untuk kasus penghilangan, atau
- Beberapa deponen proses pengambilan pernyataan Komisi lebih banyak mempunyai kesulitan dibandingkan dengan yang lainnya terutama dalam pengidentifikasian korban perorangan dari pembunuhan dan penghilangan yang terjadi pada waktu serangan militer besar-besaran pada akhir tahun 1970an dan antara tahun 1983 dan 1984. Akibatnya beberapa deponen mungkin menggambarkan pembunuhan dan penghilangan ini sebagai hal yang dialami oleh korban kelompok-kelompok anonim.

85. Lepas dari penjelasan yang mana saja adalah benar, data pernyataan Komisi sesuai dengan hipotesis bahwa penghilangan besar-besaran dan pembunuhan besar-besaran terpusatkan pada waktu: pembunuhan besar-besaran terutama terpusatkan pada tahun-tahun awal invasi dan pendudukan (1975-1979), sementara penghilangan besar-besaran terpusatkan pada tahun 1978-1979 pada masa akhir tahun-tahun invasi dan pada waktu operasi penumpasan balasan terhadap Gerakan Perlawanan di distrik-distrik Timur dan, dalam cakupan yang lebih kecil, di-mana-mana pada tahun 1983-1984.

Pola dari pembunuhan dan penghilangan non-pejuang yang dilaporkan menurut karakteristik demografis dan afiliasi politik korban

86. Penelitian Komisi bertanya apakah pembunuhan dan penghilangan dilaksanakan dengan suatu cara yang sistematis dan didasarkan pada korban yang mempunyai karakteristik demografis khusus (seperti usia dan jenis kelamin) atau afiliasi politik. Bagian ini akan membahas cakupan dan pola yang dilaporkan dari pembunuhan dan penghilangan menurut jenis kelamin dan usia korban dan menurut apakah korban tersebut penduduk sipil, pejuang Gerakan Perlawanan yang bersenjata atau seorang aktivis politik.

¹ Korelasi koefisien lintas waktu antara pembunuhan individual dengan pembunuhan kelompok yang dilaporkan adalah 0,95, sementara korelasi koefisien lintas waktu antara penghilangan individual dengan penghilangan kelompok yang dilaporkan adalah 0,84.

87. Sebagian besar pembunuhan dan penghilangan yang dilaporkan pada waktu proses pengambilan pernyataan Komisi adalah korban laki-laki. 86,9% (4.451/5.120) dari pembunuhan yang dilaporkan adalah korban laki-laki dan 90,5% (756/836) dari penghilangan yang dilaporkan adalah juga laki-laki. Di samping itu, pemuda berusia antara 20 dan 34 merupakan usia korban kelompok untuk korban pembunuhan dan penghilangan yang paling sering dilaporkan: 37,4% (663/2.090) dari korban pembunuhan yang usianya diketahui berasal dari kelompok usia ini. 40,0% (138/345) dari korban penghilangan yang usianya dilaporkan berusia antara 20 dan 34.[†]

88. Seperti yang terlihat dalam Bagan <g21910000100.pdf> dan <g21910000500.pdf>, lelaki muda berusia antara 20 dan 34 adalah korban pembunuhan dan penghilangan yang paling sering dilaporkan pada proses pengambilan pernyataan Komisi.

[Masukan Bagan <g21910000100.pdf> and <g21910000500.pdf> di sini]

89. Kalau kita beralih dari hitungan sederhana pelanggaran pembunuhan dan penghilangan ke hitungan pelanggaran berbasis penduduk, maka ada beberapa perbedaan yang bisa diteliti. Relatif terhadap keseluruhan penduduk Timor Timur, laki-laki paruh baya dan laki-laki tua mengalami tingkat tertinggi (relatif pada persentasenya terhadap penduduk) pembunuhan yang dilaporkan, dan laki-laki dari kelompok usia 50-54 tahun mengalami tingkat tertinggi (relatif pada persentasenya terhadap penduduk) penghilangan yang dilaporkan. Pola ini diperlihatkan pada Bagan <g4910000100.pdf> and <g4910000500.pdf>.

[Masukan Bagan <g4910000100.pdf>, <g4910000500.pdf> di sini]

90. 48,7% (2.487/5.120) dari pembunuhan dan 45,3% (377/835) dari penghilangan yang dilaporkan kepada Komisi dilakukan terhadap penduduk sipil, termasuk baik mereka yang tidak mempunyai afiliasi politik, maupun mereka yang secara formal menjadi anggota kelompok pro-kemerdekaan atau partai politik, seperti yang bisa dilihat pada Bagan <gVinstM100.pdf> dan <gVinstM500.pdf>.

[Masukkan Bagan <gVinstM100.pdf> and <gVinstM500.pdf> di sini]

91. 40,9% (2.092/5.120) dari pembunuhan yang dilaporkan pada proses pengambilan pernyataan Komisi adalah terhadap korban-korban yang baik secara formal berafiliasi dengan Fretilin maupun dengan kelompok pro-kemerdekaan yang tidak secara langsung dapat dikaitkan sebagai pejuang bersenjata. 6,4% (329/5.120) dari pembunuhan yang dilaporkan adalah terhadap korban-korban yang dilaporkan berafiliasi dengan Falintil.

92. 33,5% (280/835) dari penghilangan yang dilaporkan pada proses pengambilan pernyataan Komisi adalah terhadap korban-korban yang baik secara formal berafiliasi dengan Fretilin maupun dengan kelompok pro-kemerdekaan yang tidak secara langsung dapat dikaitkan sebagai pejuang bersenjata. 7,6% (64/835) dari penghilangan yang dilaporkan adalah terhadap korban-korban yang dilaporkan berafiliasi dengan Falintil.

93. Data pernyataan Komisi sesuai dengan hipotesis bahwa sebagian besar dari pembunuhan dan penghilangan dilakukan terhadap para anggota dan mereka yang dicurigai berasosiasi dengan Gerakan Perlawanan (sekalipun orang-orang yang dicurigai berasosiasi dengan Gerakan Perlawanan itu mungkin saja secara formal tidak ada hubungan dengan partai politik atau kelompok bersenjata).

^{*} Usia khusus untuk 59,6% (3.030/5.120) korban pembunuhan yang dilaporkan pada proses pengambilan pernyataan Komisi adalah tidak diketahui atau tidak dilaporkan.

[†] Usia khusus dari 59,2% (490/835) korban penghilangan yang dilaporkan pada proses pengambilan pernyataan Komisi adalah tidak diketahui atau tidak dilaporkan.

Hubungan antara kematian berkaitan konflik dengan lamanya penahanan

94. Pola penahanan sewenang-wenang dan pembunuhan terhadap penduduk sipil yang dilaporkan kepada Komisi berkorelasi positif lintas waktu. Tepatnya, baik pembunuhan terhadap non-pejuang yang dilaporkan maupun penahanan sewenang-wenang banyak sekali terpusatkan pada waktu tahun-tahun awal invasi dan pendudukan Indonesia, seperti yang diperlihatkan dalam Bagan <g122Mhrvd100.pdf> dan <g122Mhrvd400.pdf>.

[Masukan Bagan <g122Mhrvd100.pdf> dan <g122Mhrvd400.pdf> di sini]

95. Selanjutnya, dari penduduk sipil yang dilaporkan mati karena sebab-sebab yang berkaitan dengan konflik (yaitu, baik kasus kematian penduduk sipil karena pembunuhan, kelaparan dan penyakit atau kasus penghilangan), 98,6% (10.659/10.809) dilaporkan paling tidak pernah sekali ditahan sewenang-wenang pada periode mandat Komisi. Seperti yang diperlihatkan dalam Tabel <tStdInDetnVInfatalsx_lo_dist.rtf>, 3,5% (378/10.809) dari korban-korban ini mati pada waktu mereka masih berada dalam tahanan. Untuk 12,2% (1.314/10.809) dari orang mati berkaitan dengan konflik dan yang juga ditahan sewenang-wenang pada waktu periode mandat Komisi, tanggal penahanan mereka tidak diketahui. Oleh sebab itu, Komisi tidak dapat membedakan apakah kematian yang berkaitan dengan konflik ini terjadi pada saat si korban masih ditahan atau tidak pada saat itu. Meskipun begitu, dari korban-korban yang dilaporkan ditahan sewenang-wenang pada masa konflik, 15,7% (1.692/10.809) dari mereka mati karena peristiwa konflik tersebut.

[Masukan Tabel <tStdInDetnVInfatalsx_lo_dist.rtf> di sini]

96. Dari pelanggaran fatal yang dilaporkan kepada Komisi yang terjadi sementara korban masih berada di tahanan, 96,6% (365/378) dari mereka adalah pembunuhan dan penghilangan penduduk sipil dan 3,4% (13/378) adalah kematian karena lapar dan penyakit. Sebaliknya, pembagian menurut sebab kematian untuk orang yang mati berkaitan dengan konflik yang terjadi di luar tahanan kelihatan sangat berbeda: 49,0% (4.390/8.967) dari korban yang dicatat Komisi mati karena pembunuhan atau penghilangan, sedangkan sisanya yang 51,0% (4.577/8.967) mati karena kelaparan dan penyakit. Oleh sebab itu, data kuantitatif Komisi sesuai dengan hipotesis bahwa orang-orang relatif berisiko lebih tinggi untuk dibunuh atau dihilangkan pada saat mereka berada di penjara daripada mereka yang tidak ditahan.

[Masukan Tabel <tStdInDetnVInfatalsx_vln_1.rtf> di sini]

97. Pola kematian yang berkaitan dengan konflik dan hubungannya dengan periode penahanan bervariasi pada tahap-tahap masa konflik. Seperti yang terlihat dalam Tabel <tStdInDetnVInfatalphase.rtf>, kematian di dalam tahanan yang dilaporkan sangat banyak terpusatkan pada tahap-tahap pertama dan akhir masa konflik. Kematian berkaitan dengan konflik yang terjadi di luar tahanan (untuk korban-korban yang pernah ditawan sewenang-wenang pada periode mandat Komisi) sangat banyak terjadi pada tahap pertama konflik: 85,3% (7.651/8.967) dari kematian berkaitan dengan konflik ini terjadi pada tahap pertama konflik, sedangkan 8,5% (762/8.967) terjadi pada tahun 1999.

[Masukan Tabel <tStdInDetnVInfatalphase.rtf> di sini]

* Koefisien korelasi untuk kedua seri ini adalah 0,83.

6.3 Pelanggaran-Pelanggaran Non-fatal

6.3.1 Pengantar

98. Dalam bagian ini kami akan menyajikan analisis pelanggaran-pelanggaran non fatal yang dilaporkan kepada Komisi. Analisis ini tidak mengandung perkiraan mengenai keseluruhan cakupan, pola, dan kecenderungan dari pelanggaran-pelanggaran non-fatal, karena analisis ini didasarkan pada sampel kemudahan (sampel non-acak) dari pernyataan naratif yang dikumpulkan oleh Komisi. Namun demikian, analisis ini menyajikan pola-pola statistik pelanggaran-pelanggaran non-fatal yang dilaporkan kepada Komisi dan memberikan hipotesis-hipotesis yang mendapat dukungan dari data tersebut. Di samping itu, kami membandingkan pola-pola statistik dan kecenderungan yang diteliti dalam data Komisi mengenai pelanggaran-pelanggaran non-fatal dengan data yang dikumpulkan bersamaan waktunya oleh Amnesty International dan juga dengan data yang dikumpulkan oleh NGO Timor-Leste, yaitu Fokupers, segera setelah Jajak Pendapat yang disponsori oleh PBB.

6.3.2 Tinjauan dari Temuan-Temuan Statistik mengenai Pelanggaran Non-Fatal

99. Bagian ini meringkas temuan-temuan utama analisis statistik deskriptif Komisi mengenai hampir 8.000 pernyataan naratif yang dikumpulkan dari ke-13 distrik di Timor-Leste.

- Pelanggaran-pelanggaran non-fatal yang dilaporkan kepada Komisi sangat banyak sekali terpusatkan pada periode awal invasi dan pendudukan oleh pasukan militer Indonesia, dan sekitar waktu Jajak Pendapat yang disponsori oleh PBB: 56,3% (33.224/60.047) dari pelanggaran-pelanggaran non-fatal yang dicatat terjadi antara tahun 1975 dan 1984, sedangkan 21,0% (12.634/60.047) terjadi pada tahun 1999.
- Di hampir semua distrik, kecuali Oecusse, penahanan, penyiksaan dan penganiayaan merupakan pelanggaran-pelanggaran yang paling sering dilaporkan, berkisar antara 69,4% sampai 82,7% dari pelanggaran yang dilaporkan di distrik-distrik. Di Oecusse, pelanggaran keutuhan fisik (seperti penahanan, penyiksaan dan penganiayaan) berjumlah 43,0% dari seluruh pelanggaran di distrik tersebut. Dibandingkan dengan distrik-distrik lain, di Oecusse, pelanggaran harta milik dan ekonomi dilaporkan dalam proporsinya yang lebih tinggi, yakni 30,8% (1.271/4.133) dari keseluruhan pelanggaran di distrik tersebut.
- Pola-pola pelanggaran non-fatal pada saat tahap pertama dan tahap terakhir konflik berbeda dari wilayah ke wilayah. Sementara kekerasan pada masa awal invasi Indonesia tahun 1975 paling gencar terjadi di Wilayah Barat dan Tengah, setelah tahun 1976 fokus pelanggaran non-fatal beralih ke Wilayah Timur.
- Pembagian menurut umur-jenis kelamin yang didokumentasi untuk penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dan penganiayaan ini sungguh serupa, dan masing-masing menunjukkan bahwa kelompok korban yang paling banyak tercatat untuk jenis-jenis pelanggaran ini adalah laki-laki muda dalam usia dinas militer (usia antara 20 dan 49). Sangat sedikit tindak penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan yang tercatat dialami oleh korban perempuan. Sebaliknya, banyak sekali korban perempuan yang mengalami pelanggaran seksual: 90,1% (769/853) dari pelanggaran seksual yang tercatat Komisi dialami oleh korban perempuan.
- Data Komisi tentang pelanggaran-pelanggaran non-fatal secara umum menunjukkan peningkatan dalam perbandingan orang dewasa terhadap anak-anak selama masa tersebut, yaitu, semakin mendekati penghujung masa konflik, semakin naik jumlah korban dewasa jika dibandingkan dengan korban anak-anak.
- Laporan yang bersamaan waktunya dari Amnesty International memperlihatkan tiga gelombang yang berbeda dalam hal penahanan perorangan yang identitasnya diketahui, yaitu pada tahun 1985, 1989-93 dan 1994-99, masing-masing 402, 891 dan 811 orang. Sementara itu, laporan retrospektif yang diberikan kepada pernyataan naratif Komisi menyebutkan jumlah terbanyak penahanan sewenang-wenang terjadi pada tahun 1999 dan sekitar tahun 1975-84.
- Analisis komparatif Komisi antara data statistiknya sendiri dengan laporan yang bersamaan waktunya dari Amnesty International memperlihatkan bahwa meskipun kelompok-kelompok hak asasi manusia, seperti Amnesty International, secara seksama mencatat situasi hak asasi manusia di Timor-Leste sepanjang dasawarsa 1980-an dan 1990-an, pelaporan yang dilakukan jauh lebih rendah daripada skala keseluruhan kekerasan non-fatal pada waktu itu, khususnya pada waktu tahun-tahun awal masa invasi dan pendudukan.
- Bukti statistik Komisi sesuai dengan hipotesis bahwa kegiatan penahanan militer Indonesia berubah dari fokus pada korban baik perorangan maupun kelompok pada tahun-tahun awal 1977-84 ke strategi lebih bersasaran yang berfokus pada tahanan perorangan saja mulai 1985 sampai 1999. Bukti statistik Komisi juga memperlihatkan korelasi positif antara tindakan penyiksaan yang dilakukan terhadap korban kelompok maupun korban perorangan sepanjang waktu.

- Pola penahanan dan penyiksaan yang dilaporkan sepanjang waktu sangat berkorelasi positif. Sepanjang waktu, kekerasan menjadi semakin terkoordinasi dan ukuran tindak penyiksaan yang dilaporkan sepanjang waktu juga semakin meningkat (antara akhir tahun 1970an dan pertengahan 1980an) dibandingkan dengan jumlah tindak penahanan yang dilaporkan. Bukti statistik Komisi juga memperlihatkan bahwa sepanjang waktu (dan khususnya setelah tahun 1984) praktek penahanan sewenang-wenang menjadi lebih bersasaran dan semakin umum digunakan bersamaan dengan tindak penyiksaan.
- Penyalahgunaan yang paling sering terjadi dalam masa-masa penahanan yang diketahui adalah penyiksaan (38,4%, 4.267/9.094), penganiayaan (33,2%, 27.998/9.094) dan pengancaman (21,3%, 634/9.094). Selanjutnya, penyiksaan dan penganiayaan lebih jarang dilaporkan di antara para korban yang tidak pernah mengalami penahanan: dari keseluruhan penyiksaan yang didokumentasi oleh Komisi, 16,4% (1.820/11.123) diderita oleh para korban yang tidak pernah mengalami penahanan. Bukti statistik Komisi sesuai dengan hipotesis bahwa korban yang ditahan lebih tinggi kerentanannya untuk mengalami penyiksaan dan penganiayaan daripada para korban yang tidak pernah mengalami penahanan pada periode acuan Komisi.
- Distrik-distrik yang melaporkan proporsi penyiksaan dan penganiayaan yang relatif lebih tinggi, juga cenderung melaporkan lebih banyak pelanggaran selama penahanan.
- Anak-anak dan orang-orang yang lebih tua ditahan jauh lebih jarang, dan jika ditahan, mereka mengalami tingkat penganiayaan yang jauh lebih rendah.
- Data yang dikumpulkan secara sendiri-sendiri oleh Komisi dan Amnesty International memastikan bahwa sejumlah besar orang pernah ditahan di Pulau Atauro pada periode antara tahun 1980 dan 1984, di samping juga adanya penahanan besar-besaran yang berlangsung terus di bagian lain di Timor-Leste.
- 88,7% (68.943/77.748) dari pelanggaran-pelanggaran non-fatal yang dilaporkan kepada Komisi adalah pelanggaran terhadap penduduk sipil. Akan tetapi, ketika gerakan pro-kemerdekaan makin terorganisasi dan terbuka menjelang dan setelah Jajak Pendapat yang disponsori oleh PBB pada tahun 1999, jumlah penduduk sipil dengan afiliasi pro-kemerdekaan yang mengalami pelanggaran non-fatal makin meningkat.
- Sebagian besar pelanggaran-pelanggaran non-fatal yang dilaporkan kepada Komisi dikaitkan dengan militer Indonesia dan polisi: 62,2% (37.343/60.047) dari pelanggaran-pelanggaran non-fatal yang tercatat dikaitkan dengan militer Indonesia dan polisi, 38,7% (23.253/60.047) dikaitkan dengan pasukan pembantu mereka dari pasukan pendudukan Indonesia, dan 11,9% (7.157/60.047) dikaitkan dengan Gerakan Perlawanan.*
- Analisis kuantitatif Komisi mengenai penahanan sewenang-wenang sesuai dengan hipotesis bahwa koordinasi dan kerjasama antara pasukan pendudukan Indonesia dan pasukan pembantu mereka terutama menjadi kuat setelah militer Indonesia menguasai sebagian besar Timor-Leste dan memulai pengkonsolidasian wilayah pendudukan mereka, dan kemudian juga pada tahun 1999 pada saat menjelang dan setelah masa Jajak Pendapat yang disponsori oleh PBB.
- Data statistik Komisi sesuai dengan hipotesis bahwa pada tahun 1999 militer Indonesia dan polisi membantu dan bersekongkol dengan pasukan pembantu mereka (khususnya milisi-milisi yang pro-otonomi) dalam penggunaan penahanan sewenang-wenang secara luas pada masa menjelang dan setelah Jajak Pendapat yang disponsori oleh PBB.

6.3.3 Keterangan mendalam analisis statistik pelanggaran non-fatal

Distribusi Keseluruhan dari Pelanggaran Non-Fatal yang Dilaporkan

* Perhatikan bahwa untuk beberapa pelanggaran yang dilaporkan, pelaku yang bertanggungjawab atas tindakan itu dapat dikaitkan pada lebih dari satu lembaga. Oleh karena itu, angka persentase untuk pelaku yang bertanggungjawab tidak mencapai 100%.

100. Besarnya skala keseluruhan dari proses pengambilan pernyataan yang dijalankan oleh Komisi belum pernah dialami sebelumnya, ketika dibandingkan dengan semua proyek-proyek dokumentasi HAM terdahulu yang pernah dilakukan di Timor-Leste.

101. Seperti tampak pada Bagan<t\InTypDatasourceM>, jenis-jenis pelanggaran non-fatal yang didokumentasi oleh Komisi, Amnesty International dan Fokupers cukup berbeda. Ini mencerminkan perbedaan sifat dari ketiga proyek tersebut dan perbedaan jaringan sosial yang dapat diakses dengan strategi pengumpulan data ketiga institusi tersebut. Dari semua pelanggaran-pelanggaran non-fatal yang dilaporkan kepada Komisi, 42,3% (25.347/59.972) adalah penahanan, 18,5% (11.123/59.972) adalah penyiksaan dan 14,1% (8.436/59.972) adalah penganiayaan. Sebaliknya, proporsi penahanan (23,4% (184/788)) dan penyiksaan (7,5% (59/788)) yang jauh lebih rendah dilaporkan kepada Fokupers dibanding dengan yang dilaporkan kepada CAVR, meskipun proporsi pemindahan dan penganiayaan kurang lebih sama antara yang dilaporkan kepada Fokupers dengan yang dilaporkan kepada CAVR.

102. Fokupers adalah lembaga hak asasi perempuan yang juga menyediakan layanan pendampingan dan rehabilitasi kepada perempuan. Fokupers mencatat proporsi pemerkosaan yang lebih besar dibanding CAVR dan Amnesty International: 7,7% (86/1.115) dari semua pelanggaran non-fatal yang mereka dokumentasikan adalah pemerkosaan. Sebaliknya, dari pelanggaran yang tercatat dalam laporan-laporan Amnesty International yang tersedia, 59,7% (3.272/5.479) adalah penahanan, 18% (986/5.479) adalah pengadilan yang tidak adil dan 11,5% (631/5479) adalah tindak penyiksaan .

[Masukkan Bagan <t\InTypDatasourceM> di sini]

103. Distribusi relatif korban per pelanggaran untuk jenis-jenis pelanggaran yang berbeda kurang lebih serupa antara proyek-proyek CAVR, Fokupers dan Amnesty International, seperti ditunjukkan dalam Bagan <stdVPV1M.rtf>, <stdVPV2M.rtf> dan <stdVPV3M.rtf>. CAVR cenderung mendokumentasikan agak lebih banyak pelanggaran per korban dibanding proyek-proyek Fokupers dan Amnesty Internasional. Rata-rata, 2,36 pelanggaran per korban dilaporkan ke CAVR, dibandingkan dengan 2,01 dan 1,53 yang dilaporkan ke Fokupers dan Amnesty. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan karakter dari proyek-proyek yang berbeda tersebut. CAVR mendokumentasikan pelanggaran-pelanggaran untuk seluruh periode mandat, termasuk tahun-tahun awal invasi, sementara kerja Amnesty terkonsentrasi sebagian besar pada tahun-tahun konsolidasi pendudukan dan dikumpulkan selama konflik ketika komunikasi antara Timor dan dunia luar sangat terbatas. Proyek Fokupers terfokus hampir secara khusus pada tahap ketiga dari konflik, yakni seputar masa Jajak Pendapat yang diawasi PBB. Fokupers secara khusus mengandalkan para deponen perempuan dan terfokus pada dokumentasi pelanggaran-pelanggaran seksual.

[Masukkan Bagan <stdVPV1M.rtf>, <stdVPV2M.rtf> and <stdVPV3M.rtf> di sini]

Tiga Tahap Kekerasan Skala Besar di Timor-Leste

104. Komisi mendefinisikan tiga tahap konflik antara April 1974 – September 1999. Tahap pertama mencakup invasi dan pendudukan awal Indonesia atas Timor-Leste, dari tahun 1975 sampai 1984. Tahap kedua adalah konsolidasi dan normalisasi pendudukan, dari tahun 1985 sampai 1998. Tahap ketiga adalah tiga triwulan pertama tahun 1999, yaitu masa seputar proses Jajak Pendapat yang disponsori PBB.

105. Seperti yang tampak pada Bagan <g122Mhrvd8888.pdf>, terdapat tingkat pelanggaran non-fatal yang tinggi selama masa invasi dan pendudukan awal. Selama tahap kedua, secara umum terjadi pelanggaran non-fatal dalam tingkat yang relatif lebih rendah dan terjadi konsentrasi penahanan, penyiksaan dan pembunuhan seputar masa pembantaian Santa Cruz tahun 1991. Tahap kedua, yaitu normalisasi, mencakup gelombang penahanan dan penyiksaan

fisik yang baru atas anggota-anggota dan kolaborator gerakan perlawanan. Dan pada tahap terakhir dari konflik, yang mencakup masa menjelang Jajak Pendapat dan juga masa setelah Jajak Pendapat dan dikerahkannya pasukan multinasional Interfet (International Force in East Timor), menghasilkan dua gelombang pembunuhan, pemindahan, dan penjarahan yang berbeda. Tahap terakhir ini ditandai dengan pelanggaran skala besar yang terkonsentrasi pada tenggat waktu yang singkat yang dilakukan oleh "milisi pro-otonomi" yang didukung, dilatih, dipersenjatai, dan diarahkan oleh militer Indonesia.

[Masukkan Bagan <g122Mhrvd8888.pdf> di sini]

106. Pola pelanggaran non-fatal ini menyerupai pola pelanggaran fatal seperti dibahas di atas. Yaitu, pelanggaran secara besar-besaran selama tahun-tahun awal invasi dan pendudukan, kemudian diikuti dengan tingkat kekerasan yang relatif rendah selama tahun-tahun konsolidasi dan normalisasi, dan diakhiri dengan peningkatan kekerasan pada tahun 1999,.

107. Selama tahun 1999, pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan sangat terkonsentrasi pada bulan April dan September. Seperti tampak pada Bagan <g4TS4006001000.pdf>, pola penahanan, penganiayaan dan penyiksaan yang dilaporkan berkorelasi positif dalam lintas waktu, yakni, ketika salah satu pelanggaran meningkat, yang lain juga cenderung meningkat, dan sebaliknya. Ketiga jenis pelanggaran tersebut dilaporkan memuncak pada bulan April dengan puncak yang lebih kecil pada bulan September, meskipun keduanya serupa dalam skalanya. Pada tahun 1999, kekerasan yang dilaporkan terkonsentrasi pada dua lonjakan utama, sebelum dan sesudah proses Jajak Pendapat yang disponsori PBB. Pola ini konsisten dengan hipotesis yang mengatakan bahwa intimidasi fisik digunakan secara terkoordinasi untuk menakut-nakuti penduduk Timor-Leste menjelang kedatangan misi UNAMET PBB, yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan referendum, dan kemudian sebagai pembalasan segera setelah dilakukannya pemungutan suara.

[Masukkan <g4TS4006001000.pdf> di sini]

108. Praktek milisi dukungan Indonesia dan militer Indonesia mengalami pergeseran signifikan setelah Jajak Pendapat dibanding sebelumnya (lihat juga Bab 7.9: Hak Ekonomi dan Sosial). Seperti ditunjukkan pada Bagan <g1st1480004000400.pdf>, jenis penindasan yang paling sering digunakan sebelum pemungutan suara adalah pelanggaran integritas fisik (seperti penahanan, penyiksaan dan penganiayaan). Segera setelah referendum, penjarahan dan bentuk-bentuk pelanggaran harta benda dan ekonomi paling sering digunakan. Sesudah Jajak Pendapat, pelanggaran integritas fisik terjadi pada tingkat yang sedikit lebih rendah dibanding pada periode sebelumnya, tetapi masih jauh di bawah pelanggaran harta benda. Pola ini tampaknya konsisten dengan hipotesis yang mengatakan bahwa militer Indonesia dan milisi beralih dari menggunakan pelanggaran-pelanggaran integritas fisik untuk menekan penduduk memilih otonomi sebelum Jajak Pendapat, menjadi aksi-aksi balas dendam sesudah Jajak Pendapat yang mencakup penjarahan besar-besaran dan penghancuran harta benda bersama dengan aksi-aksi balas dendam berupa kekerasan fisik. Yang terakhir ini mungkin dapat dikaitkan dengan upaya menekan penduduk agar mau pindah ke Timor Barat, Indonesia. (cross-reference).

[Masukkan Bagan <g1st1480004000400.pdf> di sini]

109. Data empiris Komisi tentang pola-pola pelanggaran non-fatal lintas waktu pada tahun 1999 sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa kekerasan pada tahun 1999 tersebut terkoordinasi.

Tingkatan pertanggungjawaban institusional yang dilaporkan untuk pelanggaran non-fatal

Distribusi Keseluruhan dari pertanggungjawaban institusional untuk pelanggaran Non-Fatal yang Dilaporkan

110. Sejumlah lembaga terlibat dalam tindak-tindak kekerasan selama masa konflik. Kelompok institusional yang utama adalah militer Indonesia, Falintil, Partai-partai Polititik Timor-Leste (seperti Fretilin, UDT dan Apodeti), anggota sipil pasukan pertahanan Timor-Timur (di bawah kendali pemerintah Indonesia) (seperti Hansip, Wanra dan Ratih), milisi-milisi dan pasukan pembantu mereka lainnya. Bagian ini akan membahas tingkat pertanggungjawaban dari kelompok-kelompok institusional pelaku utama pelanggaran-pelanggaran non-fatal yang paling pokok.

111. Mayoritas dari pelanggaran-pelanggaran non-fatal yang dilaporkan kepada Komisi dikaitkan dengan militer Indonesia dan para kolaborator Timor mereka, seperti yang diperlihatkan pada Bagan <VlnTypePe1M.rtf>: 41,2% (37.298/90.635) pelaku yang terlibat dalam pelanggaran-pelanggaran non-fatal dikaitkan dengan militer Indonesia, dan 25,6% (23.230/90.635) dikaitkan dengan pasukan pembantu mereka (seperti milisi-milisi, pasukan pertahanan sipil dan pejabat lokal yang bekerja di bawah keadministrasian Indonesia). Untuk 7,9% (7.146/90.635) dari pelanggaran yang dilaporkan, pelaku pertanggungjawabannya dikaitkan dengan gerakan Perlawanan dan pasukan pro-kemerdekaan.

[Masukkan Bagan <VlnTypePe1M.rtf> di sini]

Pola-pola lintas waktu pertanggungjawaban institusional untuk pelanggaran-pelanggaran non-fatal

112. Tingkat pertanggungjawaban institusional untuk pelanggaran-pelanggaran non-fatal yang tercatat berbeda-beda selama masa konflik. Pada tahun 1975, 51,0% (6.229/12.206) dari pelaku yang terlibat dalam pelanggaran-pelanggaran non-fatal yang tercatat oleh Komisi dikaitkan dengan militer Indonesia, sedangkan yang 29,9% (3.653/12.206) dikaitkan dengan Partai-partai Politik Timor-Leste.

113. Dari pelanggaran-pelanggaran non-fatal yang tercatat yang terjadi pada tahun 1975, 31,2% (3.169/10.162) dikaitkan dengan Fretilin, 19,4% (1.972/10.162) dikaitkan dengan UDT dan 2,6% (261/10.162) dengan Apodeti. Seperti yang diperlihatkan pada Bagan <gTSpolparty.pdf>, sebagian sangat besar pelanggaran-pelanggaran non-fatal yang didokumentasikan pada tahun 1975 (di mana bulan pastinya dari pelanggaran itu diketahui) yang dikaitkan kepada Partai-partai Politik Timor-Leste telah terjadi pada bulan August dan September.

[Masukkan Bagan <gTSpolparty.pdf> di sini]

114. Seperti yang diperlihatkan pada Bagan <g1stIM5000indtim.pdf>, pada masa periode di mana pendudukan militer Indonesia berkembang dari tahun 1977 ke 1984, pola pelanggaran-pelanggaran non-fatal yang dikaitkan dengan militer Indonesia dan pasukan pembantu mereka berkorelasi secara positif.^{*} Selanjutnya, pelaku pertanggungjawaban antara tahun 1977 dan 1984 secara relatif jauh lebih tinggi dikaitkan dengan satuan pertahanan sipil dan pasukan pembantu ABRI lainnya daripada waktu tahun-tahun awal invasi (1975-76) atau pada tahun-tahun konsolidasi antara tahun 1985 dan 1998. Data statistik Komisi sesuai dengan hipotesis bahwa militer Indonesia banyak mengandalkan pasukan pembantu mereka antara tahun 1977 dan 1984 untuk mengendalikan aktivitas Gerakan Perlawanan dan penormalisasian pendudukan melalui cara pelanggaran-pelanggaran keutuhan fisik. Dari seluruh pelanggaran-pelanggaran non-fatal yang dikaitkan dengan pasukan pembantu mereka antara tahun 1977 dan 1984, 54,0%

^{*} Koefisien korelasi untuk pelanggaran non-fatal yang dilaporkan yang dikaitkan kepada militer Indonesia dan polisi dan mereka yang terkait dengan pasukan pembantu mereka adalah 0,88.

(4.660/8.633) merupakan tindak penahanan, 16,6% (1.435/8.663) merupakan tindak penyiksaan dan 10,9% (938/8.633) merupakan tindak penganiayaan.

[Masukkan Bagan <g1stIM5000indtim.pdf> di sini]

115. Deponen-deponen dari proses pengambilan pernyataan Komisi mengkaitkan pertanggungjawaban besar kepada satuan-satuan tertentu pasukan pendudukan Indonesia dan pasukan kolaborator Timor mereka pada waktu-waktu pada berbagai masa konflik itu. Seperti yang diperlihatkan Bagan <gcid400x600.pdf> dan <gkop400x600.pdf>, setelah terjadinya konflik antar partai-partai dan masa awal invasi pada tahun 1975, ada kenaikan dalam pertanggungjawaban dalam penahanan dan penyiksaan oleh satuan pertahanan sipil antara tahun 1978 dan 1983, sedangkan setelah itu Kopassandha/Kopassus (Pasukan Khusus Indonesia) melaksanakan beberapa ratus penahanan dan tindak penyiksaan yang dilaporkan pada tahun 1984 dan 1986. Pada akhir tahun 1990-an, seperti yang terlihat pada Bagan <gpol400x600.pdf>, pertanggungjawaban untuk penahanan dan penyiksaan dikaitkan kepada polisi. Jumlah besarnya penahanan dan penyiksaan yang dikaitkan dengan pasukan pertahanan sipil pada tahun 1983 adalah 1,6 kali lebih besar daripada penahanan dan tindak penyiksaan yang dikaitkan dengan Kopassandha pada tahun yang sama dan 2,0 kali lebih besar daripada yang dikaitkan dengan polisi pada tahun 1999.

[Masukan Bagan <gpcid400x600.pdf>, <gkop400x600.pdf>, dan <gpol400x600.pdf> di sini]

116. Sebaliknya pada tahun 1999, banyak sekali pertanggungjawaban untuk pelanggaran-pelanggaran non-fatal dikaitkan dengan milisi-milisi dan militer Indonesia—jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh milisi dua kali lebih banyak daripada pelanggaran-pelanggaran non-fatal yang dilakukan oleh militer Indonesia, seperti yang terlihat pada Bagan <g1stIM5000miltni.pdf> dand <g1st145000miltni.pdf>.

[Masukan Bagan <g1stIM5000miltni.pdf> dan <g1st145000miltni.pdf> di sini]

117. Kadang-kadang, pelanggaran-pelanggaran non-fatal hanya dikaitkan dengan militer Indonesia dan polisi saja, lain kali hanya dikaitkan dengan pasukan pembantu mereka saja dan kali lainnya lagi dikaitkan dengan militer Indonesia dan polisi yang bekerja sama dengan pasukan pembantu mereka. Pola pertanggungjawaban bersama atau secara individu antara pasukan Indonesia dan pasukan pembantu mereka dibedakan menurut jenis pelanggaran dan lintas waktu.

118. Dari tindak penahanan sewenang-wenang yang didokumentasi oleh Komisi, 82,3% (20.867/25.347) dikaitkan dengan pasukan keamanan Indonesia, pasukan pembantu mereka atau dengan keduanya. Seperti yang terlihat dalam Bagan <gTS_pg400M.pdf>, tindak penahanan sewenang-wenang yang dilaporkan yang dikaitkan hanya dengan militer Indonesia dan polisi, dengan pasukan pembantu mereka atau dengan tindak bersama dari kedua pasukan itu berkorelasi positif sepanjang waktu. Khususnya, masa-masa di mana banyak tindak penahanan tercatat dikaitkan dengan tindak bersama kedua pasukan itu (di samping mereka masing-masing juga bertindak sendiri-sendiri) adalah termasuk juga masa awal invasi dan pendudukan (terutama antara 1978 dan 1983) dan sekitar waktu diadakannya Jajak Pendapat yang disponsori oleh PBB. Oleh karena itu analisis kuantitatif Komisi mengenai penahanan sewenang-wenang sesuai dengan hipotesis bahwa koordinasi dan kerjasama antara pasukan pendudukan Indonesia dan pasukan pembantu mereka mereka terutama menjadi kuat setelah militer Indonesia menguasai sebagian besar Timor-Leste dan memulai pengkonsolidasian wilayah pendudukan mereka, dan kemudian juga pada tahun 1999 pada saat menjelang dan setelah masa Jajak Pendapat yang disponsori oleh PBB.

[Masukkan Bagan <gTS_pg400M.pdf> di sini]

119. Antara tahun 1975 dan 1998, tindak penahanan sewenang-wenang yang hanya dikaitkan dengan militer Indonesia saja jauh lebih banyak terjadi dibandingkan dengan tindak penahanan sewenang-wenang yang hanya dikaitkan dengan pasukan pembantu saja atau gabungan antara pasukan pendudukan Indonesia dengan pasukan pembantu mereka. Tetapi, pada tahun 1999 hampir semua tindak penahanan dikaitkan dengan pasukan pembantu mereka. Dari tindak penahanan sewenang-wenang tahun 1999 yang dicatat oleh Komisi, 75,7% (2.104/2.779) dikaitkan dengan baik hanya tindakan mandiri pasukan pembantu mereka saja atau tindakan pasukan itu bersama dengan militer Indonesia dan polisi, sementara 19,2% (534/2.779) dari tindak penahan yang dicatat yang terjadi pada tahun 1999 hanya dikaitkan dengan militer Indonesia saja. Hampir semua tindakan ini dilaporkan terjadi pada bulan-bulan April, Mei dan September tahun 1999, seperti yang terlihat pada Bagan <gTS_pg4004.pdf>. Pola statistik yang dihasilkan memperlihatkan adanya perencanaan dan koordinasi operasional antara kedua pasukan dalam cara pelaksanaan tindakan sewenang-wenang itu. Pada bulan-bulan tersebut pemerintah Indonesia meyakinkan PBB bahwa pasukan militernya sedang mencoba untuk mengendalikan kekerasan di Timor-Leste. Meskipun begitu, data statistik Komisi sesuai dengan hipotesis bahwa pada tahun 1999 militer Indonesia dan polisi, bukannya menahan pasukan pembantunya (khususnya milisi-milisi yang pro-otonomi) melainkan malah membantu dan bersekongkol dengan pasukan pembantu mereka dalam melaksanakan secara luas tindak penahanan sewenang-wenang pada masa menjelang dan setelah Jajak Pendapat yang disponsori oleh PBB.

120. Pola pertanggungjawaban yang dikaitkan baik pada tindakan mandiri maupun tindakan gabungan pasukan keamanan Indonesia dan pasukan pembantu mereka mempunyai persamaan yang penting yaitu terutama penahanan sewenang-wenang, meskipun tindak penganiayaan dan penyiksaan merupakan cara penindasan yang digunakan dengan lebih bersasaran. Jumlah yang mirip (yaitu 82,5% (16.135/19.559) dari penganiayaan dan penyiksaan yang tercatat dikaitkan dengan pasukan pendudukan Indonesia dan pasukan pembantu mereka. Pada tahun 1999, sama dengan tindak penahanan sewenang-wenang, 75,8% (3.278/4.324) dari tindak penganiayaan dan penyiksaan yang dilaporkan juga dikaitkan dengan pasukan pembantu mereka (baik bertindak sendiri atau bertindak bersama dengan militer Indonesia dan polisi). Meskipun begitu, pada tahun 1999 dilaporkan tindak penganiayaan dan penyiksaan terjadi dalam jumlah yang lebih besar daripada kasus-kasus penahanan sewenang-wenang yang tercatat antara tahun 1974 dan 1998, seperti yang bisa kita lihat apabila kita membandingkan Bagan <gTS_pg600M.pdf> dan <gTS_pg1000M.pdf> dengan bagan <gTS_pg400M.pdf>.

[Masukan Bagan<gTS_pg600M.pdf> dan <gTS_pg1000M.pdf> di sini]

121. Pada tahun 1999 pola dan skala tindak penyiksaan dan penganiayaan yang tercatat yang dikaitkan dengan pasukan pendudukan Indonesia dan pasukan pembantu mereka, baik bertindak sendiri atau bertindak bersama, adalah hampir sama dengan tindak penahanan sewenang-wenang yang tercatat pada tahun 1999, seperti yang bisa terlihat dalam Bagan <gTS_pg6004.pdf> dan <gTS_pg10004.pdf>.

[Masukan Bagan<gTS_pg6004.pdf> dan <gTS_pg10004.pdf> di sini]

122. Oleh karena itu, seperti dalam kasus penahanan sewenang-wenang, data statistik Komisi mengenai tindak penganiayaan dan penyiksaan sesuai dengan hipotesis bahwa koordinasi dan kerjasama antara pasukan-pasukan Indonesia dan pasukan pembantu mereka terutama menjadi kuat setelah militer Indonesia menguasai sebagian besar Timor-Leste dan memulai pengkonsolidasian wilayah pendudukan mereka, dan kemudian juga pada tahun 1999 pada saat menjelang dan setelah masa Jajak Pendapat yang disponsori oleh PBB.

⁷ Untuk penjelasan yang lebih mendetil mengenai sifat lebih bersasarannya tindak penyiksaan dan penganiayaan dibandingkan dengan tindak penahanan, lihat bagian mengenai tiga tahapan kekerasan besar-besaran di Timor Leste di atas.

123. Sifat dan pola keterkaitan pelaku pertanggungjawaban untuk pelanggaran tercatat yang bersifat seksual dan yang menyangkut harta milik/ekonomi sangat berbeda dengan tindakan-tindakan yang tercatat untuk tindak penahanan, penyiksaan dan penganiayaan.

124. Proporsi yang tinggi dari pelanggaran seksual dikaitkan hanya dengan militer Indonesia saja, sedangkan proporsi yang jauh lebih rendah dari pelanggaran seksual dikaitkan dengan pasukan pendudukan Indonesia yang bertindak bersama dengan pasukan pembantu mereka. Tepatnya, 61,0% (520/853) dari pelanggaran seksual dikaitkan hanya dengan militer Indonesia dan polisi saja, 22,0% (188/853) dikaitkan dengan hanya pasukan pembantu mereka saja dan 10,3% (88/853) dikaitkan dengan tindakan bersama pasukan-pasukan tersebut. Seperti halnya dengan pelanggaran non-fatal lainnya, jumlah pelanggaran seksual yang dikaitkan hanya dengan militer Indonesia saja antara tahun 1975 dan 1998 adalah yang paling tinggi dibandingkan dengan pelanggaran yang sama yang dikaitkan dengan hanya pasukan pembantu mereka atau dengan tindakan bersama pasukan-pasukan tersebut. Sebaliknya untuk tahun 1999, mayoritas pelanggaran seksual (66,2% (94/142)) yang dilaporkan kepada Komisi hanya dikaitkan dengan pasukan pembantu mereka saja. Pola-pola lintas waktu ini diperlihatkan pada Bagan <gTS_7000M.pdf> dan <gTS_70004.pdf>.

[Masukkan Bagan <gTS_7000M.pdf> <gTS_70004.pdf> di sini]

125. 65,1% (2.673/4.105) dari pelanggaran-pelanggaran yang tercatat dalam hal hak milik/ekonomi yang terjadi pada tahun 1999 dikaitkan dengan pasukan pendudukan Indonesia dan/atau pasukan pembantu mereka, baik bertindak sendiri maupun bertindak bersama. Seperti yang bisa dilihat pada Bagan <gTS_8000M.pdf>, 70,2% (1.942/2.766) dari pelanggaran-pelanggaran yang tercatat dalam hal hak milik/ekonomi yang terjadi pada tahun 1999 dikaitkan hanya dengan pasukan pembantu mereka saja, 20,0% (553/2.766) dikaitkan dengan tindakan bersama pasukan-pasukan tersebut dan 6,4% (178/2.766) dikaitkan dengan hanya militer Indonesia dan polisi saja. Analisis kuantitatif Komisi sesuai dengan hipotesis bahwa hampir semua penghancuran harta milik dan ekonomi dilaksanakan pada tahun 1999 dan biasanya sebagian besar hanya dilakukan oleh para milisi saja dengan kolaborasi dari militer Indonesia dan polisi.

[Masukkan Bagan <gTS_8000M.pdf> di sini]

Variasi dalam pelanggaran non-fatal yang dilaporkan lintas wilayah

126. Data naratif Komisi tidak bisa digunakan untuk mengkaji secara langsung perbedaan skala pelanggaran antar wilayah dan distrik. Data berdasarkan sampel tidak acak hanya akan dapat mewakili keseluruhan skala kekerasan lintas wilayah sejauh para deponen yang memberi pernyataannya dapat mewakili populasi lokal mereka dan dipilih sesuai dengan proporsi kekerasan yang terjadi di masing-masing distrik. Seperti yang dipaparkan di atas, informasi naratif yang dikumpulkan oleh Komisi, Fokupers, dan Amnesty International semuanya mengandung sejumlah bias. Akibatnya, pola pelanggaran non-fatal di seluruh wilayah disampaikan dalam Bagian ini untuk memberi gambaran tentang proses-proses sosial pengumpulan data oleh Komisi, Fokupers, dan Amnesty International, dan untuk mengkaji apakah pola-pola yang dilaporkan di seluruh wilayah konsisten dengan analisis dan argumentasi kualitatif yang relevan.

[Masukkan Tabel VInTypDIST1M> di sini]

127. Bagan VInTypDIST1M memperlihatkan jumlah setiap pelanggaran per distrik yang dilaporkan dalam proses pengambilan pernyataan Komisi. Angka pelanggaran yang dilaporkan untuk Dili jauh lebih tinggi dibandingkan distrik lain manapun, yakni 14,0% (8.389/59.972) dari semua pelanggaran di seluruh negeri. Distrik-distrik lain dengan angka pelanggaran yang relatif tinggi adalah Ermera, Manufahi, Viqueque, dan Lautém. Di hampir semua distrik, kecuali

Oecusse, penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan adalah pelanggaran yang paling sering dilaporkan, berkisar antara 69,4% dan 82,7% dari seluruh pelanggaran yang dilaporkan di distrik-distrik. Di Oecusse, pelanggaran integritas fisik berjumlah 43,0% dari seluruh pelanggaran di distrik tersebut. Dibandingkan dengan distrik-distrik lain, di Oecusse, pelanggaran harta benda dan ekonomi dilaporkan dalam proporsinya yang lebih tinggi, yakni 30,8% (1.271/4.133) dari keseluruhan pelanggaran di distrik tersebut. Pelanggaran harta benda dan ekonomi di distrik-distrik yang lain dilaporkan lebih jarang – yakni rata-rata 7,4% (3.464/56.574) dari pelanggaran yang dilaporkan.

128. Walaupun pelanggaran atas integritas fisik yang dilaporkan kepada Komisi merupakan 61,5% (36.911/60.047) dari seluruh pelanggaran non-fatal yang tercatat, penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan tidak terdokumentasi dengan proporsi yang sama di setiap distrik, seperti yang tampak pada Bagan <gVtypeDisthrvd4006001000.pdf>. Dili, khususnya, memiliki proporsi penahanan lebih tinggi dibanding jumlah tindak penganiayaan dan penyiksaan yang didokumentasi. Sementara di Bobonaro, Ainaro, Aileu, Manatuto, Liquiça, dan Covalima tercatat proporsi penahanan yang lebih rendah dibanding proporsi penganiayaan dan penyiksaan. Data Komisi adalah sesuai dengan hipotesis bahwa kebijakan dan praktek penahanan dan penganiayaan fisik berbeda dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Analisis empiris Komisi secara khusus menemukan bahwa walaupun penahanan lebih sering terjadi di Dili, penganiayaan dan penyiksaan digunakan lebih jarang di sana dibanding di wilayah lain.

[Masukkan Bagan <gVtypeDisthrvd4006001000.pdf> di sini]

129. Pelanggaran berbasis seksual yang dicatat oleh Komisi mencapai 1,4% (853/59.972) dari seluruh pelanggaran yang dilaporkan. Namun, di Ermera, Ainaro, dan Lautém, Komisi menemukan proporsi pelanggaran seksual yang relatif lebih tinggi—masing-masing 3,3% (199/5.981), 2,7% (102/3.727), dan 2,1% (105/5.004) dari keseluruhan pelanggaran yang dilaporkan. Pelanggaran seksual dilaporkan lebih sedikit terjadi di Dili and Oecusse—masing-masing 0,3% (27/8.389) dan 0,1% (4/3.398) dari seluruh pelanggaran.

130. Jenis-jenis pelanggaran berbasis seksual beragam dari satu distrik ke yang lainnya, seperti yang ditunjukkan dalam Bagan <gVtypeDisthrvd800900700.pdf>. Dari semua pelanggaran seksual di seluruh Timor yang dicatat oleh Komisi, pemerkosaan mencapai 46,1% (393/853), kekerasan seksual yang lain 27,1% (231/853), dan perbudakan seksual 26,8% (229/853). Pemerkosaan mencakup proporsi yang lebih besar dari pelanggaran seksual di Aileu dan Bobonaro dibandingkan dengan rata-rata nasional: masing-masing 71,9% (23/32) dan 66,2% (45/68). Sementara itu di Manufahi dan Ainaro perbudakan seksual adalah bagian terbesar dari pelanggaran berbasis seksual dibandingkan dengan rata-rata nasional: masing-masing 39,1% (34/87) dan 39,2% (40/102). Sama halnya, kekerasan seksual yang lain mencapai 57,9% (11/19) dan 51,4% (54/105) dari semua pelanggaran seksual yang tercatat di Liquiça dan Lautém.

[MASUKKAN Bagan <gVtypeDisthrvd800900700.pdf> di sini]

Pelanggaran Non-Fatal lintas Ruang dan Waktu

131. Secara garis besar kekerasan di Timor-Leste terjadi dalam fase-fase tersendiri, seperti yang dibahas di atas. Namun, pola-pola pelanggaran non-fatal selama fase pertama dan terakhir konflik berbeda-beda dari daerah ke daerah seperti yang tampak pada Bagan <gpTS_regional5555.pdf>. Secara khusus, kekerasan yang berkaitan dengan invasi awal Indonesia dan konflik partai pada tahun 1975 lebih hebat di Wilayah-wilayah Barat dan Tengah dibandingkan daerah Wilayah Timur. Namun, dengan berlanjutnya pendudukan, pelanggaran

¹ 96,8% (1.230/1.271) dari pelanggaran harta benda di Oecusse dilaporkan terjadi pada tahun 1999. Lebih lanjut, 94,0% (3.194/3.398) dari pelanggaran yang dilaporkan di Oecusse terjadi tahun 1999. Karena itu tampak bahwa berbeda dengan distrik-distrik lain, pelanggaran di Oecusse hampir seluruhnya terjadi tahun 1999.

non-fatal yang dilaporkan di Wilayah Barat menurun dari tingkat awalnya yang tinggi pada tahun 1975 ke tingkat yang relatif rendah pada tahun 1980, sedangkan di Wilayah Tengah kekerasan juga menurun setelah periode invasi awal menjadi kira-kira setengah dari yang terjadi pada tahun 1975. Di Wilayah Timur tingkat kekerasan yang tercatat pada tahun 1975 hanyalah sekitar setengah dari angka absolut yang dilaporkan di Wilayah Barat dan Tengah. Akan tetapi, di seluruh penjuru Timor-Leste, selama akhir 1970-an dan awal 1980-an kekerasan berlanjut pada tingkat yang sama seperti yang terjadi pada tahun 1976 tanpa penurunan berarti hingga 1984. Sementara kekerasan pada masa awal invasi Indonesia tahun 1975 paling gencar terjadi di Wilayah Barat dan Tengah, setelah tahun 1976 fokus kekerasan non-fatal beralih ke Wilayah Timur.

132. Tanpa memperhitungkan kejadian Santa Cruz dan masa setelahnya pada tahun 1991 di Dili, kekerasan yang dilaporkan terjadi selama “tahun-tahun konsolidasi” dari 1984 hingga 1998 terjadi dalam bentuk kekerasan tingkat rendah yang sporadis di ketiga wilayah tersebut. Selama fase akhir konflik pada tahun 1999, 75,1% (9.494/12.634) dari pelanggaran non-fatal dilaporkan terjadi di Wilayah Barat. Data yang dimiliki Komisi sesuai dengan klaim yang menyatakan bahwa penduduk yang berada dekat dengan perbatasan Timor Barat dan Oecusse pada tahun 1999 menjadi sasaran kekerasan dalam tingkat yang lebih tinggi ketika milisi pro-otonomi dan militer Indonesia menarik diri ke Timor Barat.

[MASUKKAN Bagan <gpTS_regional5555.pdf> di sini]

Demografi Usia-Jenis Kelamin Korban untuk Pelanggaran Non-Fatal yang Dilaporkan

Pelaporan Tingkat Informasi Usia dan Jenis Kelamin Bagi Korban

133. Komisi mempelajari beberapa hipotesis yang dapat menentukan apakah korban dijadikan sasaran atas dasar umur dan jenis kelamin. Bagian ini menerangkan pola demografis umur-jenis kelamin yang terlihat jelas berbeda-beda untuk korban pelanggaran non-fatal yang dilaporkan. Analisis ini hanya mencakup korban-korban yang umur dan jenis kelaminnya pada saat pelanggaran diketahui.

134. Dari 60.047 pelanggaran non-fatal yang dilaporkan kepada Komisi, 34.047 (63,4%) pelanggaran memuat informasi umur yang pasti dari korban-korban pelanggaran non-fatal yang teridentifikasi. Sayangnya tidak ada cara untuk memastikan penyebaran usia yang tidak dilaporkan untuk data ini. Karena itu tidaklah mungkin untuk mengukur seberapa baik representasi penyebaran usia korban yang diketahui usianya untuk penyebaran usia keseluruhan korban yang dilaporkan.

135. Komisi menganggap bahwa seorang anak adalah siapa pun yang berumur di bawah 18 tahun. Definisi ini mengikuti definisi yang dinyatakan dalam Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak.⁶ Mayoritas pelanggaran non-fatal, 89,8% (30.574/34.047), yang dicatat oleh Komisi dimana usia korbannya diketahui terjadi pada korban dewasa. 10,2% (3.473/34.047) pelanggaran yang dicatat oleh Komisi diderita korban anak.

136. Dari 60.047 pelanggaran non-fatal yang dicatat oleh Komisi, 99,4% (59.715/60.047) dilakukan terhadap korban yang jenis kelaminnya diketahui. Dari pelanggaran-pelanggaran ini 14,0% (8.355/59.715) dilakukan terhadap perempuan dan 86,0% (51.360/59.715) dilakukan terhadap laki-laki. 25.476 korban (termasuk mereka yang tidak diketahui jenis kelaminnya) mengalami pelanggaran-pelanggaran berikut ini: dari seluruh korban tersebut 15,7% (4.002/25.476) adalah perempuan dan 83,6% (21.308/25.476) adalah laki-laki.

137. Komisi mencatat 3.473 pelanggaran terhadap anak-anak, yang mana 3.451 di antaranya menyebutkan informasi tentang jenis kelamin anak-anak tersebut. Dari pelanggaran-pelanggaran ini, 27,5% (950/3.451) dilakukan terhadap anak perempuan dan 72,5% (2.501/3.451) dilakukan

terhadap anak laki-laki. Terdapat 22 anak yang jenis kelaminnya tidak diketahui atau tidak dilaporkan oleh saksi. Dari 30.446 pelanggaran terhadap orang dewasa yang didokumentasi dimana jenis kelamin korban diketahui, 12,7% (3,870/30,446) adalah perempuan dan 87,3% adalah laki-laki. Dengan demikian, proporsi pelanggaran terhadap anak-anak perempuan yang didokumentasi lebih besar daripada proporsi pelanggaran terhadap perempuan dewasa yang didokumentasi. Oleh karena itu, baik korban dewasa maupun anak-anak cenderung adalah laki-laki. Dibanding dengan laki-laki, korban perempuan cenderung berusia lebih muda.

Analisis Korban Berdasarkan Jenis Kelamin

138. Jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan terhadap laki-laki dan perempuan secara substansial berbeda. Bagan <VictSex1M.rtf> dengan jelas menunjukkan bahwa perempuanlah yang paling banyak mengalami pelanggaran seksual: Komisi mencatat bahwa untuk setiap pelanggaran berbasis seksual terhadap laki-laki terjadi sepuluh pelanggaran terhadap perempuan. Sedangkan untuk setiap siksaan dan perekrutan paksa terhadap korban perempuan, Komisi mencatat sekitar 12 atau 13 tindak kekerasan dan perekrutan paksa dilakukan terhadap laki-laki. Jenis-jenis pelanggaran yang lain, contohnya ancaman, pelanggaran hak milik dan ekonomi, penganiayaan dan penahanan, dicatat dalam proporsi rata-rata sekitar 5.8 korban laki-laki untuk setiap korban perempuan.

[MASUKKAN Bagan <VictSex1M.rtf> di sini]

139. Dalam Bagan <VictYrSex1M.rtf>, pola-pola korban menurut jenis kelamin lintas waktu dianalisis. Ada variasi yang signifikan antara rasio korban laki-laki terhadap korban perempuan selama tahun-tahun konflik: rasio laki-laki terhadap perempuan bervariasi antara yang terendah 2,7 pada tahun 1981 hingga yang tertinggi 43,1 pada tahun 1991. Rasio laki-laki atas perempuan yang lebih tinggi daripada rasio rata-rata dicatat pada tahun 1975, 1987, dan 1999. Temuan-temuan ini sesuai dengan hipotesa bahwa banyak perempuan dibawa ke Ataúro tahun 1981, dan juga bahwa tindakan represif dari kekuatan militer Indonesia setelah kejadian Santa Cruz kebanyakan diarahkan kepada laki-laki.

[MASUKKAN Bagan <VictYrSex1M.rtf> di sini]

140. Meskipun perincian untuk tiap distrik menunjukkan lebih sedikit variasi rasio laki-laki atas perempuan lintas ruang daripada menurut lintas waktu, rasio yang lebih tinggi dari rata-rata tercatat di Liquiça (11,4), Oecusse (9,4), Aileu (8,3) dan Dili (8,2), sedangkan Lautém (3,7), Ainaro (4,5), dan Ermera (4,5) mencatat rasio laki-laki terhadap perempuan yang lebih rendah dari rata-rata. Temuan-temuan ini tampak pada Bagan <VictDistSex1M.rtf>.

[MASUKKAN Bagan <VictDistSex1M.rtf> di sini]

Analisis Korban Berdasarkan Umur

141. Bagian ini membahas usia korban berdasarkan jenis pelanggaran, waktu, dan tempat terjadinya pelanggaran.

142. Angka pelanggaran spesifik terhadap korban dewasa dan anak-anak tampak pada Bagan <VictAge1M.rtf>. Dalam hampir semua jenis pelanggaran yang dicatat Komisi, untuk setiap pelanggaran terhadap anak, terjadi sekitar 7-10 pelanggaran terhadap orang dewasa. Namun, proporsi pelanggaran seksual terhadap korban dewasa dibandingkan korban anak-anak secara substansial lebih rendah daripada jenis-jenis pelanggaran yang lain: untuk setiap pelanggaran seksual terhadap anak yang dicatat Komisi, terjadi 3,4 pelanggaran terhadap orang dewasa. Karena itu, rasio dewasa terhadap anak untuk pelanggaran seksual adalah sekitar 2,5 kali lebih rendah daripada pelanggaran non-fatal yang lain.

[MASUKKAN Bagan <VictAge1M.rtf> di sini]

143. Bagan <VictYrAge1M.rtf> menunjukkan jumlah pelanggaran terhadap orang dewasa dan anak-anak berdasarkan tahun. Data Komisi tentang pelanggaran non-fatal secara umum menunjukkan peningkatan dalam rasio orang dewasa terhadap anak-anak selama masa tersebut, yakni bahwa jumlah korban dewasa dibanding korban anak-anak lebih besar di penghujung konflik. Namun, karena secara substansial cukup banyak korban dari masa awal konflik tidak tercatat umurnya, sulit untuk membuat perbandingan antara rasio korban dewasa atas anak pada periode awal dan rasio pada akhir konflik tersebut.

[MASUKKAN Bagan <VictYrAge1M.rtf> di sini]

144. Komisi mencatat rata-rata 8,8 korban dewasa untuk setiap satu korban anak. Namun demikian, ada variasi dalam rasio korban dewasa terhadap anak antar distrik, seperti yang tampak pada Bagan <VictDistAge1M.rtf>. Di Bobonaro jumlah korban anak yang tercatat relatif tinggi, seperti yang ditunjukkan oleh rasio dewasa-anak 4,8, sementara di Covalima, Indonesia, dan Oecusse dicatat rasio korban dewasa-anak jelas lebih besar dari rata-rata.

[MASUKKAN Bagan <VictDistAge1M.rtf> di sini]

Analisis Korban Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

145. Bagian ini menggambarkan distribusi korban berdasarkan baik umur maupun jenis kelamin. Analisis ini ditunjukkan dalam jumlah dan perbandingan berdasarkan populasi dari tiap jenis pelanggaran. Perbandingan berdasarkan penduduk dihitung menggunakan hasil Sensus Penduduk Indonesia tahun 1990.⁷

146. Bagan <g4910000400.pdf>, <g4910000600.pdf>, dan <g49100001000.pdf> menunjukkan jumlah pelanggaran berdasarkan umur dan jenis kelamin untuk penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan. Jumlah distribusi umur-jenis kelamin yang didokumentasi untuk ketiga jenis pelanggaran ini sungguh serupa, dan masing-masing menunjukkan bahwa kelompok korban yang paling banyak tercatat untuk jenis-jenis pelanggaran ini adalah laki-laki muda dalam usia dinas militer. Sangat sedikit tindak penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan yang tercatat dialami oleh korban perempuan.

[MASUKKAN Bagan <g21210000400.pdf>, <g21210000600.pdf>, <g212100001000.pdf> di sini]

147. Ketika beralih dari hitungan pelanggaran sederhana ke hitungan pelanggaran berbasis penduduk, terlihat bahwa relatif terhadap keseluruhan penduduk Timor, laki-laki paruh baya mengalami tingkat tertinggi bentuk-bentuk kekerasan ini. Lebih jauh lagi, lelaki tua di atas 70 tahun mengalami bentuk-bentuk kekerasan ini pada tingkat yang serupa dengan yang dialami lelaki paruh baya. Pola-pola ini tampak pada Bagan <g4910000400.pdf>, <g4910000600.pdf>, and <g49100001000.pdf>.

[MASUKKAN Bagan <g4910000400.pdf>, <g4910000600.pdf>, <g49100001000.pdf> di sini]

148. Penyebaran umur-jenis kelamin para korban pelanggaran seksual yang dicatat oleh Komisi secara substansial berbeda dari penyebaran umur-jenis kelamin pelanggaran integritas fisik. Hal ini tampak pada <g21210000700.pdf> dan <g4910000700.pdf>. Lebih lanjut, ada perbedaan-perbedaan nyata dalam penyebaran umur-jenis kelamin untuk berbagai bentuk pelanggaran seksual. Komisi mendokumentasi pemerkosaan perempuan dalam semua kategori umur di bawah 65 tahun. Namun, frekuensi tertinggi pemerkosaan yang tercatat dan tingkat

⁷ Rata-rata, perbandingan korban orang dewasa terhadap anak-anak tercatat oleh Komisi adalah 17.3 di Covalima, 15.3 di Indonesia dan 14.1 di Oecusse.

tertinggi pemerkosaan berdasarkan populasi adalah pada perempuan muda dalam usia reproduksi. Perempuan berusia 15-24 tahun tampaknya telah menjadi sub-populasi yang beresiko tertinggi mengalami pemerkosaan.

[MASUKKAN Bagan <g21210000700.pdf> and <g4910000700.pdf> di sini]

149. Di samping itu, para perempuan berusia antara 10 dan 44 dicatat sebagai korban perbudakan seksual. Dari korban-korban ini perempuan antara usia 20 dan 24 tahun adalah yang jumlahnya paling banyak dan tingkatnya paling tinggi dalam hal perbudakan seksual. Seperti halnya pemerkosaan, tidak ada kasus perbudakan seksual terhadap laki-laki yang didokumentasi oleh Komisi.

[MASUKKAN Bagan <g21210000800.pdf> and <g4910000800.pdf> di sini]

150. Namun demikian Komisi mencatat kasus-kasus kekerasan seksual lain baik terhadap laki-laki maupun terhadap perempuan. Bentuk kekerasan ini paling umum terjadi pada laki-laki dalam kelompok umur 20-24 dan 35-39 dan pada perempuan antara umur 15 dan 29 tahun.

[MASUKKAN Bagan <g21210000900.pdf> and <g4910000900.pdf> di sini]

151. Oleh karena itu, analisis kuantitatif Komisi menunjukkan bahwa mayoritas yang sangat besar dari korban pelanggaran seksual adalah perempuan muda usia. Lebih lanjut lagi, pemerkosaan dan perbudakan seksual yang dilaporkan hanya dialami oleh perempuan.

Perbandingan antara Pemantauan Hak Asasi Manusia Retrospektif dan Pemantauan dalam Masa yang Sama

152. Bagian ini membandingkan cakupan dan pola pelanggaran non-fatal yang dilaporkan oleh Komisi dengan tingkat dan pola pelanggaran non-fatal yang dilaporkan oleh Amnesty International. Bagian ini menggambarkan betapa terisolasinya Timor-Leste saat itu dari komunitas internasional dan kurangnya informasi serta terbatasnya pengetahuan mengenai pelanggaran di Timor selama periode awal serta yang paling keras dari seluruh konflik.

153. Seperti yang dibahas di atas, akses ke wilayah Timor-Leste selama masa pendudukan Indonesia sangat terbatas, khususnya bagi kelompok-kelompok hak asasi manusia internasional seperti Amnesty International (AI). Sebagai akibatnya, cakupan geografis laporan-laporan Amnesty International pada masa itu cukup banyak berbeda dengan apa yang dilaporkan kepada Komisi dan Fokupers dalam proses pengambilan pernyataan retrospektif (di kemudian hari) untuk masa yang sama.

154. 35,6% (1.953/5.479) dari pelanggaran non-fatal yang dicatat oleh Amnesty International tidak mengandung informasi tentang tempat terjadinya masing-masing pelanggaran, seperti yang tampak pada Bagan <DistDatasourceM.rtf>. Hal ini tampaknya sesuai dengan arus informasi yang terbatas yang keluar dari Timor-Leste selama masa pendudukan (khususnya dari desa-desa dan kecamatan-kecamatan terpencil di pegunungan). Lebih lanjut, sifat pelaporan kepada komunitas internasional pada masa itu lebih berfokus pada laporan tentang situasi hak asasi manusia di Timor-Leste bukan pada penggambaran kondisi yang berbeda dari berbagai wilayah di Timor-Leste. Namun, 32,3% (1.770/5.479) dari keseluruhan pelanggaran non-fatal yang dilaporkan oleh Amnesty International terjadi di Dili—suatu proporsi yang lebih tinggi daripada yang dilaporkan proyek retrospektif CAVR dan Fokupers, yang menyatakan bahwa pelanggaran di Dili mencapai 14,0% (8.389/59.972) dan 4,6% (36/788) .

[MASUKKAN Bagan <DistDatasourceM.rtf> di sini]

155. Seperti yang diisyaratkan dalam Bagan <gcavrai400.pdf>, laporan-laporan Amnesty International yang dibuat dekat dengan masa kejadian menunjukkan tiga gelombang penahanan yang jelas atas individu yang diketahui identitasnya—yakni yang terjadi pada tahun 1985 (terhadap 402 orang), tahun 1989-93 (891 orang), dan tahun 1994-99 (811 orang). Sedangkan laporan retrospektif yang diberikan kepada Komisi menyebutkan jumlah terbanyak penahanan sewenang-wenang terjadi pada tahun 1999 dan sekitar tahun 1975-84. Lebih lanjut lagi, laporan-laporan ini menyatakan bahwa sekurang-kurangnya 2.779 penahanan terjadi pada tahun 1999 dan sedikitnya 16.509 penahanan terjadi antara tahun 1975 dan 1984. Perbandingan-perbandingan ini adalah bukti tentang sulitnya mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Leste selama masa pendudukan Indonesia. Secara khusus, Bagan <gcavrai400.pdf> menunjukkan bahwa meskipun kelompok-kelompok internasional hak asasi manusia, seperti Amnesty International, secara seksama mencatat situasi hak asasi manusia di Timor-Leste sepanjang dasawarsa 1980-an dan 1990-an, pelaporan yang dilakukan jauh lebih rendah daripada skala keseluruhan kekerasan non-fatal yang sebenarnya pada waktu itu. Bagan <gcavrai400.pdf> juga menunjukkan perbedaan yang mencolok antara pemahaman yang dapat diperoleh dari laporan retrospektif dibanding dengan laporan dibuat pada masa kejadiannya mengenai tahun-tahun awal invasi: Dari seluruh pelanggaran yang didokumentasi oleh Amnesty International, 10,9% (734/6,717) terjadi pada tahun-tahun awal invasi antara 1975 dan 1984. Sedangkan dari pelanggaran yang dilaporkan kepada Komisi, 64,0% (47,390/74,024) terjadi antara tahun 1975 dan 1984. Mengingat bahwa pelaporan kepada Komisi juga telah mengalami 'hilang ingatan' (karena sebagian orang yang dapat melaporkan pelanggaran di tahun-tahun awal invasi telah meninggal selama tahun 1980-an dan '90-an), maka di dalam data narasi pernyataan yang ada pada Komisipun telah mengalami bias waktu sehingga mengurangi laporan pelanggaran yang terjadi di tahun-tahun awal mandat Komisi. Komisi menyimpulkan bahwa pelanggaran yang terjadi antara tahun 1975 sampai 1984 sangat kurang dilaporkan pada masa kejadiannya ketika dibanding dengan pola dan besarnya pelanggaran secara umum. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya akses kepada Timor Leste.

[MASUKKAN Bagan <gcavrai400.pdf> di sini]

Sifat Pelanggaran terhadap Individu dan Kelompok

156. Sebagian pelanggaran non-fatal yang dilaporkan kepada Komisi dilakukan terhadap seorang individu, sementara sebagian pelanggaran lainnya dilaporkan dilakukan terhadap lebih dari satu orang pada waktu yang sama. Bagan <ggpsize400.pdf>, <ggpsize600.pdf>, dan <ggpsize1000.pdf> memperlihatkan distribusi pelanggaran sesuai besar kelompok korban, untuk penyiksaan, penahanan, dan penganiayaan.

157. Sifat dari pelanggaran yang dilakukan terhadap satu orang cenderung berbeda dengan sifat pelanggaran terhadap kelompok. Seperti tampak pada Bagan <ggpsize400.pdf> dan Bagan <ggpsize1000.pdf>, penahanan sewenang-wenang dan penganiayaan lebih umum dilaporkan terjadi terhadap individu atau kelompok yang terdiri dari 50 orang atau lebih – sedangkan lebih sedikit orang pernah ditahan atau mengalami penganiayaan dalam kelompok yang terdiri dari 2-49 orang. Hampir semua tindakan penyiksaan dilaporkan dilakukan terhadap korban individu satu per satu. Temuan empiris ini sesuai dengan hipotesis bahwa penyiksaan adalah bentuk penindasan yang digunakan dengan lebih bersasaran (lihat Bab 7.4: Penahan, Penyiksaan dan Penganiayaan).

[Masukkan grafik <ggpsize400.pdf>, <ggpsize600.pdf>, dan <ggpsize1000.pdf> di sini]

^{*} Seperti halnya kasus pelanggaran terhadap korban perseorangan, pelanggaran terhadap korban dalam kelompok bisa dilaporkan oleh lebih dari satu orang deponen. Komisi mencocokkan catatan korban berkelompok untuk mengidentifikasi laporan yang dilaporkan lebih dari satu kali untuk pelanggaran yang sama dan korban disebutkan oleh beberapa pernyataan yang berbeda-beda. Metode yang digunakan untuk pencocokan ini diuraikan dalam Lampiran Statistik .

158. Bagan <gpTS_groupindiv400.pdf> memperlihatkan bahwa dalam pernyataan-pernyataan yang diberikan kepada Komisi, penahanan korban individu dan korban kelompok berkorelasi positif. Ketika penahanan yang dilaporkan terhadap korban individu meningkat, begitu pula penahanan yang dilaporkan terhadap korban kelompok. Lebih lanjut, ada perbedaan substansial antara tingkat penahanan individu dan penahanan kelompok yang dilaporkan. Antara 1974 dan 1984 penahanan yang dilaporkan terhadap korban kelompok hampir selalu lebih tinggi daripada penahanan atas korban individu.[†] Ada dua kemungkinan penjelasan untuk pola ini, yakni:

- Polanya bisa mencerminkan praktek-praktek penahanan militer Indonesia yang semakin bersasaran selama masa pendudukan (dan karena itu penggunaan, dan kemampuan mereka yang semakin meningkat pada dasawarsa 1980-an dan 1990-an untuk mentargetkan individu yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan gerakan perlawanan), atau
- Para deponen CAVR mungkin lebih banyak mengalami kesulitan khususnya dalam mengidentifikasi tahanan-tahanan individual yang ditahan pada masa awal pendudukan dibandingkan pada masa akhir. Akibatnya, pelaporan para deponen mengenai periode awal lebih banyak menyebutkan penahanan terhadap kelompok-kelompok tanpa nama.

159. Namun, agaknya pola penahanan yang dilaporkan tidak dibentuk oleh daya ingat para deponen, karena tidak satu pun jenis pelanggaran lain (yaitu penyiksaan, penganiayaan, ancaman, dan pelanggaran harta benda) memperlihatkan bukti dari bias ingatan seperti ini – seperti diperlihatkan oleh Bagan <gpTS_groupindiv600.pdf>, <gpTS_groupindiv1000.pdf>, <gpTS_groupindiv1900.pdf>, dan <gpTS_groupindiv7000.pdf>.[‡] Karena itu bukti statistik tentang penahanan yang didokumentasikan oleh Komisi sesuai dengan hipotesis bahwa praktek-praktek penahanan militer Indonesia berubah dari fokus pada korban individu dan kelompok pada tahun-tahun dari 1977 sampai 1984 menuju ke strategi lebih bersasaran yang berfokus pada tahanan individu mulai 1985 sampai 1999.

160. Bukti statistik Komisi juga memperlihatkan korelasi positif antara tindakan penyiksaan yang dilakukan terhadap korban kelompok dan korban individu sepanjang waktu.[§] Lebih jauh, seperti diperlihatkan dalam Bagan <gp_TSgroupindiv600.pdf>, puncak-puncak tindakan penyiksaan yang dilaporkan terhadap korban kelompok terjadi pada tahun 1975, 1982, dan 1999. Oleh karena itu, data Komisi menengarai bahwa jumlah terbesar kekerasan terhadap kelompok terjadi dengan cara yang sangat terkonsentrasi pada saat-saat tertentu.

[Masukkan Bagan <gp_TSgroupindiv600.pdf> di sini]

Penggunaan Penahanan dan Sifat dari Pelanggaran yang Dilakukan Selama Masa Penahanan

161. Sepanjang masa pendudukan Indonesia atas Timor-Leste penahanan sewenang-wenang dan pemindahan paksa dilakukan di seluruh wilayah ini. Karena fenomena pemindahan dibahas dalam di atas, bagian ini memusatkan pembahasan pada sifat dan penggunaan penahanan dalam periode mandat Komisi.

[†] Koefisien korelasinya adalah 0,74.

[‡] Satu-satunya tahun dalam periode itu di mana penahanan terhadap korban kelompok lebih rendah daripada penahanan yang dilaporkan terhadap korban individu adalah 1983.

[‡] Lihat pula Bagan <gpTS_groupindiv600.pdf>, <gpTS_groupindiv1000.pdf>, <gpTS_groupindiv1900.pdf>, dan <gpTS_groupindiv7000.pdf> dalam Lampiran Statistik.

[§] Koefisien korelasinya adalah 0,69.

162. Secara umum tindak penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan yang dilaporkan tampak berkorelasi positif. Penahanan sering terjadi dalam kejadian yang sama dengan penganiayaan fisik di seluruh wilayah. Ini tergambar dalam Bagan <gVTypeDisthrvd4006001000.pdf>. Jumlah keseluruhan tindak penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan yang dilaporkan terjadi di Dili lebih tinggi daripada di distrik lain manapun karena pusat-pusat penahanan utama di Ataúro dan di Comarca (Penjara) Balide keduanya terletak di dalam wilayah Dili.

[Masukkan <gVTypeDisthrvd4006001000.pdf> di sini]

163. Selanjutnya, penahanan dan penyiksaan yang dilaporkan sepanjang waktu sangat berkorelasi positif. Bagan <g1stlM400600.pdf> juga memperlihatkan bahwa kekerasan menjadi semakin terkoordinasi dan tindak penyiksaan yang dilaporkan skalanya meningkat sepanjang waktu (antara akhir dasawarsa 1970-an dan pertengahan dasawarsa 1980-an) dibandingkan dengan jumlah penahanan yang dilaporkan. Pola ini dapat mencerminkan meningkatnya kemampuan pelaku untuk mengarahkan sasaran pada korban tertentu ketika pendudukan Indonesia beranjak dari tahap awal pada akhir dasawarsa 1970-an dan awal 1980-an menuju tahap konsolidasi mulai 1985. Pada tahun-tahun awal invasi ada sekitar tiga kasus penahanan untuk setiap kasus penyiksaan yang dilaporkan. Setelah 1985, kedua pelanggaran tersebut tampak lebih erat terkait satu sama lain, dengan jumlah penahanan yang dilaporkan kurang lebih sama dengan tindak penyiksaan yang dilaporkan setiap tahunnya. Pola statistik yang terjadi memperlihatkan bahwa sepanjang waktu (dan khususnya setelah 1984) praktek penahanan sewenang-wenang menjadi lebih bersasaran dan semakin umum digunakan bersama dengan tindak penyiksaan.

[MASUKKAN <g1stlM400600.pdf> di sini]

Pola-pola Pelanggaran yang Dilakukan Selama Masa Penahanan

164. Dari semua pelanggaran yang dilaporkan kepada Komisi selama proses pengambilan pernyataan naratif, penahanan adalah yang paling sering disebutkan—yakni 42.3% (25,383/60,047) dari seluruh pelanggaran non-fatal yang tercatat. Namun, penahanan seringkali dikombinasikan dengan bentuk-bentuk penganiayaan yang lain: dari jenis-jenis penganiayaan fisik utama yang dilaporkan kepada Komisi, sedikitnya 28.3% (7,174/25,383) dilakukan ketika korban berada dalam penahanan. Temuan empiris ini menunjukkan bahwa selama penahanan para korban seringkali rentan terhadap bentuk-bentuk penganiayaan fisik yang lain. Bagian ini menelusuri pola-pola dari jenis penganiayaan fisik non-fatal yang dilakukan selama masa penahanan dan yang dilakukan selama korban tidak ditahan.

165. Informasi yang dimiliki Komisi mengenai penahanan sering kali mengandung informasi lokasi dan/atau waktu yang kurang jelas. Secara khusus, 33,9% (20.334/60.047) dari pelanggaran non-fatal tidak memiliki informasi bulan dan tanggal terjadinya pelanggaran, sementara 52,9% (31.739/60.047) tidak memiliki informasi hari (tanggal) terjadinya pelanggaran. 2,3% (1.379/60.047) dari pelanggaran non-fatal tidak memiliki informasi sub-distrik tempat terjadinya pelanggaran, sementara 31,2% (18.722/60.047) dari pelanggaran non-fatal tidak memiliki informasi *suco* tempat terjadinya pelanggaran. Oleh karena itu, analisis berikut ini mengenai penganiayaan fisik dan kaitannya dengan status korban sebagai tahanan dibatasi oleh kurangnya informasi mengenai tanggal dan lokasi dalam data yang dilaporkan.

166. Beberapa bentuk penganiayaan fisik dilaporkan lebih sering terjadi dalam penahanan daripada yang lainnya. Bagan <tStdlnDetnVlnsx_vln_1.rtf> secara khusus menunjukkan bahwa

¹ Koefisien korelasi antara penyiksaan dan penahanan yang dilaporkan per tahun antara 1974 dan 1999 adalah 0,81.

pelanggaran yang dilaporkan paling sering terjadi dalam masa-masa penahanan yang diketahui adalah penyiksaan (38,4%, 4.267/9.094), penganiayaan (33,2%, 27.998/9.094) dan pengancaman (21,3%, 634/9.094). Selanjutnya, penyiksaan dan penganiayaan lebih jarang dilaporkan di antara para korban yang tidak pernah mengalami penahanan: dari keseluruhan penyiksaan yang didokumentasi oleh Komisi, 16,4% (1.820/11.123) diderita oleh para korban yang tidak pernah mengalami penahanan. Dari tindak penganiayaan yang didokumentasi Komisi, 26,4% (2.227/8.436) dialami oleh korban-korban yang tidak pernah mengalami penahanan. Ini mengisyaratkan semakin meningkatnya kerentanan para korban yang ada dalam penahanan terhadap penyiksaan dan penganiayaan.

167. Data statistik sendiri tidak dapat menjelaskan apakah kaitan antara penahanan dan penganiayaan fisik ini adalah bagian dari kebijakan resmi oleh para pelaku untuk menggabungkan penganiayaan fisik dengan penahanan sewenang-wenang, atau apakah korelasi ini mencerminkan perilaku oportunistik militer, polisi dan pejabat lainnya. Akan tetapi, penelitian kualitatif dan historis Komisi cukup informatif dalam hal ini. Penelitian kualitatif Komisi telah mengidentifikasi bukti mengenai kebijakan dan praktek yang mendorong penggunaan penahanan dan cara-cara interogasi khusus (lihat Bab 7.4: Penahanan, Penyiksaan dan Penganiayaan).

[Masukkan Bagan <tStdInDetnVInsx_vln_1.rtf> di sini]

168. Kasus-kasus yang didokumentasikan oleh Komisi menunjukkan perubahan dalam hubungan antara pelanggaran non-fatal dan penahanan seiring dengan masuknya konflik ke fase yang terakhir. Sebagaimana yang terlihat dalam Bagan <tStdInDetnVInphase>, 56.7% (5592/9855) dari pelanggaran non-fatal pada tahun 1999 dilakukan terhadap korban yang tidak berada dalam penahanan dan tidak pernah ditahan sebelumnya. Pada tahun 1999 proporsi pelanggaran non-fatal yang dilaporkan yang dilakukan di luar tempat-tempat penahanan adalah lebih dari dua kali lipat proporsi pada dua fase sebelumnya. Dengan demikian, tampak bahwa dalam dua fase pertama dari konflik, penggunaan penahanan memiliki hubungan yang lebih kuat dengan pelanggaran non-fatal yang lain.*

[Masukkan Bagan <tStdInDetnVInphase> di sini]

169. Dari pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan selama periode penahanan yang diketahui, 16.5% (505/9094) terjadi di Dili. Dengan demikian, dibandingkan dengan distrik-distrik yang lain, proporsi yang cukup besar dari pelanggaran yang dilakukan dalam penahanan terjadi di Dili. Sementara 42.8% (695/1,623) dari pelanggaran di Liquiça dilaporkan terjadi dalam masa-masa penahanan, dan 41.5% (886/2,135) di Covalima, angka untuk Dili adalah 40.3% (1,504/3,731). Sementara itu, dari pelanggaran non-fatal yang dialami orang-orang di Oecusse dan Indonesia, masing-masing 76.0% (2,209/2897) dan 73.2% (390/533) dialami oleh korban-korban yang tidak pernah ditahan sebelumnya. Sehingga, distrik-distrik yang melaporkan proporsi penyiksaan dan penganiayaan yang relatif lebih tinggi, juga cenderung melaporkan lebih banyak pelanggaran selama penahanan.

[Masukkan Bagan <tStdInDetnVInsx_lo_dist> di sini]

170. Kasus penahanan sebagian besar dialami oleh laki-laki, yakni 85,6% (21.273/25.383) dari keseluruhan kasus. Dibandingkan korban perempuan, laki-laki dua kali lebih mungkin untuk mengalami pelanggaran lainnya selama masa penahanan. Seperti yang tampak pada Bagan <tStdInDetnVInsx_sex>, dari keseluruhan korban penahanan laki-laki, setidaknya 28,1%

* Sulit untuk membuat temuan yang tuntas mengenai skala relatif pelanggaran-pelanggaran non-fatal yang dilakukan dalam penahanan pada Fase 1 dan 2 dari konflik, mengingat 50,8% (8.006/15.772) dari kasus penahanan selama Fase 1 dan 33,5% (3.011/8.998) dari penahanan selama Fase 2 tidak memiliki informasi tanggal yang cukup jelas untuk dapat menentukan apakah penahanan-penahanan tersebut berhubungan dengan pelanggaran lain yang dialami korban

(8.323/29.599) mengalami pelanggaran non-fatal yang lain, dibandingkan dengan 14,8% (716/4.833) dari perempuan yang mengalami pelanggaran lain selama penahanan.

[\[Masukkan Bagan <tStdInDetnVInsx_sex> di sini\]](#)

171. Menurut data pelanggaran non-fatal yang didokumentasi oleh Komisi, orang-orang dari kelompok umur yang berbeda mengalami tingkat penganiayaan yang berbeda selama dalam penahanan. Secara khusus, dari korban-korban yang menderita pelanggaran non-fatal yang diketahui selama masa penahanan, 55,5% (5.044/9.094) adalah orang dewasa yang muda atau berusia paruh baya (yakni, orang-orang antara 15 sampai 49). Anak-anak dan orang-orang yang lebih tua ditahan jauh lebih jarang, dan jika ditahan, mereka mengalami tingkat penganiayaan yang jauh lebih rendah.

[\[Masukkan Bagan <tStdInDetnVInsx_victage_grp> di sini\]](#)

Pola-pola Statistik yang Dilaporkan tentang Penahanan di Atauro

172. Sementara penahanan sewenang-wenang digunakan sepanjang periode konflik di Timor-Leste, penahanan di Pulau Atauro dilaporkan kebanyakan terjadi antara tahun 1980 dan 1984. Hal ini sesuai dengan informasi yang dikumpulkan oleh Komisi secara langsung melalui proses pengambilan pernyataan dan dalam laporan-laporan sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber oleh Amnesty International. Akan tetapi, terdapat perbedaan yang cukup jelas antara kedua sumber data ini. Sumber-sumber yang dikumpulkan oleh Amnesty International mengisyaratkan bahwa populasi tahanan di Atauro meningkat dari sekitar 500 pada pertengahan 1980 menjadi kira-kira 4.000 pada bulan September 1982 kemudian menurun menjadi sekitar 1.500 pada Oktober 1984, seperti yang tampak pada Bagan <gai400atauro.pdf>.

[\[Masukkan Bagan gai400atauro.pdf> di sini\]](#)

173. Menurut data Komisi, penahanan yang dilaporkan di Atauro memuncak pada 446 tahanan pada tahun 1982, seperti yang terlihat pada Bagan <gTSVInslnAtauroM400.pdf>. Mengingat data Amnesty International dikumpulkan dari banyak cerita saksi mata, termasuk Komite Palang Merah Internasional, pejabat pemerintah Australia, dan dari catatan administrasi Indonesia, data Komisi yang dilaporkan kemungkinan berada jauh di bawah angka penahanan sebenarnya di Atauro. Akan tetapi, baik data Amnesty International maupun yang dari Komisi memastikan bahwa sejumlah besar orang pernah ditahan di Pulau Atauro pada awal tahun 1980-an.

[\[Masukkan Bagan <gTSVInslnAtauroM400.pdf> di sini\]](#)

Pola pelanggaran menurut afiliasi politik korban yang dilaporkan

174. Sejumlah hipotesis yang dibahas oleh Komisi bertanya apakah kampanye sistematis dan bersasaran didasarkan pada afiliasi politik korban. Bagian ini akan menerangkan cakupan dan pola pelanggaran yang dilaporkan terhadap penduduk sipil, pejuang bersenjata Gerakan Perlawanan serta aktifis politik.

175. 88,7% (68.943/77.748) dari pelanggaran non-fatal yang dilaporkan kepada Komisi adalah pelanggaran terhadap penduduk sipil, termasuk penduduk sipil yang tidak diketahui apakah mereka mempunyai afiliasi politik maupun penduduk sipil yang secara formal memang anggota dari suatu kelompok pro-kemerdekaan atau partai politik, seperti yang terlihat pada Bagan <gVinstM5000.pdf>.

[\[Masukkan Bagan <gVinstM5000.pdf> di sini\]](#)

176. Pada waktu gerakan pro-kemerdekaan berkembang makin luas pada tahun 1990an, jumlah penduduk sipil yang berafiliasi pro-kemerdekaan yang mengalami pelanggaran non-fatal makin meningkat pula, seperti yang dapat kita lihat pada Bagan <gVinst15000.pdf>, <gVinst25000.pdf>, <gVinst35000.pdf>, dan <gVinst45000.pdf>.

[Masukan Bagan <gVinst15000.pdf>, <gVinst25000.pdf>., <gVinst35000.pdf>, dan <gVinst45000.pdf> di sini]

177. Untuk jenis pelanggaran non-fatal utama (penahanan, penyiksaan, penganiayaan, kerja paksa, ancaman dan pelanggaran hak milik/ekonomi), tidak ada perbedaan penting dalam jumlah yang tercatat mengenai korban dengan afiliasi politik/sosial, seperti yang tampak pada Bagan <gVinstM400>, <gVinstM600>, <gVinst1000> dan <gVinst80000>: penduduk yang tidak diketahui afiliasi politiknya terhitung antara 40% sampai 48% dari korban yang tercatat, sebaliknya orang-orang yang berafiliasi pro-kemerdekaan terhitung antara 43% sampai 55% dari pelanggaran yang tercatat. Untuk pelanggaran seksual, penduduk sipil yang tidak diketahui afiliasi politiknya berjumlah sedikit lebih tinggi (56%, 441/770, dari pelanggaran seksual) daripada penduduk sipil yang diketahui ada hubungannya dengan kelompok pro-kemerdekaan dan partai-partai (43,1%, 427/770).

[Masukan Bagan <gVinstM400>, <gVinstM600>, <gVinst1000> dan <gVinst80000> di sini]

6.4 Studi kasus Mauchiga: suatu analisis kuantitatif pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama operasi menumpas Perlawanan

6.4.1 Pendahuluan

178. Bagian ini menyajikan sebuah studi kasus secara terperinci mengenai sifat dan pola pelanggaran yang dialami oleh penduduk Mauchiga (Hatu Builico, Ainaro) pada awal tahun 1980-an. Kasus studi ini dibuat dalam bentuk analisis statistik deskriptif yang didasarkan pada data yang dikumpulkan oleh dua orang pemimpin desa Mauchiga.

6.4.2 Latar belakang usaha pendokumentasian

179. Selama 18 tahun pemimpin-pemimpin desa Mauchiga mencatat pemindahan, penahanan dan pembunuhan yang terjadi karena operasi penumpasan Tentara Nasional Indonesia sehubungan dengan serangan yang dilakukan oleh Gerakan Perlawanan di wilayah tersebut pada bulan Agustus 1982. Proyek Pendokumentasian Mauchiga dirampungkan pada bulan Agustus 2004 ketika para pemimpin desa menyerahkan daftar tabel yang disusun dari wawancara naratif mereka, kepada Komisi pada waktu diadakan acara dengar pendapat dengan masyarakat oleh Komisi di Mauchiga.

180. Tujuan proyek tersebut adalah mengembangkan pendataan sejarah yang teliti dari lingkup, pola, kecenderungan dan sifat pelanggaran-pelanggaran yang dialami oleh anggota masyarakat Mauchiga pada awal tahun 1980-an. Para deponen diundang dan dianjurkan untuk berbicara mengenai pemindahan, penangkapan atau pelanggaran fatal yang dialami oleh siapa saja yang mereka kenal yang berhubungan dengan pemberontakan pada bulan Agustus 1982 (*levantamento*).

^{*} Namun, perlu dicatat bahwa hanya 87 pernyataan yang dikumpulkan di kamp pengungsian Timor Barat, dan proses sosialisasi Komisi berdasarkan distrik sering terjadi setelah bekerjasama dengan pejabat lokal. Sebagai akibatnya, orang-orang yang mempunyai afiliasi politik pro-otonomi mungkin saja kurang terwakili pada proses pengambilan pernyataan Komisi.

6.4.3 Batasan-batasan data

181. Data yang mendasari studi kasus ini dikumpulkan melalui sampel non-acak (sampel kemudahan) dari orang-orang yang ingin melaporkan dan membagi pengalaman mereka mengenai pelanggaran hak asasi manusia (yaitu pemindahan, penahanan dan penangkapan dan kematian yang berkaitan dengan konflik tersebut) yang ada hubungannya dengan pemberontakan Agustus 1982 dan penumpasan gerakan Perlawanan. Abilio dos Santos dan Olga da Silva mengumpulkan data ini dalam dua tahapan yang terpisah. Tahap pertama pengumpulan data, dari Februari 1986 sampai dengan April 2003, Abilio dos Santos dan Olga da Silva secara berkala melakukan wawancara naratif di berbagai kampung (aldeia) di desa Mauchiga. Selama melakukan pengumpulan dan pendokumentasian data, kedua orang itu mengunjungi aldeia-aldeia berikut: Mauchiga, Hatuquero, Goulora, Leotelo-1 dan Leotelo-2. Deponen-deponen diseleksi berdasarkan pada jaringan sosial para pewawancara dan juga pada referensi orang yang diwawancarai. Tahap kedua pengumpulan data, dari Mei 2003 sampai Juli 2004, terdiri atas penyusunan daftar-daftar korban penahanan, pemindahan, dan kematian yang berkaitan dengan konflik. Selama tahap kedua ini, sejumlah responden yang pernah memberikan keterangan pada tahap pertama pengumpulan data, diwawancarai kembali untuk memperjelas secara lebih mendalam aspek yang kurang jelas dalam keterangan naratif yang sudah ada.

182. Proyek ini membatasi keterangan yang dikumpulkan pada beberapa pelanggaran spesifik, yaitu penahanan sewenang-wenang, pemindahan dan kematian yang berkaitan dengan konflik yang secara langsung dapat dihubungkan pada peristiwa-peristiwa 20 Agustus 1982 dan penumpasan yang terjadi berikutnya. Oleh sebab itu proyek ini tidak mendokumentasikan pelanggaran dalam bentuk lain, seperti misalnya penghancuran milik pribadi dan kejahatan seksual. Yang juga tidak didokumentasikan adalah pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan peristiwa-peristiwa lain yang tidak berhubungan dengan pemberontakan 20 Agustus.

183. Proyek ini memberikan perhatian khusus untuk menghindari masalah terjadinya laporan duplikat tentang korban yang sama yang disampaikan deponen-deponen pada tahap berbeda dalam proses dokumentasi. Pertama, kelompok pengumpul data secara berkala memeriksa keseluruhan daftar untuk menghindari adanya laporan duplikat tentang korban. Kedua, sesudah memasukkan data-data ke dalam database elektronis, kelompok proyek tersebut melakukan tes-tes analitis dan pemeriksaan lewat komputer dalam upaya menentukan nama-nama yang mana yang ada kemungkinan merupakan laporan duplikat tentang korban yang sama.[†]

6.4.4 Latar belakang historis

184. Pada tanggal 6 Juli 1982 anggota-anggota Falintil dan gerakan klandestin setempat mulai merencanakan suatu rangkaian penyerangan pada pos militer Indonesia di sekitar Mauchiga. Seorang informan membocorkan rencana tersebut kepada tentara Indonesia. Pada tanggal 10 Juli tentara Indonesia dan Hansip dari Hatu Builico mulai melaksanakan penggeledahan dari rumah ke rumah di Goulora, Mauchiga dan Hatuquero. Mereka menahan lebih dari 30 orang, termasuk 13 orang yang menghadiri pertemuan tanggal 6 Juli. Yang ditahan langsung dibawa ke markas besar wilayah (Kodim) di kota Ainaro. Pada hari-hari berikutnya, tentara Indonesia menahan lebih banyak orang. Mereka membawa tahanan tersebut ke markas subdistrik (Koramil) di Hatu Builico.

185. Meskipun sebagian orang telah ditangkap, pada tanggal 20 Agustus 1982, sekitar jam 4:30 pagi, Falintil bersama beberapa orang dari Dare dan Mauchiga menyerbu beberapa pos ABRI di sekitar Mauchiga, termasuk Koramil di Dare. Pada hari yang sama tentara ABRI dan

^{*} Abilio dos Santos adalah sekretaris desa Mauchiga. Olga da Silva adalah guru sekolah dasar di Mauchiga. Komisi memilih untuk mengikuti ejaan resmi RDTL "Mauchiga", meskipun banyak orang juga mengenali desa ini sebagai "Mauxiga".

[†] Proses pemeriksaan ini menemukan tujuh laporan duplikat mengenai pelanggaran fatal.

Hansip dari pos yang diserang dan juga pos lain di wilayah tersebut, mengadakan serangan balasan. Pada hari-hari berikutnya tambahan pasukan ABRI dari luar wilayah tersebut, termasuk satuan-satuan dari batalion 745 dan 744, disebarkan di sekitar Mauchiga. Antara tanggal 20 Agustus dan 24 Agustus pasukan tentara Indonesia dan Hansip menghancurkan dan menjarah milik pribadi masyarakat. Sejumlah besar penduduk desa Mauchiga dipaksa pindah atau melarikan diri ke luar desa karena takut akan keselamatan pribadi mereka. Tentara militer Indonesia memindahkan penduduk dengan paksa ke beberapa lokasi, termasuk pulau Atauro (Dili), Dotik (Alas, Manufahi) dan Dare (Hatu Bulico, Ainaro).

6.4.5 Analisis statistik deskriptif pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan pada Proyek Dokumentasi Mauchiga

Laporan pemindahan dan penangkapan yang diderita penduduk Mauchiga

Profil demografis para korban pemindahan dan penangkapan

186. Proyek ini mendokumentasikan 1.803 tindak pemindahan yang terjadi pada penduduk Mauchiga antara Juli 1982 dan Januari 1986. 1.803 pemindahan ini dialami oleh 464 orang penduduk Mauchiga: 48,7% (226/464) dari mereka adalah wanita dan 38,8% (180/464) adalah anak-anak.

187. Ke-464 korban pemindahan dan penangkapan sama dengan kira-kira 20,4% (464/2.269) dari jumlah total penduduk Desa Mauchiga.[†] Jadi, hasil temuan proyek ini sesuai dengan hipotesis bahwa pemindahan di Mauchiga pada tahun 1980-an dilakukan secara meluas.

188. Dari korban pemindahan yang dilaporkan, 80,0% (371/464) diantaranya pada awalnya ditahan dan dipindahkan bersama keluarga mereka. Sisanya, yang 20% (93/464), pada awalnya ditahan sendiri (tidak bersama keluarganya).[‡] Seperti yang tampak pada Bagan <gMauchigaASD1100.pdf>, 41,2% (191/464) pemindahan dialami oleh penduduk yang berusia antara 10 dan 24. Seperti yang dulu dan kini masih tetap terjadi pada kasus di sebagian besar Timor-Leste, penduduk Mauchiga kebanyakan terdiri atas orang yang berusia dibawah 25 tahun. Oleh sebab itu, hasil temuan Proyek Dokumentasi Mauchiga sesuai dengan hipotesis bahwa tentara militer Indonesia secara aktif berusaha memusnahkan dasar sosial dan operasional gerakan perlawanan di Mauchiga dengan cara pemindahan paksa masyarakat umum (termasuk wanita, anak-anak dan orang tua).

[Masukkan Bagan <gMauchigaASD1100.pdf> di sini]

Pertanggungjawaban pemindahan dan tindak penangkapan dalam skala besar terhadap penduduk Mauchiga

189. Keseluruhan tindakan pemindahan dari 1.803 orang yang dilaporkan ini, yang didokumentasikan oleh Proyek Dokumentasi Mauchiga, disangkutkan dengan militer Indonesia. Dalam beberapa kasus khusus, deponen-deponen melaporkan keterlibatan satuan tertentu dari tentara militer Indonesia atau kekuatan pertahanan sipil. Hansip Hatu Bulico dilaporkan telah menjalankan 31,7% (571/1,803) dari tindak pemindahan yang menyangkut penduduk Mauchiga. Pada peristiwa pemindahan yang sama, dilaporkan pada Proyek

^{*} Komisi menggunakan standar yang diakui internasional yang mendefinisikan anak-anak sebagai orang yang berusia di bawah 18 tahun (lihat Artikel 1 dari Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak (UN Doc A/44/49 (1989)), yang diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB No. 44/25 tanggal 20 November 1989 (resmi diberlakukan pada 2 September 1990.)

[†] Jumlah penduduk Mauchiga berdasarkan Suco Survey Timor-Leste 2001.

[‡] Orang yang dipindahkan secara individu (perorangan) dipindahkan dengan cara ini. Mereka ditangkap oleh tentara militer Indonesia ketika mereka sedang sendirian, biasanya orang itu sedang mengerjakan ladang taninya, atau di tempat lain yang jauh dari tempat tinggalnya.

Dokumentasi Mauchiga bahwa Hansip Hatu Bulico bekerjasama dan bertindak dengan pengarahan dari Komando Resort Militer (Korem) Dili, Komando Distrik Militer (Kodim) Ainaro dan Komando Rayon Militer (Koramil) Hatu Bulico. Keseluruhan tindakan ini terjadi baik tanggal 7 Juli 1982, 29 Agustus 1982 maupun tanggal 30 Agustus 1982.

Pola tindak pemindahan dan penangkapan lintas waktu

190. Tindak pemindahan yang dilaporkan dipusatkan dalam dua periode utama, yaitu: kuartal ketiga tahun 1982, ketika 51,0% (919/1.803) pemindahan itu dilaporkan, dan kuartal keempat tahun 1985 ketika 40,6% (732/1.803) pemindahan itu dilaporkan. Pola ini diperlihatkan pada Bagan <gTSMauchiga400.pdf>. Pada kedua masa inilah sebagian besar penduduk Mauchiga yang diasingkan ke Atauro dipindahkan dari Mauchiga ke Atauro dan dikembalikan lagi ke Mauchiga dari Atauro. Pada kedua periode ini, orang-orang pertama dipindahkan sementara ke lokasi transit untuk waktu singkat antara satu hari sampai dengan beberapa minggu.

[Masukkan Bagan <gTSMauchiga400.pdf> di sini]

Pola tindak pemindahan dan penangkapan lintas ruang geografis dan lamanya penahanan

191. Seperti yang terlihat pada Bagan <t400duration.rtf>, masa lamanya penahanan yang dilaporkan pada proyek dokumentasi sangat bervariasi, antara satu hari sampai dengan 1.005 hari. Sekitar 41,0% (739/1.803) dari keseluruhan yang dilaporkan berlangsung selama sepuluh hari atau kurang, 22,1% (399/1.803) dari peristiwa pemindahan berlangsung antara 101 dan 300 hari, dan 20% (368/1.803) antara 701 dan 900 hari. Data yang dikumpulkan oleh Proyek Dokumentasi Mauchiga sesuai dengan hipotesis bahwa meskipun penduduk Mauchiga dipindah-pindahkan beberapa kali (setiap orang rata-rata dipindahkan 3,9 kali), sekitar separuh dari pemindahan ini berlangsung dalam waktu yang singkat (dalam waktu kurang dari seminggu), sedangkan separuhnya lagi pada dasarnya lebih lama (bervariasi antara tiga sampai dengan 33 bulan).

Table 1 - Bagan <t400duration.rtf>: Penyebaran lamanya periode dari peristiwa pemindahan penduduk Mauchiga, 1982-1985

Lama	Jumlah	% Persentase
1 hari	192	10,7
2-10 hari	547	30,3
11-100 hari	113	6,3
101-300 hari	399	22,1
301-500 hari	87	4,8
501-700 hari	8	0,4
701-900 hari	368	20,4
901-1005 hari	87	4,8
Tidak diketahui	2	0.1
Total	1.803	100,0

Sumber: Data yang dikumpulkan oleh sekretaris desa Mauchiga.

192. Tentara Indonesia menahan penduduk Mauchiga dalam jangka panjang di beberapa lokasi, termasuk pulau Atauro, Dotik, Kota Ainaro dan Dare. 79,3% (368/464) penduduk Mauchiga yang didokumentasikan oleh Proyek Dokumentasi Mauchiga, telah ditahan dalam

jangka panjang di Ataúro.[†] Kelompok-kelompok lebih kecil penduduk Mauchiga dilaporkan ditahan dalam jangka panjang di Dotik dan Kota Ainaro: 80 orang ditahan selama two tahun dan enam bulan di Dotik mulai November 1982, dan tujuh orang ditahan selama dua tahun dan sembilan bulan di Kota Ainaro mulai bulan April 1983. Wawancara lanjutan yang diadakan oleh Komisi dengan penduduk Mauchiga pada tahun 2005 di Mauchiga menunjukkan bahwa orang-orang yang ditahan dalam jangka panjang di Dotik dan Ainaro, ditahan di sana karena Ataúro sudah terlalu penuh.[†]

193. Pola umum yang dilaporkan tentang pemindahan ke dan dari lokasi penahanan jangka panjang bagi penduduk Mauchiga adalah sebagai berikut: korban biasanya ditangkap dan ditawan di Mauchiga dan kemudian dibawa ke berbagai lokasi yang tidak jauh letaknya di mana mereka biasanya ditahan selama satu hari sampai dengan 10 hari. Oleh karena lokasi ini biasanya merupakan lokasi transit sementara menuju ke pusat penahanan jangka panjang atau kembali ke Mauchiga, periode penahanan mereka biasanya merupakan rangkaian penahanan singkat. Tempat-tempat orang ditawan untuk periode pendek ini adalah Kota Ainaro, Bonuk (Hatu Udo, Ainaro), Dare (Hatu Builico, Ainaro), Lesuhati (Hatu Builico, Ainaro), Same (Manufahi) dan penjara Comarca di Dili. Yang lainnya ditawan di lokasi lain seperti Dotik, Kota Ainaro dan Dare, sebelum atau sesudah periode penahanan jangka panjang mereka. Penduduk Mauchiga juga ditawan untuk beberapa bulan di Dare, Dotik, Same, Kota Ainaro dan Bonuk dalam perjalanan menuju atau ke lokasi-lokasi penahanan jangka panjang mereka.

Table 2 - Bagan <t400duration.rtf>: Tabulasi silang lamanya periode tindak pemindahan Penduduk Mauchiga menurut lokasinya, 1982-1985

	1 hari	2 – 10 hari	11-100 hari	101-300 hari	301-500 hari	501-700 hari	701-900 hari	901-1005 hari	Tidak diketahui	Total
Ainaro	2	0	16	22	0	0	0	7	0	47
Ataúro	0	0	0	0	0	8	368	0	1	377
Bonuk	0	355	22	0	0	0	0	0	0	377
Comarca	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13
Dare	172	0	0	377	80	0	0	0	1	630
Dotik	0	0	6	0	7	0	0	80	0	93
Lesuhati	1	182	0	0	0	0	0	0	0	183
Same	4	10	69	0	0	0	0	0	0	83
Total	192	547	113	399	87	8	368	87	2	1.803

194. Data yang dikumpulkan Proyek Dokumentasi Mauchiga sesuai dengan hipotesis bahwa di Ataúro dan di Dotik dan Kota Ainaro tentara Indonesia menggunakan penahanan jangka panjang terhadap para pendukung dan yang dicurigai mendukung gerakan Perlawanan sebagai suatu strategi untuk melumpuhkan dasar sosial dan dukungan operasional gerakan Perlawanan di Mauchiga. Data ini juga memperlihatkan bahwa Penduduk Mauchiga mengalami serangkaian pemindahan dan penahanan sebelum dan sesudah masa penahanan jangka panjang mereka di Ataúro, atau di Dotik dan di Kota Ainaro.

[†] Tentara Indonesia mengirim 360 dari 368 penduduk Mauchiga ini ke Ataúro pada tanggal 30 Agustus 1982. Delapan orang sisanya dikirim ke Ataúro pada tanggal 5 September 1982 setelah diinterogasi selama satu minggu di Lesuhati.

[†] Wawancara CAVR dengan Olga da Silva, Abilio dos Santos, Xavier do Amaral dan António Pires, di Mauchiga, 16 April 2005.

Pelanggaran fatal yang diderita Penduduk Mauchiga

Distribusi pelanggaran fatal lintas waktu dan penyebab kematian yang dilaporkan yang dialami Penduduk Mauchiga

195. Proyek Dokumentasi Mauchiga mendokumentasikan 262 kematian penduduk Mauchiga yang berkaitan dengan konflik selama periode acuan Komisi: 44,7% (117/262) dari jumlah ini dibunuh, dan sisanya 55,3% (145/262) mati karena sakit atau kelaparan. Bagan <gMauchiga1st1M100200.pdf> menunjukkan bahwa 68,3% (179/262) dari pelanggaran fatal ini terjadi pada periode awal invasi dan pendudukan tentara Indonesia antara 1978 dan 1984. Selanjutnya, pola-pola pembunuhan dan kematian yang berhubungan dengan penyakit/kelaparan penduduk Mauchiga berkorelasinya secara positif. Jadi data yang dikumpulkan Proyek Dokumentasi Mauchiga sesuai dengan hipotesis bahwa pembunuhan dan kematian karena penyakit/kelaparan di Mauchiga yang berkaitan dengan konflik sebagian besar terjadi pada waktu adanya operasi balasan terhadap gerakan Perlawanan oleh tentara militer Indonesia.

[Masukkan Bagan<gMauchiga1st1M100200.pdf> di sini]

196. Meskipun pola pembunuhan dan kematian karena penyakit/kelaparan berkorelasi lintas waktu, ada beberapa perbedaan menonjol antara kedua kejadian itu. Pembunuhan-pembunuhan yang terdokumentasi terpusatkan sebagian besar pada tahun 1978 dan 1982-83 (dengan 19,7% (23/117) yang terjadi pada tahun 1978 dan 47,9% (56/117) di tahun 1982-83), sedangkan 44,8% (65/145) kematian karena penyakit/kelaparan terpusatkan pada tahun 1983-84 ketika penduduk Mauchiga mengalami deportasi massal dari kediaman mereka.

Pola pertanggungjawaban terkait untuk pelanggaran fatal Penduduk Mauchiga yang dilaporkan

197. Dari seluruh pembunuhan-pembunuhan yang didokumentasikan oleh Proyek Dokumentasi Mauchiga, 83,8% (98/117) dilaporkan merupakan tanggungjawab sepenuhnya tentara Indonesia, 6,0% (7/117) merupakan tanggungjawab sepenuhnya pasukan pembantu mereka asal Timor-Leste dan 10,3% (12/117) tidak dilaporkan siapa yang bertanggungjawab atas pembunuhan itu. Tidak ada laporan mengenai pembunuhan yang dilakukan bersama antara tentara Indonesia dan pasukan pembantu asal Timor Timur, juga tidak ada laporan mengenai adanya pembunuhan yang dilakukan oleh perorangan yang terkait dengan gerakan Perlawanan. Pola pertanggungjawaban terkait ini rupanya membedakan Mauchiga dari bagian lain di Timor-Leste, di mana sejumlah besar pembunuhan merupakan tindakan bersama antara pasukan tentara Indonesia dengan pasukan pembantu mereka asal Timor Timur (lihat di atas).

198. Dari pembunuhan-pembunuhan yang terdokumentasi terhadap penduduk Mauchiga yang dikaitkan dengan tentara Indonesia, 66,3% (65/98) diderita oleh orang yang ada hubungannya dengan gerakan Perlawanan dan sisanya yang 33,7% (33/98) diderita oleh penduduk sipil.

Pola pelanggaran fatal terhadap Penduduk Mauchiga menurut afiliasi politik korban

199. Penyebaran pembunuhan dan kematian karena penyakit/kelaparan yang terdokumentasi sangat bervariasi menurut afiliasi politik para korban. Seperti terlihat pada Bagan <tMauchigaVictAffil100200.rtf>, 64,1% (75/117) pembunuhan dilaporkan merupakan pembunuhan terhadap orang yang secara formal berkaitan dengan gerakan Perlawanan. Sebaliknya, seluruh orang (kecuali satu) yang mati karena penyakit atau kelaparan adalah penduduk sipil tak bersenjata. Hal ini sesuai dengan hipotesis bahwa meskipun pembunuhan terutama disasarkan pada anggota gerakan Perlawanan dan anggota klandestin, tentara

¹ Koefisien korelasi antara kedua rangkaian ini adalah 0,57.

Indonesia dan pembantu-pembantu mereka membunuh sejumlah besar penduduk sipil selama berlangsungnya operasi penumpasan gerakan Perlawanan. Bagan <tMauchigaVictAffil100200.rtf>:

Table 3 - Penyebaran pelanggaran fatal yang dilaporkan menurut afiliasi politik korban, 1974-1999

Afiliasi korban	Pembunuhan		Kematian karena sakit/kelaparan	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Penduduk sipil tak bersenjata	42	35,9	144	99,3
Anggota Gerakan Perlawanan/Klandestin	75	64,1	1	0,7
Total	117	100,0	145	100,0

Sumber: Data yang dikumpulkan oleh sekretaris desa Mauchiga.

200. Penyebaran geografis pembunuhan-pembunuhan penduduk Mauchiga yang dilaporkan berbeda dengan penyebaran geografis kematian karena kelaparan dan penyakit. Seperti diperlihatkan pada bagan <tMauchigaVictAffilLoca100200.rtf>, kematian yang berhubungan dengan penyakit/kelaparan hampir selalu terjadi di kecamatan-kecamatan Kota Ainaro (Ainaro), Alas (Manufahi) dan Ataúro (Dili), sebaliknya pembunuhan-pembunuhan yang dilaporkan sebagian besar terjadi di Kota Ainaro (Ainaro), Alas (Manufahi), dan Same (Manufahi). Bagan <tMauchigaVictAffilLoca100200.rtf>:

Table 4 - Penyebaran pelanggaran-pelanggaran fatal yang dilaporkan menurut afiliasi politik dan lokasi geografis, 1974-1999

Kecamatan di mana pelanggaran terjadi	Pembunuhan		Kematian karena sakit/kelaparan		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Ainaro, Ainaro	45	38,5	43	29,7	88	33,6
Maubisse, Ainaro	4	3,4	0	0	4	1,5
Bobonaro, Bobonaro	1	0,9	0	0	1	0,4
Alas, Manufahi	31	26,5	47	32,4	78	29,8
Fatuberliu, Manufahi	4	3,4	0	0	4	1,5
Same, Manufahi	31	26,5	0	0	31	11,8
Laleia, Manatuto	1	0,9	0	0	1	0,4
Ataúro, Dili	0	0	55	37,9	55	21,0
Total	117	100	145	100	262	100

Sumber: Data yang dikumpulkan oleh sekretaris desa Mauchiga.

Pola pelanggaran-pelanggaran fatal terhadap penduduk Mauchiga yang dilaporkan menurut usia dan jenis kelamin korban

201. Seperti kasus pembunuhan lainnya di seluruh Timor-Leste, sebagian besar pembunuhan di Mauchiga yang dilaporkan kepada Proyek Dokumentasi Mauchiga adalah laki-laki (92,3% (108/117) pembunuhan yang dilaporkan adalah laki-laki dan sisanya yang 7,7% (9/117) adalah perempuan). Kalau kita beralih dari hitungan pelanggaran sederhana ke hitungan pelanggaran

berbasis penduduk, terlihat bahwa, secara rata-rata, relatif terhadap persentase penduduk Mauchiga, maka angka berbasis penduduk menunjukkan laki-laki yang terbunuh sepuluh kali lebih tinggi. Sembilan puluh lima laki-laki per 1.000 dilaporkan terbunuh selama periode acuan Komisi, dibandingkan dengan delapan perempuan per 1.000.

202. Seperti yang terlihat pada Bagan <ggMauchigaASD100.pdf>, 41,0% (48/117) pembunuhan yang terdokumentasi adalah pembunuhan terhadap laki-laki muda berusia antara 15 dan 29. Hal ini sesuai dengan hipotesis bahwa sebagai bagian dari strategi operasi balasan terhadap Gerakan Perlawanan, tentara Indonesia mengarah pada laki-laki muda dalam usia dinas militer.

[Masukkan Bagan<ggMauchigaASD100.pdf> di sini]

203. Sebaliknya penyebaran menurut jenis kelamin pada kematian karena penyakit dan kelaparan terlihat lebih merata: 50,3% (73/117) adalah kematian laki-laki dan 49,7% (72/117) adalah kematian perempuan. Dipandang dari segi persentase penduduk, angka berbasis penduduk yang sepadan tentang kematian karena sakit/kelaparan diselidiki untuk laki-laki dan perempuan: 64 per 1.000 lelaki di Mauchiga dilaporkan mati karena kelaparan/sakit, hal yang sama juga terjadi pada kasus untuk perempuan.[†]

204. Seperti yang terlihat pada Bagan <gMauchigaASD200.pdf>, penduduk Mauchiga yang paling sering dilaporkan mati karena sakit dan kelaparan adalah anak-anak dan orang berusia lanjut. Pola kerentanan mati karena kelaparan pada anak-anak muda usia dan orang yang lanjut usia adalah sama dengan yang tercatat oleh Komisi di seluruh Timor-Leste.

[Masukkan Bagan<gMauchigaASD200.pdf> di sini]

6.5 Ringkasan dan kesimpulan

205. Komisi mengumpulkan dan menggunakan serangkaian luas sumber-sumber data empiris. Komisi mengumpulkan hampir 8.000 pernyataan naratif dari orang-orang Timor-Leste berkenaan dengan pengalaman mereka selama 25 tahun berada dalam situasi konflik, melakukan survei rumah tangga yang menyelidiki tentang kematian dan pemindahan dari hampir sebanyak 1.400 rumah tangga, melakukan sensus pekuburan umum di seluruh 13 distrik Timor-Leste, dan mengembangkan dataset dari informasi yang dikumpulkan dari organisasi dan kelompok lain.[‡] Tujuan bab mengenai statistik ini ada tiga:

[†] Angka berbasis penduduk ini diambil dari jumlah penduduk berdasarkan Suco Survey Timor-Leste 2001.

[†] Angka berbasis penduduk ini juga diambil dari jumlah penduduk berdasarkan Suco Survey Timor-Leste 2001.

[‡] Informasi dari luar yang disusun ke dalam dataset termasuk laporan-laporan dan bahan-bahan materi lainnya dari Amnesty International, wawancara naratif dikumpulkan oleh Fokupers (organisasi wanita Timor Timur yang memperjuangkan hak-hak) dan daftar-daftar tabel yang dibuat oleh para pemimpin desa Mauchiga.

- Menyajikan perkiraan berbagai jenis, mandiri, dan ilmiah mengenai keseluruhan cakupan, pola dan kecenderungan dari kematian dan pemindahan yang terjadi selama periode acuan Komisi
- Menggambarkan secara garis besar serta menafsirkan statistik deskriptif berkenaan dengan sifat dan cakupan pelanggaran, tingkah laku para pelaku tindak kekerasan, dan penggambaran mengenai sifat korban, yang dikumpulkan dari berbagai sumber data independen, dan
- Mendokumentasikan metode-metode statistik yang digunakan untuk memperoleh temuan-temuan statistik Komisi.

206. Untuk mencapai kedalaman dan keluasan analisis ini, Komisi dan Benetech Human Rights Data Analysis Group bekerjasama mengembangkan berbagai proyek data yang meliputi pengumpulan data dalam skala luas, pengkodean data, penyajian database, record linkage dan analisis statistik. Hasil analisis statistik menolong untuk membuka dan menjelaskan pengetahuan sosial dan historis dari kekerasan politik di Timor-Leste antara tahun 1974 dan 1999. Meskipun demikian, sebagai satu bagian dari keseluruhan temuan-temuannya, temuan-temuan statistik Komisi harus digabungkan dan diintegrasikan dengan temuan-temuan kualitatif, historis dan yuridis.

¹ John Waddingham, "Timor-Leste Death Toll, 1975-1999," Submission to CAVR, 22 July 2003.

² Terence Hull "From Province to Nation: The Demographic Revolution of a People" dalam James J. Fox dan Dionisio Babo Soares (ed), *Out of the Ashes: The Destruction dan Reconstruction of East Timor*, (Crawford House Publishing. Bathurst, Australia: 2000), hal. 38.

³ Arnold Kohen dan John Taylor, *An Act of Genocide: Indonesia's Invasion of East Timor*, Tapol, London, 1979, hal.58.

⁴ John G Taylor, "Encirclement dan Annihilation': The Indonesian Occupation of East Timor," dalam Robert Gellately dan Ben Kiernan (eds) *The Specter of Genocide: Mass Murder in Historical Perspective*, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.

⁵ "Report on Timor-Leste," dokumen Gereja Timor Leste, 12 Juli 1979, dikutip dalam C. Gilbert dan J. Waddingham, "Timor-Leste – How many people are missing?," laporan dari Timor Information Service kepada sebuah komite di Senat Australia (Australian Senate Standing committee on Foreign Affairs dan Defence), 28 Maret 1982.

⁶ Artikel 1 Konvensi tentang Hak-hak Anak, Dokumen Sidang Umum PBB A/44/49 (1989).

⁷ Biro Pusat Statistik, Sensus Penduduk Indonesia, 1990, Jakarta, 1994.